

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

(Studi Pada Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ENIK AGUSTIN
135030100111086**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

MOTTO

“ WAKTU ITU BAGAIKAN PEDANG, JIKA KAMU TIDAK
MEMANFAATKAN DENGAN MENGGUNAKANNYA UNTUK
MEMOTONG, IA AKAN MEMOTONGMU (MENGILASMU)”
(HADIST RIWAYAT MUSLIM).



PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)

Disusun oleh : ENIK AGUSTIN

NIM : 135030100111086

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi/Minat : -

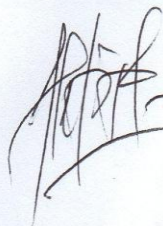
Malang, 22 Februari 2017

Komisi Pembimbing
Ketua



Niken Lastiti V.A, S.Ap, M.Ap
NIP19810210 200501 2 002

Anggota



Nurjati Widodo S.Ap, M. Ap
NIP. 2012018301291001

PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2017
Jam : 08.00-09.00 WIB
Skripsi atas nama : Enik Agustin
Judul : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)

Dan dinyatakan lulus.

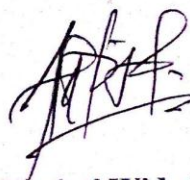
MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



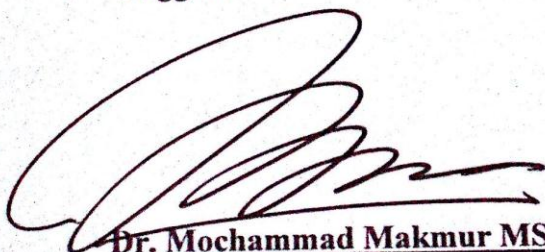
Niken Lastiti V.A S.Ap, MAP
NIP. 19810210 200501 2 002



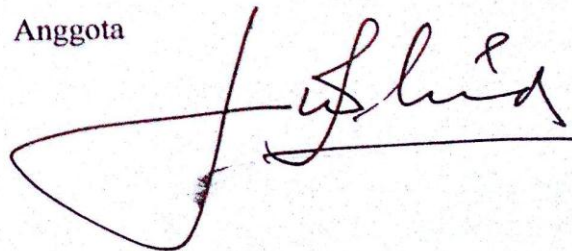
Nurjati Widodo, S.Ap MAP
NIP. 2012018301291001

Anggota

Anggota



Dr. Mochammad Makmur MS
NIP. 19511028 198003 1 002



Drs. Abdul Wachid MPD
NIP. 19561209 198703 1 008

PERNYATAAN ORSINILITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 01 Maret 2017



Enik Agustin

135030100111086

*Kupersembahkan Karyaku Kepada
Ayahanda (Mujiono), Ibunda (Srikanah),
Adek (Diah Fatma Hidayati),
Keluarga Mbah Suratman serta
Desa Pulosari dan
Almamater Universitas Brawijaya*



RINGKASAN

Enik Agustin, 2017, **Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik** (Studi Pada Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang), Pembimbing I, Niken Lastiti V.A S.Ap, M.Ap, Pembimbing II, Nurjati Widodo S.Ap, M.Ap, 195 Hal + xv Hal.

Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam keterbukaan informasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana efektivitas penerapan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Desa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga yaitu bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Pulosari dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, bagaimana penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Pulosari, dan apa saja faktor pendukung, penghambat penerapan Sistem Informasi Desa di Pulosari.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan peneliti adalah dokumen, informan dan peristiwa, sedangkan sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari hasil interview, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data analisis diolah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, *interview guide* dan peralatan pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa dalam penerapan sistem dalam penerapan Sistem Informasi Desa belum sepenuhnya efektif, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian tujuan penerapan belum tercapai karena kualitas sumber daya pemakai atau masyarakat Desa Pulosari yang masih kurang sehingga masyarakat belum mampu beradaptasi dengan lingkungan baru serta belum adanya SOP (*Standart Operating Procedure*) terkait penerapan SID. Selain itu, dalam penerapan masih terdapat beberapa hambatan seperti: kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Sistem Informasi Desa, kurangnya koordinasi dan kerjasama pendamping Desa Pulosari dan kurangnya sumber daya *hardware* seperti komputer, printer, dan mesin scan. Namun, terdapat beberapa faktor pendukung dalam penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Pulosari yaitu: Komitmen Pimpinan Kepala Desa Pulosari, dukungan dari dinas terkait, serta sumber daya jaringan.

SUMMARY

Enik Agustin, 2017, **Effectiveness of the Application of Information Technology Through the Village Information System to Improve Public Disclosure** (Study of village Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang), Preceptor I, Niken Lastiti V.A S.Ap, M.Ap, Preceptor II, Nurjati Widodo S.Ap, M.Ap, 195 Hal + xv Hal.

Information technology has important role in the open information. This study examines how effectiveness of the application of information technology through the Village Information System to improve public disclosure in the Village District of Bareng Pulosari Jombang. The problems of this research there are three, namely how the effectiveness of the application of Information Systems Village in Pulosari Village in order to increase transparency of public information, how the information system the village in order to improve public disclosure in the village Pulosari, and any contributing factors, inhibiting the application of Information Systems village in Pulosari.

This research uses descriptive method with qualitative approach. The type of data used by researchers is documents, informants and events, while the data source is primary and secondary data. The collection of data obtained from the interviews, observation and documentation. Further analysis of the data was processed using an interactive model of Miles and Huberman. The research instrument used a researchers, interview guides and supporting equipment.

Based on the research results can be obtained that the application of the system in the application of Information Systems village is not yet fully effective, as shown by the achievement of the purposes of the application has not been achieved because of the quality of the resource users or people Pulosari Village that is still less so that the community has not been able to adapt to the new environment and absence SOP (Standard Operational Procedure) in the application. Moreover, in the application there are still some barriers such as: lack of socialization conducted by the government apparatus village resulted in a lack of understanding of the public regarding Information Systems Village, lack of coordination and cooperation companion Pulosari Village and lack of hardware resources such as computers, printers, and the scan engine. However, there are several contributing factors in the application of Information Systems in the village of Desa Pulosari namely: Leadership Commitment Village Head Pulosari, support from related agencies, as well as network resources.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Alloh S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada hamba-Nya, nikmat Iman dan Islam, nikmat kesehatan, dan waktu yang luang serta kenikmatan lain yang tak terhitung jumlahnya. Atas anugerah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun tujuan disusunnya sripsi ini tak lain adalah dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Berkenaan dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa, maka penulis berkehendak melihat bagaimana Sistem Informasi Desa diterapkan, dan oleh penulis dituangkan dalam sebuah tulisan berjudul “ Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Desa Pulosari Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang)”.

Sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini, tidak sedikit bantuan yang penulis terima dan karenanya pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. MR. Khairul Muluk, M.Si selaku Pembantu Dekan 1
4. Drs. Heru Susilo, M.A selaku Pembantu Dekan 2
5. Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si selaku Pembantu Dekan 3

6. Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

7. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.

8. Niken Lastiti VA S.Ap, M.Ap selaku Ketua Komisi Pembimbing.

9. Nurjati S.Ap, M.Ap selaku Anggota Komisi Pembimbing yang selalu sabar dan teliti dalam memberikan bimbingan.

10. Dr. Makmur, MS dan Drs. Abdul Wachid, M.Ap selaku Dosen Penguji.

11. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmunya.

12. Bapak Rokim, Bapak Widji, Bapak Nurul, Bapak Supar selaku aparatur pemerintah Desa Pulosari, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pemikiran penulis sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat dalam penerapan sebuah sistem informasi. Semoga skripsi ini bermanfaat dimasa saat ini maupun di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
RINGKASAN	v
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Konsep Administrasi Publik	12
1. Pengertian Administrasi Publik	12
B. Konsep Sistem Informasi Manajemen	13
1. Pengertian Sistem Informasi	13
2. Pengertian Sistem Informasi Manajemen	18
3. Penerapan Sistem Informasi dalam Proses Manajemen	19
C. Konsep E-Government	19
1. Pengertian E-Government	19
2. Manfaat dan Tujuan E-government	20
3. Tipe Relasi E-Government	22
4. Pengembangan E-Government	24
5. Elemen Sukses Pengembangan E-Government	25
D. Konsep Keterbukaan Informasi Publik	27
1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik	27
2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	28
3. Transparansi	28
E. Konsep Efektivitas	30
1. Pengertian efektivitas	30
2. Pendekatan efektivitas	31
3. Indikator efektivitas	32
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas	33
F. Konsep Sistem Informasi Desa (SID)	35
1. Pengertian SID	35
2. Tujuan dan Fungsi SID	35
3. Domain SID	37
4. Dasar Hukum Penerapan SID	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
1. Pengamatan (observasi).....	44
2. Interview (wawancara)	45
3. Dokumentasi.....	47
F. Instrumen Penelitian	47
G. Teknik Analisis Data.....	48
H. Pengujian Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pulosari.....	53
1. Pemerintah Desa Pulosari.....	53
2. Keadaan Demografi dan Geografis Desa Pulosari	63
3. Data Potensi Desa (Ekonomi, Sosial, Dan Budaya).....	67
B. Gambaran Umum Sistem Informasi Desa	70
C. Penyajian Data Fokus Penelitian	75
1. Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.....	75
2. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.....	100
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.....	112
D. Analisis dan Interpretasi	123
1. Penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	123
2. Efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.....	134
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.....	140
BAB V PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penggiat Sistem Informasi Desa Kabupaten Jombang	5
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian	46
Tabel 3. Masa Pemerintahan Desa Pulosari 9 Periode.....	64
Tabel 4. Data Demografi Penduduk Desa Pulosari Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2016	65
Tabel 5. Luas Tanah Desa Pulosari Berdasar Penggunaan Tahun 2016.....	66
Tabel 6. Infrastruktur Jalan Desa Pulosari Tahun 2016.....	67
Tabel 7. Data Mata Pencarian Penduduk Desa Pulosari Tahun 2016.....	68
Tabel 8. Kelompok Tani Desa Pulosari Tahun 2016	69

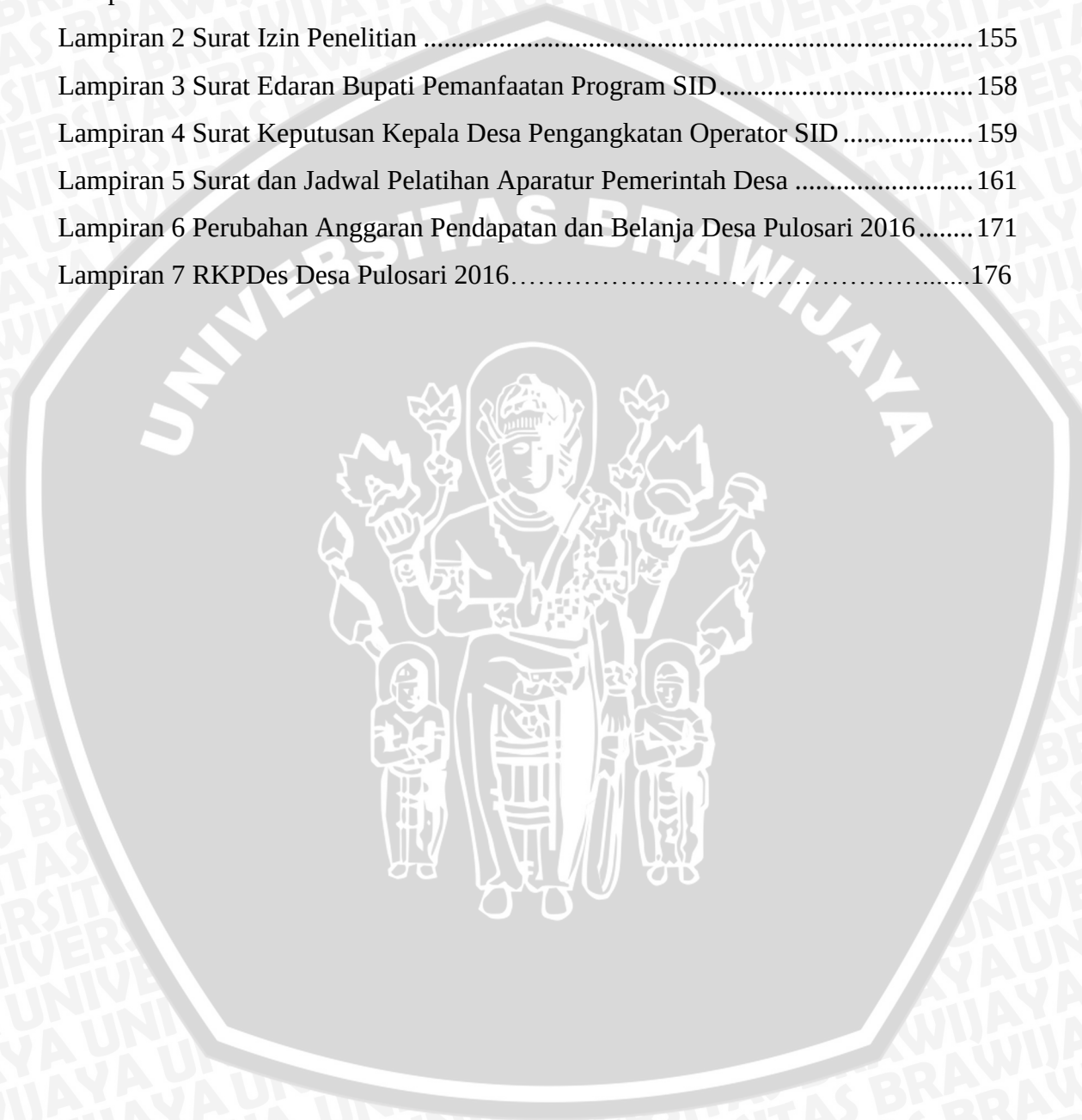


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Informasi	14
Gambar 2. Komponen-Komponen Sistem Informasi	16
Gambar 3. Empat Tipe Relasi <i>e-Government</i>	22
Gambar 4. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	49
Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulosari 2014-2019..	61
Gambar 6. Modul Cetak Surat Sistem Informasi Desa.....	71
Gambar 7. Tampilan Back End Sistem Informasi Desa	72
Gambar 8. Tampilan Front End Sistem Informasi Desa.....	72
Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Widji Selaku Operator SID	78
Gambar 10. Wawancara dengan Bapak Rokim Selaku Kepala Desa Pulosari.....	79
Gambar 11. Gambar Komponen Komputer Desa Pulosari.....	89
Gambar 12. Data Pokok Desa Pulosari.....	95
Gambar 13 Data Statistik Pengunjung Website Desa Pulosari.....	104
Gambar 14 Launching Sistem Informasi Desa Pulosari.....	116
Gambar 15. Wawancara dengan Pendamping Desa Pulosari.....	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	149
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	155
Lampiran 3 Surat Edaran Bupati Pemanfaatan Program SID.....	158
Lampiran 4 Surat Keputusan Kepala Desa Pengangkatan Operator SID	159
Lampiran 5 Surat dan Jadwal Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	161
Lampiran 6 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari 2016.....	171
Lampiran 7 RKPDDes Desa Pulosari 2016.....	176



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak mendapat informasi publik yang disediakan oleh pemerintah untuk mengembangkan dirinya. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F berkaitan dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang secara khusus berhubungan dengan hak atas informasi publik menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu jaminan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh informasi atas penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan pemerintahan yang bersih. Keterbukaan informasi publik dalam prakteknya tidak terlepas dari transparansi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang KIP, setiap badan publik wajib menerapkan keterbukaan informasi publik. Badan publik adalah suatu lembaga baik itu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta lembaga penyelenggara negara yang mendapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta organisasi baik pemerintah maupun nonpemerintah yang berbadan hukum atau tidak yang menerima sumbangan dari masyarakat, atau luar negeri.

Salah satu contoh badan publik adalah desa. Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan selaku badan publik yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara negara serta dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD serta dana lain. Terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD), dana miliaran rupiah akan masuk ke kas desa, desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN kurang lebih 1 milyar per tahun. Sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota”. Maka dari itu, sudah kewajiban desa untuk memberikan informasi dan anggaran terkait ADD tersebut.

Informasi dan anggaran bukan lagi sesuatu yang disembunyikan dan dikuasai karena saat ini keterbukaan informasi mendapat suatu tempat yang penting dalam pemerintahan. Namun kenyataan yang ada terutama di Negara Indonesia, masih banyak ditemui desa yang belum menerapkan asas-asas keterbukaan informasi publik. Seperti kegiatan atau program masih bersifat rahasia, apalagi berkaitan dengan anggaran. Adanya permasalahan serta persoalan yang terjadi tersebut maka diperlukan sebuah inovasi atau terobosan baru agar keterbukaan informasi menjadi maksimal.

Saat ini merupakan era globalisasi, dimana hampir seluruh pekerjaan berhubungan dengan dokumen dan *database* yang terkomputerisasi atau barjalan

diatas suatu sistem. Maka dari itu, pemanfaatan suatu teknologi infomasi dan komunikasi diperlukan untuk menunjang keterbukaan informasi desa. Pemanfaatan media informasi untuk mempublikasikan informasi publik dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa. Sistem Informasi Manajemen atau disingkat SIM adalah sebuah sistem dari teknologi informasi yang berfungsi mengelola informasi manajemen Nugroho (2008:16). Sistem informasi merupakan sistem terbuka yang terjadi sesuai dengan arus sumber daya yang ada di lingkungannya. Sistem informasi manajemen tidak hanya digunakan oleh sebuah perusahaan, tetapi instansi publik juga banyak yang menggunakannya dengan menyesuaikan sesuai kondisinya.

Sistem Informasi Desa merupakan salah satu perwujudan sistem informasi di desa yang memiliki fungsi untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang ada ditingkat desa. Sebagai sebuah alat, Sistem Informasi Desa berwujud sebagai sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan data, informasi yang mencakup data desa, informasi kependudukan desa, keuangan desa, dan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh desa. Sistem Informasi Desa atau biasa disingkat dengan SID, terdiri dari dua ranah, yaitu *online* dan *offline*. Ranah *offline*, artinya aplikasi masih dapat digunakan tanpa ada sambungan internet. Namun, aplikasi harus terinstal terlebih dahulu di server yang akan digunakan. Sedangkan diranah *online*, SID secara otomatis berfungsi sebagai *website* desa. Ranah *online* dibagi menjadi dua bagian yaitu, yaitu bagian depan atau *front-end* yang dapat diakses oleh masyarakat maupun bagi siapa saja yang ingin tahu,

kemudian yang kedua adalah bagian dalam atau *back-end* dimana bagian ini hanya dapat dipergunakan oleh operator SID yang memegang passwordnya. Bagian *back end* ini dapat digunakan ketika sistem SID di *download* kedalam komputer yang akan digunakan. Kepala desa dapat membuat surat keputusan kepala desa untuk pengangkatan operator SID ini.

Sistem Informasi Desa muncul dari gagasan bersama oleh berbagai komunitas. Berbagai SID banyak ditawarkan dengan berbagai versi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aplikasi SID bersifat terbuka (*free and open source software*) sehingga siapa saja dapat memperoleh, menggunakan, memodifikasi dan menyebarluaskan secara bebas aplikasi tersebut dengan tujuan nonkomersial. Adanya SID, informasi menjadi terbuka dan lebih transparan karena dapat diakses oleh siapa saja yaitu masyarakat, pihak swasta, pemerintah kabupaten atau kota, serta pemangku kepentingan yang terkait dengan SID. Seperti dalam teori O'Brien yang menyebutkan ada lima komponen yang ada dalam penerapan sebuah sistem informasi yang meliputi: sumber daya manusia, *hardware*, *software*, data, dan jaringan. Komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memberikan dukungan terhadap penerapan SID melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Bentuk dukungan tersebut melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. BPMPD beberapa kali mengadakan pelatihan kepada aparatur pemerintah dengan dibagi beberapa cluster.

Tabel 1. Daftar Penggiat Sistem Informasi Desa Kabupaten Jombang Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Penggunaan SID		
			Selesai	Proses	Awal
1	Peterongan	14	6	6	2
2	Jogoroto	11	2	9	-
3	Diwek	10	2	7	1
4	Gudo	9	3	6	-
5	Ngoro	13	5	8	-
6	Bareng	13	4	9	-
7	Tembelang	15	5	9	1
8	Mojoagung	18	3	13	2
9	Kudu	11	2	9	-
10	Ngusikan	11	3	6	2
11	Mojowarno	9	2	7	-
12	Ploso	13	3	9	1
13	Plandaan	13	2	7	2
14	Wonosalam	9	3	6	-
15	Kesamben	14	3	10	1
16	Sumobito	21	2	17	2
17	Megaluh	13	4	8	1
18	Perak	11	2	7	1
19	Jombang	10	2	6	2
20	Bandar Kedungmulyo	16	3	11	2

Sumber: Data Sekunder (Dokumen BPMPD per Agustus 2016)

Data monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BPMPD, menyebutkan bahwa dari dua ratus lima puluh empat desa yang ada di Kabupaten Jombang, hanya enam puluh satu desa yang sudah benar-benar menerapkannya, seratus tujuh puluh tiga dalam proses, dan dua puluh desa masih pada tahap awal. Desa Pulosari Kecamatan Bareng dan Desa Bakalan Rayung Kecamatan Kudu merupakan desa pendahulu yang menerapkan SID *online* di Kabupaten Jombang.

Desa Pulosari merupakan desa yang terletak kurang lebih 35 kilo meter dari pusat Kabupaten Jombang. Desa Pulosari adalah desa percontohan yang

menerapkan SID *online* di Kabupaten Jombang karena SID masih berjalan dan berkembang sampai saat ini. Keputusan pemerintah Desa Pulosari untuk menerapkan SID merupakan sebuah keputusan yang diambil pemerintah desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Awal penerapan SID memang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dioptimalkan pada surat menyurat dan data kependudukan. Namun, saat ini sudah beranjak pada keterbukaan informasi publik melalui *website* Desa Pulosari. Latar belakang penerapan SID di Desa Pulosari seperti yang diungkapkan Bapak Nurul selaku Sekertaris Desa Pulosari berawal dari pelatihan kapasitas aparatur desa yang dilakukan oleh BPMPD di Gedung KPRI Jombang. Desa Pulosari tertarik untuk menerapkannya, dan belajar ke Yogyakarta untuk menimba ilmu disana.

Penerapan SID di Desa Pulosari diharapkan informasi yang ada di pemerintah desa dapat membuka transparansi desa, bukan hanya berkaitan dengan anggaran namun penerapan SID diharapkan dapat menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa secara kolektif, karena Desa Pulosari menyimpan banyak historis dari Kerajaan Mojopahit yang masih belum diketahui oleh orang banyak karena minimnya penyediaan informasi. Selain itu, dengan adanya SID diharapkan dapat memudahkan desa untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam hubungan saling menguntungkan karena informasi menjadi terbuka sehingga dapat diketahui siapa saja yang mengaksesnya. Penerapan SID di Desa Pulosari dimulai sejak 03 September 2015 dengan mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa. Penerapan SID di Desa Pulosari, bukan hanya dijadikan sebagai

sebuah kewajiban pelaksanaan undang-undang pemerintah melainkan dijadikan sebagai sebuah kebutuhan untuk menerapkannya. Sehingga penerapan SID di Desa Pulosari menjadi berkembang daripada desa lain yang ada di Kabupaten Jombang.

Desa Pulosari mencontoh Desa Dlingo dan Desa Ngladran Yogyakarta yang telah sukses menerapkan SID. Dahulu, Dlingo dan Desa Ngladran merupakan desa terpencil dengan tingkat kesejahteraan yang terhitung masih sangat rendah yang belum dikenal banyak orang, namun dengan keberadaan SID di desa tersebut, menjadikannya dikenal di dunia maya sebagai desa digital. Keindahan alam yang ada di daerah menjadi dikenal oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Tak puas dengan hasil yang dicapai, Dlingo dan Ngladran terus melakukan pembenahan dan belajar untuk mengaplikasikan SID sehingga lebih bermanfaat dan berkembang lagi sehingga keterbukaan informasi publik menjadi lebih nyata. Desa Pulosari mempunyai latar belakang yang hampir sama dengan Desa Dlingo dan Desa Ngladran.

Menurut data pemerintah Desa Pulosari tahun 2016 menyebutkan bahwa 33, 61 persen penduduk Desa Pulosari merupakan lulusan Sekolah Dasar sehingga sulit untuk menerima perubahan teknologi. Tak heran informasi yang disajikan oleh pemerintah Desa Pulosari belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah Desa kesulitan mengubah pola perekonomian tradisional yang selama ini membudaya di masyarakat menjadi pemerintahan digital dengan pemakaian teknologi informasi. Permasalahan lain yang terjadi di lapangan seperti hasil penelitian sebelumnya mengenai penyusunan data profil desa yang dilakukan oleh

Putra dan I Gusti (2013), dengan judul “ Pelaksanaan program data profil desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Dauh Puri Kanging Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar” dan penelitian Sari K (2016) yang berjudul “ Implementasi program pengembangan jaringan sistem informasi data profil desa/kelurahan studi pada BPMPD Desa Kabupaten Pati adalah kualitas sumber daya aparatur perangkat desa yang masih kurang. Hal tersebut belum adanya pelatihan yang secara khusus dalam penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kabupaten. Diharapkan dalam penelitian ini dapat membantu pihak desa dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai SID. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengambil judul **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)”**. Efektivitas dalam hal ini berorientasi pada pencapaian keberhasilan dari Sistem Informasi Desa sebagai upaya peningkatan keterbukaan informasi publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di rumuskan :

1. Bagaimanakah penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?

2. Bagaimanakah efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sejauh mana penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
2. Menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta dapat memperkaya kajian tentang penerapan Sistem Informasi Desa.

2. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian berikutnya mengenai Sistem Informasi Desa.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Informasi Desa bagi instansi pemerintah.
4. Bagi masyarakat, sebagai media informasi tentang efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang yang menjelaskan tentang masalah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian. Rumusan masalah menjelaskan masalah apa yang akan peneliti teliti sesuai dengan judul skripsi, tujuan penelitian berisi tujuan yang ingin dicapai peneliti terhadap penelitian skripsi ini, sedangkan kontribusi peneliti bahwa penelitian ini dipersembahkan atau dapat dimanfaatkan untuk siapa saja dan hal apa pun, serta sistematika penulisan yang memperlihatkan apa saja bagian-bagian dalam penelitian skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang semua landasan teori yang berhubungan dengan konsep administrasi publik, konsep sistem informasi, konsep *e-Government*, konsep keterbukaan informasi publik, konsep efektivitas dan konsep Sistem Informasi Desa. Dasar teori yang terlalu umum, cukup ditulis secara

ringkas. Sebaliknya, dasar teori yang benar-benar menjadi dasar teori dalam penelitian ini dikupas secara mendalam, lengkap dengan referensinya.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, yang mencakup: jenis penelitian, fokus penelitian digunakan untuk memfokuskan apa yang ingin diambil disaat penelitian dilapangan, lokasi dan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian, jenis dan sumber data adalah data yang yang ingin diambil oleh peneliti berasal dari mana, teknik pengumpulan data menjelaskan cara-cara peneliti mendapatkan data penelitian, instrumen penelitian menerangkan alat-alat yang digunakan dalam penelitiannya, analisis data menerangkan tentang bagaimana peneliti mengolah data yang telah didapat selama penelitian, keabsahan data sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh peneliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil pelaksanaan penelitian dengan memasukkan metode penelitian kedalamnya, yang meliputi: uraian tentang gambaran umum lokasi dan situs penelitian serta menjelaskan tentang data-data yang telah diperoleh selama penelitian dilapangan baik data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya menguraikan analisis yang merupakan penganalisaan data yang telah disajikan dan kemudian diinterpretasikan teori dengan kondisi lapangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran alternatif peneliti yang mungkin bisa diambil dan dikembangkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *administration*, dari Belanda *administratie* yang memiliki arti catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan lain sebagainya. Sedangkan secara luas diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, Siagian (2002:2). Sedangkan menurut Suprayogi (2011:2), administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama.

Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti luas memiliki unsur:

- a. Adanya dua orang atau lebih
- b. Adanya tujuan yang hendak dicapai bersama
- c. Adanya pembagian tugas yang dilaksanakan
- d. Adanya peralatan untuk melaksanakan tugas tersebut

Publik berasal dari Bahasa Inggris "*public*" yang berarti umum, masyarakat atau negara. Publik dari Bahasa Indonesia sendiri berasal dari kata praja yang artinya rakyat sehingga muncul pamong praja yang memiliki arti bahwa sebagai pelayan masyarakat.

Administrasi publik menurut Felix A.Nigro dan Lloid G. Nigro dalam Syafie (1999:25-26) mendefinisikan administrasi publik sebagai:

- a. Administrasi publik adalah kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
- b. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.
- c. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
- d. Administrasi publik sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Administrasi publik dalam hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Sedangkan Chander dan Plano dalam Keban (2004:3) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan publik. Administrasi publik dapat disimpulkan sebagai kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

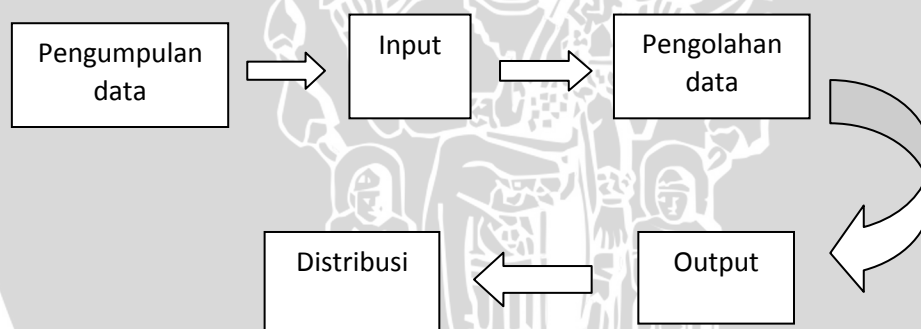
B. Konsep Sistem Informasi Manajemen

1. Pengertian Sistem Informasi

Sistem menurut Susanto (2013:22) diartikan sebagai kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen baik dari segi fisik maupun non fisik yang saling terhubung satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Tantra (2012:1) mengartikan sistem sebagai entitas atau satuan yang terdiri dari beberapa komponen atau subsistem yang saling terhubung dan terkait untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa,

sistem adalah bagian subsistem yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain yang saling terintegrasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, jika salah satu sistem tidak berfungsi maka akan mempengaruhi sistem lain. Informasi berasal dari sebuah data yang menggambarkan kenyataan sebenarnya dari kejadian-kejadian tertentu. Nugroho (2008:15) mendefinisikan informasi sebagai suatu pengetahuan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi didapatkan melalui hasil pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan cara tertentu kemudian disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami serta diterima oleh seseorang.

Adapun tahap-tahap pengolahan data menjadi suatu informasi:



Gambar 1. Siklus Informasi

(Sumber: Oetomo 2002:13)

1. Tahap pengumpulan data

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data yang asli menggunakan cara tertentu, seperti pengambilan sampling, data transaksi, data *warehouse*, dan lain-lain dengan mencatat suatu data kedalam sebuah *file*.

2. Input

Pada tahap ini, data diproses dengan prosedur tertentu kedalam komputer dalam suatu bahasa pemrograman yang disebut sebagai program.

3. Tahap pengolahan data

Data dikelola sesuai prosedur yang dimasukkan. Tahap pengolahan data ini meliputi: pengumpulan data, klasifikasi, kalkulasi, pengurutan, penggabungan, peringkasan dalam bentuk grafik atau tabel, penyimpanan dan pembacaan data.

4. Output

Data yang sudah dikelola tersebut dicetak dengan alat output seperti monitor atau printer sebagai suatu informasi.

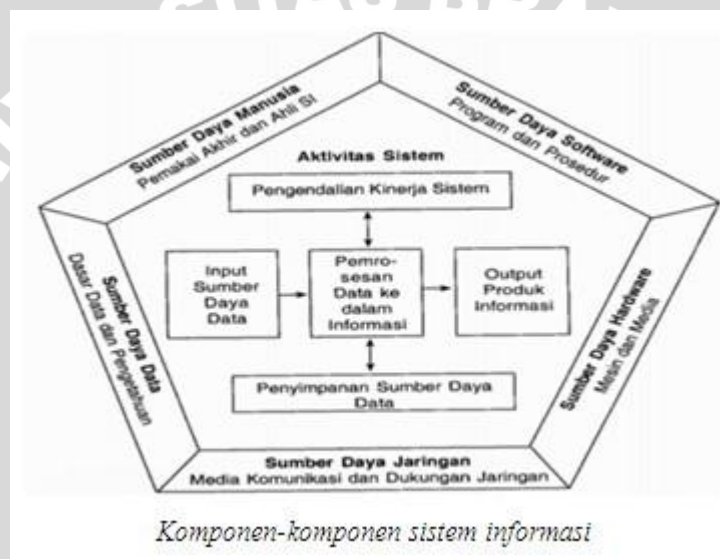
5. Distribusi

Proses pendistribusian informasi tidak boleh terlambat karena jika terlambat informasi tersebut tidak akan relevan lagi.

Sistem informasi memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Penggunaan sistem informasi yang baik, secara signifikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam melakukan proses operasional maupun pengolahan informasi. Sistem informasi dirancang sesuai dengan derajat kebutuhan penggunaan. Sistem informasi didefinisikan sebagai:

“kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Sistem Informasi dengan kata lain menurut Oetomo merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi serta sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan melakukan kontrol.” (Oetomo, 2002:10).

Sistem informasi menurut O'Brien (2005:5) merupakan suatu kombinasi teratur yang terorganisasi dari sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan sumber data dalam proses pengumpulan, pengubahan, serta penyebaran informasi kedalam suatu organisasi. Model sistem informasi O'Brien (2005:35-39) menyimpulkan ada lima komponen dalam aktivitas sistem informasi.



Gambar 2: Komponen-Komponen Sistem Informasi

Sumber: O'Brien (2005:34)

Keterangan:

1. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan komponen yang penting dalam sistem informasi. Sumber daya manusia dalam komponen ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai pemakai akhir yaitu orang yang menerima dan menggunakan informasi yang dihasilkan dari proses sistem informasi dan

yang kedua adalah pakar sistem informasi sebagai pengembang dan pengoperasi sistem informasi. Analisis sistem mendesain sistem informasi sesuai dengan kebutuhan informasi pemakai akhir.

2. Sumber daya *hardware*

Merupakan seluruh peralatan dan bahan fisik yang digunakan untuk pemrosesan informasi. Sumber daya *hardware* meliputi seluruh komponen perangkat keras dalam sistem informasi. Seperti: sistem komputer dan perangkat komputer yaitu *keyboard*, *mouse*, *printer*, *disk* untuk penyimpanan.

3. Sumber daya *software*

Sumber daya *software* ini meliputi keseluruhan perangkat lunak yang merupakan rangkaian perintah dalam proses sistem informasi. *Software* terdiri dari: *software* sistem, *software* aplikasi dan prosedur

4. Sumber daya data

Sumber daya data tidak hanya sekedar bahan baku dalam memasukkan informasi pada sebuah sistem tetapi lebih pada dasar dalam pembentukan sumber daya organisasi. Data dikelola secara efektif sehingga dapat dijadikan sebagai sumber daya data. Data dapat berupa data alfanumerik tradisional, data teks maupun data gambar. Sumber daya sistem informasi diatur, disimpan serta diakses oleh berbagai teknologi pengelolaan sumber daya data kedalam suatu *database*.

5. Sumber daya jaringan

Sumber daya jaringan disini menghubungkan antara *hardware* dan *software*. Sumber daya jaringan meliputi:

- a. Media komunikasi, contohnya yaitu kabel tembaga, kabel optikal fiber, serta teknologi gelombang mikro, selular dan satelit nirkabel.
- b. Dukungan jaringan, contohnya pemroses komunikasi seperti modem, dan prosesor antar jaringan, *software* pengendali seperti *software* sistem operasi jaringan dan penjelajah internet.

Agar pemanfaatan suatu teknologi informasi berhasil dengan baik, maka teknologi tersebut bukan hanya diatur oleh bagian TI saja, melainkan harus dikelola bersama secara professional.

2. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Nugroho (2008:16) mendefinisikan Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat SIM adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. Sedangkan menurut Kumorotomo dan Agus (1998:13), sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang disediakan pengelola organisasi dalam mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan tugas yang dilaksanakan organisasi. Menurut M. Scott (1968:100), sifat sistem informasi manajemen meliputi:

- a) Bersifat menyeluruh
- b) Terkoordinasi
- c) Memiliki subsistem informasi
- d) Terintegrasi secara rasional
- e) Mentransformasikan data kedalam informasi dengan berbagai cara

- f) Meningkatkan produktivitas
- g) Sesuai dengan sifat dan gaya manajer
- h) Menggunakan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

3. Penerapan Sistem Informasi dalam Proses Manajemen

Secara umum, ada tiga peranan sistem informasi dalam proses manajemen yaitu:

- a. Menyediakan informasi untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen
- b. Tugas sistem informasi adalah menyediakan informasi yang bersifat internal. Agar informasi yang dihasilkan sistem informasi lebih mengenai dan berguna bagi manajemen kebutuhan informasi bagi setiap tingkatan manajemen
- c. Sistem Informasi Manajemen dalam perspektif juga menyediakan informasi bagi orang-orang selain manajer, seperti sistem informasi antar organisasi, masyarakat umum, pemerintah, dan sebagainya.

C. Konsep E-Government

1. Pengertian E-Government

Menurut Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada proses pemerintahan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah elektronik atau *e-Government* berasal dari Bahasa Inggris *electronic government* atau biasa disebut

sebagai *e-Gov*, *digital government*, *online government*, dan pada konteks tertentu disebut sebagai *transformational government*. Menurut The World Bank Group mendefinisikan “*e-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi seperti (*Wide Area Network*, *Internet*, dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan untuk membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan dinas lain dalam pemerintahan”. Secara umum pengertian *e-Government* dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi berbasis internet oleh pemerintah dalam memberikan informasi dan layanan kepada *stakeholder*. *Stakeholder* disini meliputi: pemerintah itu sendiri (lembaga yang terkait dengan perangkat manajemen serta aparatur), masyarakat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain yang terlibat didalamnya.

Terdapat empat tingkatan dalam konsep *e-Government*. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui *website*. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui *e-mail*. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang memakai *database* bersama.

2. Manfaat dan Tujuan E-government

Pemanfaatan *e-Government* dalam pemerintahan memiliki tujuan agar tidak ada intervensi pegawai instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengurangi sistem antrian yang panjang hanya

untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu, *e-Government* juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya *good governance*. Partisipasi publik menjadi meningkat dan masyarakat menjadi semakin aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah.

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapan *e-Government* secara berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a) Dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah pada *stakeholder* melalui informasi yang disediakan selama dua puluh empat jam dalam sehari.
- b) Meningkatkan hubungan pemerintah pada masyarakat karena masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya sehingga dapat menciptakan transparansi, akuntabilitas, kontrol publik sehingga tercipta *good governance*.
- c) Pemberdayaan masyarakat karena masyarakat menjadi lebih aktif dalam pemerintahan seperti dalam proses pengambilan keputusan.
- d) Meningkatkan efisiensi dengan menghemat waktu, biaya bagi masyarakat. Masyarakat tak perlu menunggu lama lagi untuk mendapatkan sebuah pelayanan.
- e) Memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak lain yang berkepentingan.
- f) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Tipe pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat melalui *e-Government* beraneka ragam. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-*

Governement menjabarkan penerapan atau pelaksanaan *e-Government* bertujuan untuk:

- Membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang lebih berkualitas, dapat memuaskan masyarakat secara luas, dan dapat menjangkau seluruh wilayah setiap saat tanpa ada batasan waktu.
- Membentuk hubungan interaksi dengan dunia usaha atau industri dalam rangka menambah penghasilan baru pada bidang perekonomian
- Membentuk suatu mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga lain sehingga memungkinkan untuk membuka diskusi publik dengan masyarakat
- Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lebih transparan dan efisien.

3. Tipe Relasi E-Government

Konsep *e-Government* sendiri dirancang untuk menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (*G2C-government to citizens*), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B-government to business enterprises*) dan hubungan antar pemerintah (*G2G-inter-agency relationship*).



Gambar 3. Empat Tipe Relasi E-Government

Sumber: GSA Federal Technology Service (dalam Indrajit 2002:40)

Berikut penjelasannya:

a. *Government to citizens (G2C)*

Merupakan aplikasi pengembangan *e-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

b. *Government to Business (G2B)*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. *Entity* bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan aktivitas sehari-harinya,. Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan pihak swasta.

c. *Government to Government (G2G)*

Meningkatnya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar *entity* negara seperti pemerintah daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan pembangunan. Berbagai penerapan yang telah berlangsung seperti hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan situs *website* baik ditingkat kementerian sampai pada pemerintah daerah.

d. *Government to Employees (G2E)*

Diperuntukkan bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan masyarakat seperti sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya, Indrajit (2002:22-26).

4. Pengembangan E-Government

Pengembangan konsep *e-Government* merupakan pengembangan yang dilakukan pemerintah dengan basis elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar menjadi efektif dan efisien. Ada empat tingkatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan *e-Government* berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan pemerintah melalui jaringan informasi, yaitu:

- a. Tingkat satu (Persiapan)
 - Pembuatan sistem *website* sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga
 - Proses sosialisasi pada internal dan pada masyarakat secara umum
- b. Tingkat dua (Pematangan)
 - Pembuatan situs *website* informasi publik yang bersifat interaktif
 - Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain
- c. Tingkat Tiga (Pemantapan)
 - Pembuatan sistus transaksi pelayanan publik
 - Pembuatan inter operabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain
- d. Tingkat empat (Pemanfaatan)
 - Pembuatan aplikasi dengan tujuan *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Consumers (G3C)*.

5. Elemen Sukses Pengembangan E-Government

Hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of *Government* dalam Indrajit (2002:14), menyebutkan ada tiga elemen pendukung dalam kesuksesan *e-Government*. Tiga elemen tersebut adalah:

a. *Support*

Berkaitan dengan keinginan yang kuat yang dimiliki oleh aparatur pemerintah untuk mengembangkan konsep *e-Government*. *E-Government* diimplementasikan bukan hanya sekedar untuk mengikuti zaman, melainkan dijadikan sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Budaya birokrasi yang cenderung bekerja berdasarkan pada model manajemen “*top down*”, dukungan dari atasan yang dimulai dari pimpinan pemerintah tertinggi sampai level bawah sangat diperlukan. Dukungan tersebut dalam bentuk hal-hal seperti:

- 1) Kesepakatan penerapan *e-Government* guna mewujudkan visi dan misi bangsa.
- 2) Pengalokasian sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain lain) pada setiap tataran pemerintahan lintas sektor, sehingga dapat saling terhubung satu sama lain.
- 3) Pembangunan infrastruktur dan superstruktur sebagai faktor pendukung dalam pengembangan konsep *e-Government* (seperti adanya peraturan yang jelas mengenai lembaga khusus yang bertanggungjawab, adanya susunan tentang aturan main, baik dalam melakukan kerja sama dengan swasta atau keperluan lain).

- 4) Disosialisasikannya konsep *e-Government* pada *stakeholder* yang terlibat didalamnya secara berkesinambungan, konsisten, dan menyeluruh melalui sosialisasi, penyuluhan, dan lain sebagainya.

b. *Capacity*

Berkaitan dengan kemampuan atau keberdayaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menerapkan konsep *e-Government*. Ada tiga hal dasar yang minimum dimiliki oleh pemerintah, yaitu:

- 1) Sumber daya yang memadai dalam penerapan berbagai inisiatif *e-Government*, yang paling utama terkait dengan sumber daya finansial atau berkaitan dengan anggaran.
- 2) Infrastruktur teknologi yang mendukung berjalannya konsep *e-Government*. Lima puluh persen pengukuran keberhasilan penerapan atau *e-Government* ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur.
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemahiran dibidangnya.

Usaha yang dapat dilakukan pemerintah agar segera menetapkan konsep *e-Government* dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta, merekrut sumber daya manusia terbaik yang kompeten dalam bidangnya, bermitra dengan pemerintah daerah lainnya, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimilikinya, dan lain lain.

c. *Value* atau nilai.

Elemen pertama dan kedua dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak yang memberikan jasa (*supply side*). Nilai ini diciptakan oleh *stakeholder* atau *demand*

side seperti masyarakat, pihak swasta, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan *e-Government*. Pemerintah harus jeli terhadap jenis aplikasi *e-Government* yang akan digunakan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat sehingga tidak menjadi sia-sia dalam penerapan atau pelaksanaannya. *Stakeholder* disini yang menentukan besaran manfaat yang didapat pada penerapan atau pelaksanaan konsep *e-Government* tersebut. Perpaduan ketiga elemen tersebut membentuk sebuah pusat syaraf jaringan *e-Government* yang merupakan kunci pokok penjamin keberhasilan penerapan.

D. Konsep Keterbukaan Informasi Publik

1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan dari keterbukaan informasi publik di sebuah negara adalah untuk mencapai akuntabilitas serta kredibilitas dalam memberikan informasi serta dokumen sesuai dengan permintaan publik. Keterbukaan informasi merupakan perwujudan dari konsep tata pemerintahan yang baik atau biasa disebut sebagai *good governance*. Asas keterbukaan publik tercantum pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disusun dalam pasal 2 yaitu:

- a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah pertimbangan dengan seksama

bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

2. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dibuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak publik dalam penyediaan informasi publik. Bagian ke empat pada UU KIP, pasal 9 sampai pasal 11 menjelaskan tentang ketentuan informasi yang harus disampaikan oleh setiap badan publik di Indonesia.

Ketentuan tersebut mencakup:

- a. Informasi yang wajib disediakan secara berkala atau regular yang termuat dalam pasal sembilan:
 - 1) Informasi terkait dengan badan publik
 - 2) Informasi terkait dengan kegiatan dan kinerja yang dilakukan oleh badan publik yang terkait
 - 3) Informasi terkait laporan keuangan dan
 - 4) Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan
- b. Informasi wajib yang diumumkan secara serta merta yang termuat dalam pasal sepuluh.
- c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat yang termuat dalam pasal sebelas.

3. Transparansi

Lalolo (2003:13) mendeskripsikan transparansi sebagai sebuah prinsip yang menjamin keterbukaan informasi publik sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh setiap orang, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang

meliputi: kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang telah dicapai. Menurut Mardiasno dalam Kristianten (2006:45) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik pada masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Tujuan transparansi dalam pemerintahan desa itu sendiri ada tiga, yaitu:

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada publik
- b. Sebagai upaya meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Sebagai upaya meningkatkan manajemen dalam tata kelola serta penyelenggaraan *good governance* dan mengurangi korupsi, kolusi, nepotisme.

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menyebutkan setidaknya ada enam prinsip transparansi, yaitu:

- a. Tersedianya informasi yang mudah dipahami serta mudah diakses oleh publik yang meliputi: anggaran, tata pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b. Adanya publikasi dan media yang mendukung dalam proses kegiatan dan detail anggaran
- c. Tersedianya laporan secara berkala yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya yang dapat diakses oleh publik
- d. Adanya laporan tahunan
- e. Adanya *website* atau media publikasi lain yang dapat diakses publik
- f. Pedoman dalam menyebarkan informasi publik

Sedangkan Didjaja (2003:261) menyebutkan prinsip transparansi meliputi lima hal, yaitu:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya,
- b. Keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen yang perlu diketahui publik,
- c. Keterbukaan prosedur atau tata cara dalam proses pengambilan keputusan, atau penyusunan rencana kerja.
- d. Keterbukaan register tentang fakta hukum seperti pencatatan sipil, dan lain sebagainya
- e. Keterbukaan menerima peran keikutsertaan masyarakat

E. Konsep Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Efektivitas berasal dari kata bahasa *effective* yang artinya sesuatu yang dilakukan dengan baik dan benar. Sedangkan menurut kamus ilmiah yang populer mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ketepatan penggunaan, hasil guna, atau penunjang tujuan. Para aktor mendefinisikan efektivitas berbeda tergantung pendekatan yang dilakukan. Menurut Gibson dkk (1994:31) memberikan dua pengertian pengertian efektivitas dengan pendekatan sistem yaitu yang pertama sebagai seluruh siklus input-proses-output dan yang kedua merupakan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Steers (1985:46) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah sejauh mana

organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua tujuannya. Penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian yang umum mengenai efektivitas organisasi. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil yang diperoleh mendekati sasaran, maka derajat efektivitasnya semakin tinggi, Sudirman (2002:31). Secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas merupakan ketepatan sasaran tujuan yang dicapai dalam suatu proses kegiatan yang direncanakan.

2. Pendekatan efektivitas

Pendekatan dalam efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu aktivitas tersebut efektif. Pendekatan efektivitas secara umum terdiri dari tiga hal, yaitu:

a. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan organisasi mencapai sasaran yang telah direncanakan. Sasaran dalam pendekatan ini berdasarkan pada “*Official Goal*” dengan mengamati permasalahan yang ditimbulkan serta memusatkan perhatian terhadap tingkat output yang ditetapkan.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber digunakan untuk mengukur efektivitas berdasarkan keberhasilan yang dicapai suatu organisasi dalam mencapai berbagai sumber yang dibutuhkan. Pendekatan ini berpedoman pada keterbukaan sistem suatu

organisasi dengan lingkungannya. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan yang erat dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap bahwa suatu yang efektif jika proses internal berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun dengan masing-masing bagian terkoordinir dengan baik dan benar.

3. Indikator efektivitas

Duncan dalam Steers (1985:53) menyebutkan bahwa efektivitas dapat diukur dengan tiga indikator. Ketiga indikator tersebut adalah:

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian dalam hal ini merupakan pencapaian tujuan akhir dari serangkaian proses yang dijalankan. Pencapaian tujuan ini terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu pencapaian yang ditentukan, sasaran yang merupakan target kongkrit dari tujuan yang ditetapkan, dasar hukum.

b. Integrasi

Integrasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus, dan komunikasi dengan pihak lain. Integrasi ini meliputi beberapa faktor, yaitu: prosedur, dan proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menseragamkan suatu individu atau kelompok terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi antara lain: peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Menurut Cambel (1989:121) efektivitas secara umum dan yang menonjol meliputi:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat *output* dan *input*
- e. Pencapaian tujuan

Sedangkan menurut Gibson dalam Kurniawan (2005:107) mengukur efektivitas dari tujuh hal yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantab
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Indikator efektivitas yang digunakan oleh peneliti yaitu dari Steers. Hal ini dikarenakan peneliti menyesuaikan topik atau permasalahan yang diambil yaitu berkaitan dengan efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Steers (1985:9) menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu:

- a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi yaitu berkaitan dengan struktur dan teknologi organisasi. Struktur adalah hubungan yang relatif tetap yang sering dijumpai dalam organisasi, yang berhubungan dengan susunan sumber daya manusia. Teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi sebuah keluaran yang bermanfaat.

b. Karakteristik Lingkungan

Terdiri dari dua, yaitu lingkungan ekstern dan intern dimana lingkungan ekstern dipengaruhi oleh derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan, derajat kepastian lingkungan. Sedangkan lingkungan intern dipengaruhi oleh iklim organisasi.

c. Karakteristik pekerja

Berkaitan dengan keterikatan terhadap organisasi, jangkauan identifikasi para pekerja serta prestasi kerja individual.

d. Kebijakan dan praktek manajemen

Variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan pencapaian tujuan. Kepemimpinan di Indonesia yang cenderung *top down* bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk bawahan. Dari faktor kebijakan dan praktek manajemen ini, sedikitnya diidentifikasi menjadi enam variabel, yang mempengaruhi efektivitas yaitu: penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, inovasi dan adaptasi.

F. Konsep Sistem Informasi Desa (SID)

1. Pengertian SID

Sistem Informasi Desa yang biasa disingkat dengan SID adalah sistem olah data dan informasi yang dapat dikelola oleh pemerintah dan komunitas desa dalam dua ranah: yaitu *offline* dan *online*. SID *online* akan otomatis berfungsi sebagai *website* desa. *Website* desa ini memiliki fungsi yang terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian depan (*front-end*) yang bisa diakses oleh publik dan bagian dalam (*back-end*) yang hanya bisa diakses oleh administrator sistem. Konsep Sistem Informasi Desa di gagas oleh Lumbung Komunitas yang dikelola *Combine Resource Institution*. Aplikasi SID menghimpun data seluruh penduduk sehingga dapat digunakan sebagai dasar membuat surat administrasi kependudukan. Surat administrasi kependudukan dikelola dan dikembangkan pemerintah desa setempat sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

2. Tujuan dan Fungsi SID

Website SID dibangun dengan tujuan sebagai media informasi resmi tentang desa, yang dibangun dan dikelola oleh tim desa setempat. Adapun fungsi penyelenggaraan SID di desa, ada tiga yaitu: meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengolahan data dan informasi yang terhimpun didalam sistem SID, membantu untuk melakukan pelayanan publik, perencanaan pembangunan dan pemetaan situasi untuk pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Ketiga fungsi tersebut dilakukan untuk menjangkau *stakeholder* secara luas. Fungsi SID *online* ini berupa *website* desa yang dikelola aparatur desa. SID digunakan untuk mendukung peran dalam berbagai kegiatan seperti:

- a. Pelaksanaan pelayanan dalam hal pengolahan data dan dokumen terutama pada surat menyurat
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat seperti formulir *online* di *website* desa, SMS *gateway*, media komunitas
- c. Sebagai media pengelolaan keterbukaan informasi publik yang merupakan *website* desa yang terhubung dengan komunitas setempat
- d. Pengawasan internal
- e. Penyuluhan kepada masyarakat

Informasi yang disediakan dalam *website* SID meliputi tiga hal yaitu:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
 - 1) Informasi mengenai informasi desa.
 - 2) Informasi yang berhubungan dengan kegiatan atau program serta kinerja aparatur desa.
 - 3) Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan desa.
 - 4) Informasi diluar ketiga tersebut diatas yang diatur dalam undang-undang.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - 1) Informasi yang berkaitan dengan khalayak umum atau menyangkut hajat hidup orang banyak,
 - 2) Informasi wajib disampaikan dengan cara yang mudah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat desa.
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat:

- 1) Seluruh daftar informasi publik yang berada dibawah penguasaan pemerintah daerah.
- 2) Hasil keputusan pemerintah desa beserta pertimbangan-pertimbangannya.
- 3) Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya.
- 4) Rencana kerja termasuk laporan keuangan beserta pengeluaran dan pendapatan.
- 5) Perjanjian pemerintah desa dengan pihak ketiga.
- 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat desa berkaitan dengan pelayanan publik.
- 7) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Domain SID

Identitas dan aktivasi *website* desa, desa dapat memilih alamat *website* sebagai berikut:

- a. <http://namadesa-namakabupaten.info>.
- b. <http://namadesa-namakecamatan.namakabupatenkab.go.id>
- c. <http://namadesa-namakabupaten.desa.id>.
- d. <http://namadesa-namakabupaten.web.id>

Pada saat ini, komunitas *Combine Resource Institution* (CRI) sebagai lembaga pemberi layanan pengembangan dan penerapan SID dalam pengelolaan *website* desa, menggunakan domain <http://namadesa-namakabupaten.info> atau

<http://namadesa-namakabupaten.sid.web.id>. CRI menyediakan layanan *hosting* gratis untuk lokasi *server website* desa. Biaya aktivasi dibiayai oleh pengambil program atau dapat dibiayai oleh pemerintah desa itu sendiri. Biaya aktivasi “*domain.info*” hanya seratur ribu sampai seratus sepuluh ribu per tahunnya. Pembayaran biaya tersebut dapat dilakukan melalui CRI secara langsung maupun kepada perusahaan penyedia jasa layanan internet yang ditunjuk oleh CRI. Identitas *website* dengan lokasi server di CRI dan *domain .info* ini bersifat sementara, hingga *website* desa tersebut kemudian dapat dialihkan ke layanan internet yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Proses pengalihan ini akan difasilitasi oleh CRI, menyesuaikan dengan kesiapan pemerintah kabupaten atau kota setempat dalam penyediaan *server* dan nama domain untuk *website* desa. Sedangkan domain lain yang dapat digunakan sebagai *website* desa adalah “*.desa.id*”. Domain *.desa.id* ini merupakan domain resmi *website* desa yang dapat digunakan sebagai *website* desa yang disediakan oleh PANDI (<http://pandi.or.id>) sebagai penyedia nama domain resmi Indonesia.

4. Dasar Hukum Penerapan SID

Penerapan Sistem Informasi Desa tentunya tak lepas dari dasar hukum yang digunakan untuk memayunginya. Dasar Hukum SID tersebut mengacu pada:

- a. UU Nomor 6 pasal 86 Tahun 2014 yang isinya tentang hak desa untuk mendapatkan akses Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan serta sumber daya manusia.

- b. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- c. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- e. Surat edaran Bupati Jombang tanggal 2 Mei 2016 Nomor: 140/ 1678/ 415. 40/ 2016 hal pemanfaatan Sistem Informasi Desa.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- h. Keputusan Kepala Desa Pulosari Nomor: 140/ 14/ 415. 72. 10/ V/ 2016 tentang pengangkatan operator Sistem Informasi Desa dan profil desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan menggunakan suatu metode tertentu untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan sehingga menghasilkan data yang valid. Memilih metode pelaksanaan penelitian harus tepat sesuai dengan cara pandang permasalahan sebelum melakukan penelitian karena metode penelitian berhubungan dengan prosedur, alat, desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi. Pendekatan kualitatif menurut Meloeng dalam Herdiansyah (2011:9) adalah pendekatan yang memiliki maksud dan tujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Herdiansyah sendiri pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Jenis penelitian deskriptif digunakan karena hasil penelitian yang dihasilkan mendeskripsikan sebuah analisis tentang efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena cara

mendapatkan datanya lebih pada interaksi komunikatif, dan tidak menganalisis data yang berupa angka dengan rumus statistik atau sebuah perhitungan tertentu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian. Fokus penelitian pada pendekatan kualitatif bersifat tentatif dimana peneliti dapat menyempurnakan fokus atau masalah saat peneliti sudah terjun kelapangan secara langsung. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Sumber daya *hardware*
 - c. Sumber daya *software*
 - d. Sumber daya data
 - e. Sumber daya jaringan
2. Efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
 - a. Pencapaian tujuan
 - b. Integrasi
 - c. Adaptasi
3. Faktor Pendukung dan penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Desa:
 - a. Faktor pendukung internal dan eksternal

- 1) Komitmen pimpinan kepala Desa Pulosari
- 2) Dukungan dari dinas terkait
- 3) Sumber daya jaringan
- b. Faktor penghambat internal dan eksternal
 - 1) Kurangnya sosialisasi
 - 2) Kualitas sumber daya pemakai
 - 3) Kurangnya koordinasi dan kerjasama pendamping Desa Pulosari
 - 4) Kurangnya sumber daya *hardware*

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Situs penelitian merupakan objek yang akan dilakukan suatu penelitian. Lokasi penelitian yang diambil peneliti yaitu Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Sedangkan situs penelitiannya adalah Kantor Pemerintah Desa Pulosari, Jalan Anjasmoro nomor 313 Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Desa Pulosari merupakan salah satu desa di Jombang yang menerapkan terlebih dahulu Sistem Informai Desa *online*. Desa Pulosari merupakan desa dengan 33,61 pesen masyarakat lulusan Sekolah Dasar.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah suatu yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang diolah dan dianalisis menggunakan suatu metode tertentu yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan suatu

hal Herdiansyah (2011:116). Bentuk data pada pendekatan kualitatif berbentuk kalimat atau narasi dari subjek yang diteliti melalui suatu teknik pengumpulan data kemudian dianalisis dan diolah berdasarkan teknik pengumpulan data kualitatif. Sumber data adalah subjek dari mana suatu data tersebut dapat diperoleh dari seorang informan. Menurut Sarwono (2006:123) sumber data dalam penelitian merupakan suatu tahapan yang penting dalam proses penelitian, karena pemilihan data yang tepat peneliti dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: dokumen, informan dan peristiwa. Sedangkan sumber data yang digunakan, ada dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) merupakan perolehan data yang digunakan secara langsung dari sumbernya yang kemudian diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan Ruslan (2006:138). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan observasi serta wawancara secara mendalam (*indepth interview*) terhadap *key person* yaitu pada

- a. Bapak Widji selaku Kepala Operator SID Desa Pulosari,
- b. Bapak Rokim selaku Kepala Desa Pulosari
- c. Masyarakat Desa Pulosari sebagai pengguna Sistem Informasi Desa
- d. Hasil observasi peneliti terhadap kejadian atau peristiwa pada Kantor Pemerintah Desa Pulosari.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dihasilkan dari pihak lain atau yang digunakan oleh lembaga lain yang bukan bidang pengolahannya, tetapi data tersebut dapat dipergunakan dalam suatu penelitian tertentu Ruslan (2006: 138).

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen resmi mengenai Sistem Informasi Desa, profil Pemerintah Desa Pulosari, data mengenai faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Pulosari serta sumber lain seperti: internet yang berkaitan dengan konsep administrasi publik, sistem informasi manajemen, *e-Government*, keterbukaan informasi publik, efektivitas, dan Sistem Informasi Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengamatan (observasi)

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan atau mengikuti. Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada lokasi yang akan diteliti terhadap perilaku atau aktivitas individu-individu, kelompok dengan turun langsung. Peneliti mengamati perilaku subjek penelitian dengan menggunakan panca indera untuk menangkap kejadian, peristiwa, tindakan dan keadaan lingkungan penelitian kemudian mencatatnya. Inti dari observasi disini yaitu pengamatan terhadap perilaku yang tampak serta adanya tujuan yang jelas karena pengamatan yang dilakukan tanpa

adanya tujuan tertentu bukan merupakan sebuah observasi. Perilaku yang tampak diartikan sebagai perilaku yang dapat dilihat serta dirasakan keberadaannya secara langsung melalui panca indera. Peneliti melakukan observasi selama kurang 2 bulan.

2. Interview (wawancara)

Menurut Moloeng dalam Herdiansyah (2011:118) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan pewawancara. Wawancara dapat dilakukan secara langsung melalui *face to face* dengan partisipan, atau dengan telepon serta fokus *group interview*. Ada tiga bentuk wawancara menurut Herdiansyah (2011: 121) yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan oleh peneliti bersifat terbuka namun tidak keluar dari tema yang ditetapkan, kecepatan wawancara masih dapat diprediksi, pertanyaan yang diajukan peneliti fleksibel yang artinya menyesuaikan kondisi pada saat penelitian namun masih tetap terkontrol, berpedoman pada buku panduan wawancara dan yang terakhir tujuan melakukan wawancara tersebut untuk mengetahui suatu fenomena tertentu.

Pendekatan kualitatif, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang utama karena banyak data yang dihasilkan dari wawancara. Teknik wawancara perlu dicermati agar yang diwawancarai merasa tetap nyaman tanpa adanya tekanan.

Ada empat belas informan yang diwawancarai peneliti untuk mengalisis ke objektifan penelitian. Berikut daftar nama informan tersebut:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

Nomor	List Interviewee
1	Bapak Widji (Operator SID)
2	Bapak Rokim (Kepala Desa Pulosari)
3	Bapak Supar (Staf Pembangunan)
4	Bapak Nurul (Sekertaris Desa Pulosari)
5	Saudari Veni (Masyarakat Desa Pulosari)
6	Saudara Sudiono (Masyarakat Desa Pulosari)
7	Saudara Tikno (Masyarakat Desa Pulosari)
8	Saudara Elnatan (Masyarakat Desa Pulosari)
9	Saudara Andi (Masyarakat Desa Pulosari)
10	Saudara Ulum (Masyarakat Desa Pulosari)
11	Saudara Iqbal (Masyarakat Desa Pulosari)
12	Bapak Widodo (Anggota CRI Sidoarjo)
13	Bapak Munir (Pendamping Desa Pulosari)
14	Saudari Putri (Masyarakat Desa Pulosari)

Sumber: Data Primer diolah Peneliti 2016

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara melihat serta menganalisis dokumen yang dibuat sendiri oleh subjek atau orang lain yang berkaitan dengan subjek. Moloeng dalam Herdiansyah (2011: 143) membagi dokumen menjadi dua bentuk yaitu:

a. Dokumen pribadi

Dokumen pribadi merupakan catatan atau rangkaian karangan tulisan seseorang berkaitan dengan tindakan, perilaku, pengalaman, dan lain sebagainya. Peneliti melihat dokumen pribadi dari penelitian yang meliputi catatan harian, autobiografi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Desa sebagai pendukung.

b. Dokumen resmi

Dibagi menjadi dua kategori yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Peneliti menggunakan Surat Edaran Bupati dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 sebagai acuan dokumen resmi eksternal, Keputusan Desa Pulosari sebagai dokumen internal serta dokumen lain sebagai pendukung.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti harus devalidasi dalam melakukan penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti itu sendiri

Sebagai *human instrumen* dengan menggunakan panca indra untuk menangkap fenomena atau kejadian dalam proses penelitian.

2. Menggunakan pedoman wawancara atau biasa disebut sebagai *interview guide* sebagai kerangka dasar melakukan penelitian agar tetap terarah.
3. Peralatan pendukung lain seperti menggunakan materi audio dan visual. Data ini berupa perekaman *videotape*, foto, video, dan lain sebagainya yang termasuk segala jenis suara atau bunyi yang bersangkutan dengan penelitian. Peneliti menggunakan Hand Phone untuk merekam video, audio serta mengambil foto untuk dokumentasi serta catatan lapangan atau biasa disebut *field note* untuk mencatat kejadian atau fenomena dalam penelitian.

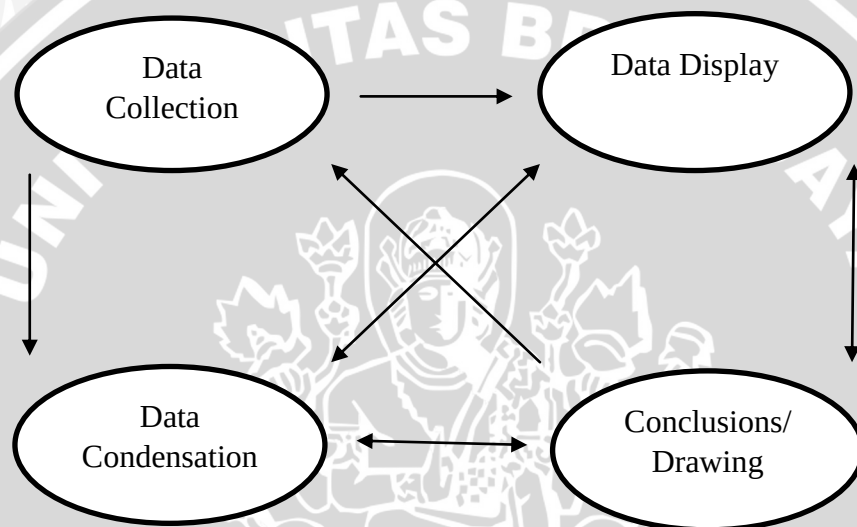
G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang berkelanjutan dimana refleksi data dibutuhkan untuk menganalisis data, menyodorkan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan membuat catatan singkat pada proses penelitian. Teknik analisis data beranekaragam sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Analisis data, data yang bersifat terbuka dikumpulkan, berdasar pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari partisipan.

Tujuan analisis data yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak menggunakan angka-angka seperti pada pendekatan kuantitatif. Prinsip pokok

teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan Miles, Huberman dan Saldana (2014:14).



Gambar 4. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14)

Keterangan:

a. Tahap Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, serta mentransformasikan data yang diperoleh dari catatan di lapangan, transkrip wawancara, dan materi lain yang empiris.

Ada 14 responden yang diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian.

Hasil wawancara tersebut kemudian disederhanakan dan ditransformasi kedalam penyajian data yaitu penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik serta efektivitas penerapannya dan faktor pendukung, penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Desa.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah mengorganisasikan, serta menyatukan informasi-informasi yang memungkinkan untuk ditarik kedalam suatu kesimpulan. Penyajian data dilakukan agar peneliti mudah untuk memahami dan melihat yang terjadi yang kemudian dianalisis berdasarkan apa yang dipahami oleh peneliti. Penelitian ini, peneliti menyajikan data yaitu penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik serta efektivitas penerapannya dan faktor pendukung, penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Desa.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Merupakan tahap terakhir dalam model Miles dan Huberman dan Saldana. Data yang direduksi dan disajikan ditarik kesimpulan dengan dilampirkan bukti yang kuat. Kesimpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti sejak awal.

H. Pengujian Keabsahan Data

Setiap data dalam penelitian harus diuji keabsahan datanya agar dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Ada empat kriteria data tersebut abasah jika data tersebut memiliki derajat kepercayaan (*credibitity*), keteralihan (*transfirmability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Credibility atau derajat kepercayaan diperoleh dengan mencocokkan konsep yang sudah dibuat dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Sugiyono (2008:121) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member cek.

Demi mendapatkan hasil penelitian yang kredibel, penulis menerapkan:

a. Perpanjangan kehadiran

Perpanjangan kehadiran di lokasi penelitian ini dilakukan karena pengumpulan data tidak cukup jika dengan waktu yang relatif singkat sehingga kehadiran peneliti tidak terbatas jam kerja. Peneliti dapat hadir di Kantor Pemerintah Desa diluar jam 8 pagi atau 3 sore. Selain itu, peneliti hadir diluar hari kerja dengan kesepakatan yang dilakukan dengan responden yaitu dengan hadir di Kantor Pemerintah Desa pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan suatu yang lain. Triangulasi bertujuan untuk mengecek

penemuannya dalam penelitian dengan membandingkannya pada berbagai sumber, metode atau suatu teori yang ada. Sehingga data yang dihasilkan akan lebih valid dengan teknik triangulasi ini. Triangulasi dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan hasil pengamatan atau observasi dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas yang ada di masyarakat. Mulai dari golongan kebawah hingga golongan menengah keatas. Serta dengan informan yang berbeda-beda usianya.
- 4) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Pulosari

1. Pemerintah Desa Pulosari

a. Sejarah Singkat Desa Pulosari

Terbentuknya Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dibuktikan pada legenda kerajaan Majapahit. Waktu itu, kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Brawijaya. Desa tersebut masih dalam bentuk hutan belantara yang hanya ditempati oleh beberapa penduduk saja. Prabu Boko memerintah Joko Lodang keponakannya untuk mendirikan tempat peribadatan yang berupa candi untuk memenuhi kebutuhan siar agama hindunya. Candi tersebut saat ini di kenal dengan sebutan Candi Arimbi. Candi tersebut menggambarkan sosok dari salah satu keluarga Raja Brawijaya yang bernama Dewi Arimbi, yang petilasanya ada di desa sebelah Pulosari yaitu Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng.

Pada suatu ketika, datanglah sosok tokoh ulama yang bernama Kyai Sari dan istrinya yang bernama Mayang Sari membuka hutan untuk di jadikan sebuah pemukiman dengan membawa ajaran islam yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Pulosari. Kampung Pulosari terdiri dari beberapa dusun. Sebelah selatan Kampung Pulosari ada seorang tokoh ulama yang merupakan warga pendatang yaitu Kyai Nashir yang mendirikan sebuah kampung. Kampug tersebut yang sekarang ini disebut sebagai Dusun Pulonasir. Adapun sebelah utara Kampung Pulosari berbatasan dengan sebuah sungai besar dan masih berupa

hutan belantara yang dijadikan arena adu pukul atau adu kesaktian. Sehingga, penduduk Kampung Pulosari di kenal dengan sebutan Segitik (adu pukul). Saat ini beralih nama dengan sebutan Dusun Sumbermulyo. Desa Pulosari menyimpan banyak histories dari Kerajaan Majapahit dan sangat potensial untuk daerah pengembangan wisata, selain itu sangat cocok untuk area perkebunan yang ditunjang dengan iklim mikro yang memadai. Menurut ramalan, perkembangan Kampung Pulosari akan menjadi Kampung yang subur, Gemah Ripah Loh Jinawi (RPJMDes 2014-2019).

b. Visi Dan Misi Desa Pulosari

Visi Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang disusun berdasarkan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019 yaitu MANIS “MANDiri, Nasionalis, Istimewa, dan Sejahtera” dengan rincian:

- a) Mandiri: memiliki arti bahwa mampu membangun Desa dengan menggali potensi yang ada di dalam Desa dan mengedepankan nilai kebersamaan.
- b) Nasionalis, yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama dengan hidup berdampingan sesuai dengan koridor adat dan budaya yang ada.
- c) Istimewa yaitu membeikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan mengedepankan kepentingan umum daripada yang lainnya.
- d) Sejahtera merupakan bertekad mensejahterakan rakyat dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa yang sesuai visi pemerintah kabupaten Jombang sejahtera untuk semua.

Sedangkan misi Desa Pulosari itu sendiri yaitu:

- a. Mewujudkan kepemimpinan yang baik melalui strategi:
 - i. Penyempurnaan sistem manajemen pelayanan masyarakat.
 - ii. Peningkatan administrasi desa.
 - iii. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan desa
 - iv. Peningkatan efektifitas pengelolaan kekayaan desa.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui strategi
 - i. Percepatan perbaikan gizi masyarakat.
 - ii. Penyehatan lingkungan pemukiman dan lingkungan.
 - iii. Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - iv. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
 - v. Fasilitasi akses pendidikan.
 - vi. Fasilitasi ketersediaan pangan desa.
 - vii. Fasilitasi peningkatan keterampilan pemuda dan perempuan.
- c. Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berbasis agribisnis melalui strategi
 - i. Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani
 - ii. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
 - iii. Pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju sentra-sentra produksi pertanian
 - iv. Fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.
- d. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui strategi
 - i. Pengelolaan ruang terbuka hijau.

- ii. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- iii. Pengendalian lingkungan hidup

c. Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa

1) Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2) Unsur Sekretariat

Unsur Sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah Kepala Desa. Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa dibidang pembinaan dan pelayanan teknis administrasi .

Sekretaris desa, mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan kemasyarakatan .
- c. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan .
- d. Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat .
- e. Menyusun laporan pemerintah desa .
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu: Staf Umum dan Staf Keuangan .

Staf Umum, mempunyai tugas :

- a. Membantu sekretaris desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat maupun rumah tangga desa ..
 - b. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan .
 - c. Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada kepala desa melalui sekretaris desa .
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau kepala desa .
- staf keuangan, mempunyai tugas :
- a. Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan .
 - b. Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti – bukti atau kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa .
 - c. Melaporkan keadaan kas desa melalui Sekretaris Desa .
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

3) Unsur Teknis

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa . Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR) yang terdiri dari :

1. Urusan Ekonomi dan Pembangunan.
2. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.
3. Urusan Pemerintahan.

Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi dan jalan .
- b. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan .
- c. Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .
- b. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .
- c. Menyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Urusan Pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kersipan;
- b. Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
- c. Penyusunan program dan urusan rumah tangga desa;

- d. Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja desa;
- e. Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- f. Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan desa;
- g. Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;

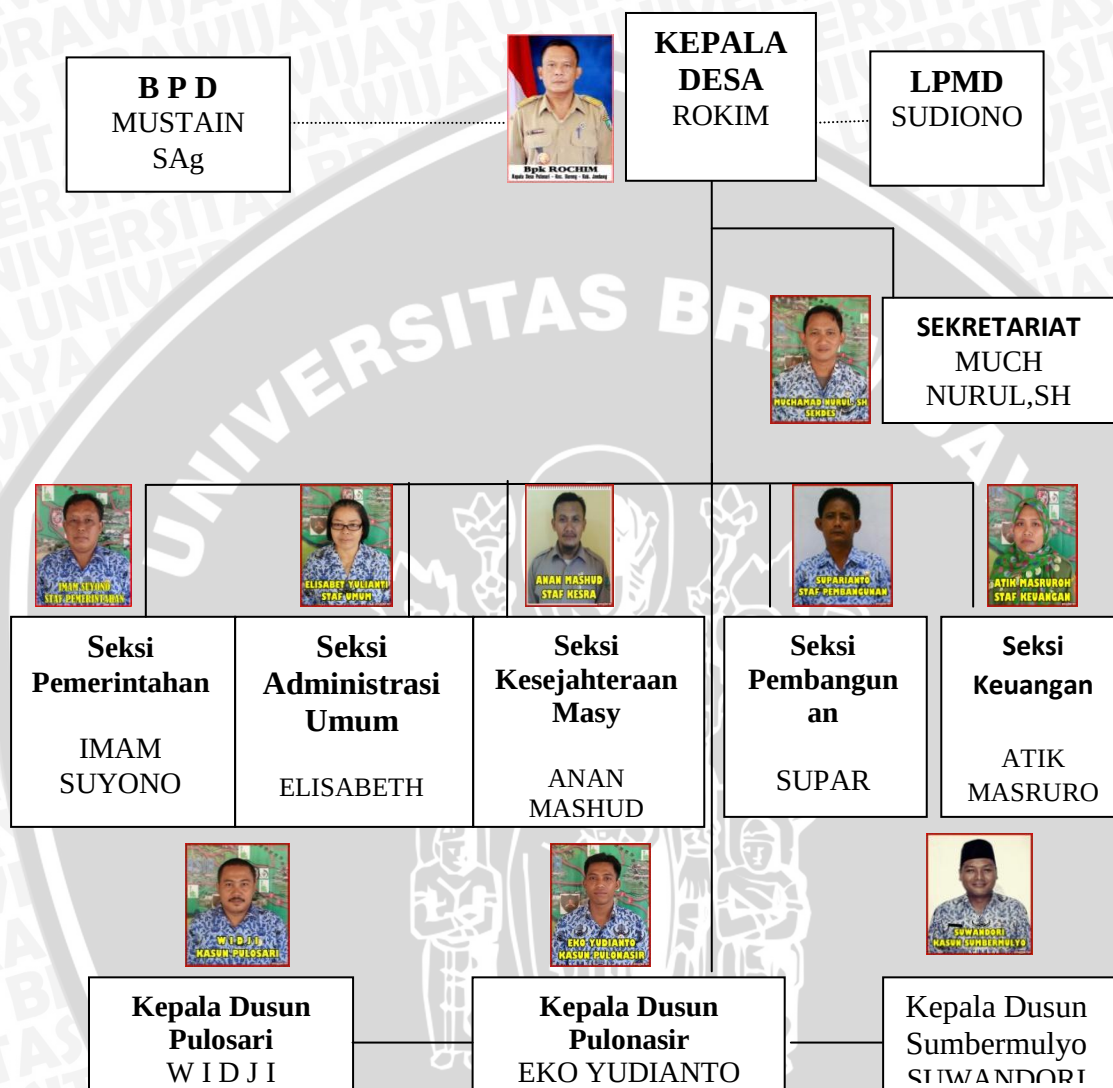
Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat:

- a. Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- b. Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- c. Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.

4. Unsur Wilayah

Unsur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Unsur Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : Penyelenggara Pemerintahan tingkat dusun. Kepala Dusun Desa Pulosari ada 3. Yaitu yang memimpin Dusun Pulosari, Pulonasir dan Sumber Mulyo.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulosari



Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulosari Masa Jabatan 2014-2019

Sumber: Data Sekunder (Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Keterangan: — = komando dari atas kebawah

- - - - - = koordinasi

1. Kepala Desa

Nama	: Rokim
TTL	: Jombang, 07-05-1971
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pelatihan yang pernah diikuti	: Pelatihan aparatur pemerintah desa
Jenis Kelamin	: Laki-laki
2. Sekertaris Desa

Nama	: Muchamad Nurul, SH
TTL	: -
Pendidikan terakhir	: S-1
Pelatihan yang pernah diikuti	: Pelatihan aparatur pemerintah desa
Jenis Kelamin	: Laki-laki
3. Badan Permusyawaratan Desa

Nama	: Muchammad Mustain SA.a. MMA
TTL	:-
Pendidikan terakhir	: S-2
Pelatihan yang pernah diikuti	: -
Jenis Kelamin	: Laki-laki
4. Staf Pemerintahan

Nama	: Imam Suyono
TTL	: Jombang, 20-05-1971
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pelatihan yang pernah diikuti	: -
Jenis Kelamin	: Laki-laki
5. Staf Umum

Nama	: Elisabeth Yulianti
TTL	: Solotigo, 27-07-1965
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pelatihan yang pernah diikuti	: -
Jenis Kelamin	: Perempuan
6. Staf Kesra

Nama	: M. Adnan Mashud
TTL	: Jombang, 27-03-1971
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pelatihan yang pernah diikuti	: -
Jenis Kelamin	: laki-laki
7. Staf Keuangan

Nama	: Atik Masruroh
TTL	: Jombang, 25-01-1987
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pelatihan yang pernah diikuti	: -
Jenis Kelamin	: Perempuan
8. Staf Pembangunan

Nama	: Supar
TTL	: Jombang, 03-05-1969
Pendidikan terakhir	: SLTA

- Pelatihan yang pernah diikuti : -
 Jenis Kelamin : Laki-laki
9. Kepala Dusun Pulosari
 Nama : Widji Jabrik Asmoro
 TTL : Jombang, 02-01-1997
 Pendidikan terakhir : SLTA
 Pelatihan yang pernah diikuti : -
 Jenis Kelamin : Laki-laki
10. Kepala Dusun Pulonasir
 Nama : Eko Yudianto
 TTL : Jombang, 20-03-1988
 Pendidikan terakhir : SLTA
 Pelatihan yang pernah diikuti : -
 Jenis Kelamin : Laki-laki
11. Kepala dusun Pulosari
 Nama : Suwandori
 TTL : Jombang, 23-08-1982
 Pendidikan terakhir : SLTA
 Pelatihan yang pernah diikuti : -
 Jenis Kelamin : Laki-laki

2. Keadaan Demografi dan Geografis Desa Pulosari

Secara astronomi, Desa Pulosari merupakan desa yang berada pada titik koordinat 112.334743 Bujur Timur / -7.686116 Lintang Selatan. Sedangkan secara geografi, Desa Pulosari terletak kurang lebih terletak 8 kilometer dari pusat Pemerintahan Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Luas Desa Pulosari sebesar 686.878 Ha. Kantor Pemerintah Desa Pulosari terletak di Jalan Anjasgoro No: 313 Pulosari, Bareng, Jombang , Kode Pos : 61474.

Batas Wilayah :

- a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara : Wonokerto
 b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan : Jenis gelaran
 c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur : Wonosalam
 d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat : Ngrimbi-Nglebak-Bareng

Desa Pulosari terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Sumber Mulyo yang terdiri dari 2 RW (Rukun Warga) dan 6 RT (Rukun Tetangga), kemudian Dusun Pulosari yang terdiri dari 3 RW dan 9 RT, serta Dusun Pulonasir yang terdiri dari 3 RW dan 8 RT. Kepadatan penduduk Desa Pulosari sebesar 670 jiwa per kilometer persegi. Kode Desa (PUM): 3517070012. Jumlah keseluruhan penduduk Desa Pulosari sebesar 3.941 jiwa yang terdiri dari 1993 laki-laki dan 1948 perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 1.276 KK.

Tabel 3. Komposisi Usia Penduduk Desa Pulosari Tahun 2016

Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Jumlah
Usia 0-6 Tahun	151	Usia 0-6 Tahun	151
Usia 7-12 Tahun	200	Usia 7-12 Tahun	171
Usia 13-18 Tahun	181	Usia 13-18 Tahun	187
Usia 19-25 Tahun	239	Usia 19-25 Tahun	233
Usia 26- 40 Tahun	492	Usia 26- 40 Tahun	456
Usia 41-55 Tahun	409	Usia 41-55 Tahun	425
Usia 56-65 Tahun	171	Usia 56-65 Tahun	158
Usia 65-75 Tahun	99	Usia 65-75 Tahun	92
Usia > 75 Tahun	66	Usia > 75 Tahun	88
Jumlah Laki-laki	1993	Jumlah Perempuan	1948

Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Masyarakat Desa Pulosari mayoritas penduduknya berpendidikan terakhir Sekolah Dasar. Tabel dibawah ini berisi mengenai data jumlah penduduk berdasar pendidikan sedang ditempuh.

Tabel 4. Data Demografi Penduduk Desa Pulosari Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2016

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 th yang masuk TK	99	107
Usia 7-18 th yang sedang sekolah	8	5
Usia 18-56 th tidak pernah sekolah	393	424
Tamat SD sederajat	673	643
Usia 12-56 th tidak tamat SLTP	196	144
Usia 18-56 th tidak tamat SLTA	55	63
Tamat SMP/ sederajat	384	296
Tamat SMA/ sederajat	201	145
Tamat D-1/ sederajat	21	16
Tamat S1/ sederajat	14	13
Jumlah total	3900	

Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Desa Pulosari dengan luas wilayah sebesar 585.878 tersebut, memiliki tingkat kesuburan tanah sebesar 97.054 hektar. Penggunaan lahan di Desa Pulosari paling banyak digunakan untuk persawahan. Kawasan pemukiman hanya 13 persen dari total keseluruhan lahan. Berdasarkan luas tanah Desa Pulosari, menurut penggunaannya dibagi sebagai berikut:

Tabel 5. Luas Tanah Desa Pulosari Berdasar Penggunaan Tahun 2016

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Sawah	228.374
2	Tegal atau Ladang	47.460
3	Pemukiman	82.000
4	Pekarangan	55.934
5	Tanah Rawa	0
6	Pasang Surut	0
7	Lahan Gambut	0
8.	Situ atau Waduk atau Danau	0
9.	Perkebunan	105.100
10.	Tanah Kas Desa	58.160
11.	Fasilitas Umum	8.850
12	Hutan	0
	Jumlah luas Wilayah	585.878

Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Desa Pulosari merupakan desa yang berada jauh dari pusat Kabupaten Jombang. Jarak yang ditempuh ke pusat Kabupaten Jombang sejauh 35 kilo meter dengan waktu tempuh selama kurang lebih 45 menit. Akses menuju Desa Pulosari dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan masih berupa jalan tanah dan aspal. Jarak orbitasi yang ditempuh ke Kecamatan Bareng kurang lebih 8 kilo meter, dengan lama tempuh kurang lebih 15 menit.

Tabel 6. Infrastruktur Jalan Desa Pulosari

No	Status	Jumlah / Satuan	Keterangan
1.	Jalan Negara	-	
2.	Jalan Provinsi	-	
3.	Jalan Kabupaten	25 Km	
4.	Jalan Dalam Desa :		
	Jalan Aspal	1.2 Km	Rusak
	Rabat beton	-	
	Tanah	-	
	Makadam	-	
	Paving	-	
5.	Jalan Dusun		
	Rabat beton	3.7 Km	Rusak
	Aspal	9.0Km	Rusak
	Makadam	2.0 Km	
	Paving	2.6 Km	
6.	Jembatan		
	Beton	2 Buah	
	Kayu	-	
	Gantung	-	
	Darurat	1	
	Lain – lain		

Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pemerintah Desa Pulosari 2016)

3. Data Potensi Desa (Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)

Desa Pulosari merupakan desa pertanian dimana luas pertaniannya lebih besar daripada luas yang lain, selain itu mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai tani. Pemilik tanah sawah di Desa Pulosari yaitu 360 orang, pemilik tanah tegalan yaitu 91 orang dan buruh tani sebanyak 316 orang.

Tabel 7. Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Pulosari Tahun 2016

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
Buruh Tani	73	27	100
Pegawai Negeri Sipil	14	5	19
Pedagang barang kelontong	39	53	92
Dokter swasta	0	1	1
Perawat swasta	0	1	1
TNI	2	0	2
Tukang Kayu	3	0	3
Tukang Batu	4	0	4
Karyawan Perusahaan Swasta	334	104	438
Wiraswasta	207	70	277
Konsultan Manajemen dan Teknis	15	0	15
Pelajar	377	301	678
Ibu Rumah Tangga	0	678	678
Perangkat Desa	7	2	9
Buruh Harian Lepas	8	2	10
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	20	0	20
Sopir	12	0	12
Tukang Jahit	1	7	8
Jumlah Total (Orang)	1.621	1.567	3.188

Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Hasil tanaman padi yang dihasilkan ditiap tahun yaitu 50 kwintal per hektar dengan luas lahan sebesar 97.054 hektar, tanaman tebu yang dihasilkan sebesar 73 kwintal per hektar dengan luas sebesar 97.054 sedangkan tanaman jagung yang dihasilkan ditiap tahunnya yaitu sebesar 45 kwintal per hektar dengan

luas tanah sebesar 112.93. Sebagai penunjang sarana prasarana irigasi di Desa Pulosari, terdapat 2 unit Dam atau bendungan, 2 saluran primer, 3 saluran sekunder, 5 saluran tersier dengan kondisi rata-rata baik namun masih belum tersedia saluran ladang. Untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi pertaniannya, di Desa Pulosari membentuk beberapa kelompok tani dengan agenda sebagai berikut:

Tabel 8. Kelompok Tani Desa Pulosari Tahun 2016

No	Status	Keterangan
1.	Penyuluhan Pola Tanam	Tidak Ada
2.	Pertemuan Rutin	Tidak Ada
3.	Pengaturan Air Irigasi	Ada
4.	Pengadaan Seprotan bebas hama	Tidak Ada
5.	Simpan pinjam	Ada
6.	Arisan	Tidak Ada

Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Selain sebagai petani, penduduk setempat Desa Pulosari sebagian bermata pencaharian sebagai peternak. Jumlah sapi di Desa Pulosari sebanyak 98 ekor, kambing 106 ekor, ayam 1223 ekor. Pemilik usaha ternak ayam buras sebanyak 3 orang.

B. Gambaran Umum Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa dibangun secara partisipatif untuk kepentingan warga. Sebelum adanya Sistem Informasi Desa, desa menggunakan papan informasi sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Keberadaa Sistem Informasi Desa memberikan banyak manfaat bagi pemerintah supra desa, masyarakat, maupun bagi pemerintah desa itu sendiri. Sistem Informasi Desa merupakan inisiatif *Combine Resource Intitution* sebuah organisasi masyarakat sipil yang tekun dan dedikatif dalam rangka mengembangkan informasi dan komunikasi sebagai sebuah alternatif berbasis masyarakat. Sistem Informasi Desa atau biasa disingkat SID terdiri dari dua ranah yaitu *offline* dan *online*. SID *online* secara otomatis menjadi *website* desa. Pada ranah *offline*, aplikasi di install dalam komputer *server* di kantor desa dan dioperasikan sebagai *server* (pusat data) yang bersifat lokal. *Database* dari hasil proses olah data secara *offline*, dapat diunggah ke sistem *online* secara berkala sehingga data menjadi lebih valid. Sedangkan ranah *online*, akan optimal ketika terhubung dengan internet.

Aplikasi SID menghimpun seluruh data penduduk desa, sehingga pada ranah *offline* sering digunakan untuk data dasar pembuatan surat administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi persuratan itu dapat dikelola oleh pemerintah desa di kantor pemerintah desa masing-masing. Jika format surat yang diperlukan tidak tersedia pada aplikasi SID, pengguna dapat melakukan proses penyuntingan atau edit surat melalui sistem. Penyuntingan ini bisa dilakukan pada jenis surat yang memiliki fungsi “Export Doc”, yakni pada “Surat Keterangan”

Layanan cetak surat juga dapat dilakukan dirumah selama 24 jam dalam sehari. Masyarakat cukup mengirim identitas dan permintaan surat kepada operator melalui SMS Gateway yang tersedia pada menu *website* SID. Ranah *online* SID lebih digunakan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ranah *online* terdiri dari dua bagian yaitu *front end* dan *back end* (Wijoyono: 2014). *Front end* dapat diakses bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya sedangkan bagian *back end*, hanya dapat diakses oleh operator SID di desa yang sudah ditunjuk oleh pemerintah desa. Berikut gambar tampilan bagian *back end* SID:

SID Sistem Informasi Desa
Pulosari, Kec. Boreng, Jember

Anda Login sebagai: Administrator

Menu: SID Home, Perencanaan, Statistik, Desa Suro, Analisa, Bantuan, Peta, Peta, SMS, Pengguna, Database, Admin Web, S. Laporan

Konfigurasi

Nama Desa: Pulosari Kode: 010 Kode POS: 61474

Nama Kepala Desa: ROKIM

Alamat Kantor Desa: Jl. Arjasmoro No. 313 Pulosari, Boreng.

Nama Kecamatan: Boreng Kode: 04

Nama Camat: M. Agus Djahuri, S.Sos, M.Si

NP Camat: 19690817 199101 1 002

Nama Kabupaten: Jember Kode: 17

Nama Provinsi: Jawa Timur Kode: 35

Logo:

Gambar 7. Tampilan Back End Sistem Informasi Desa
Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Bagian *front end* merupakan bagian yang dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahuinya, baik itu masyarakat Pulosari maupun luar Desa Pulosari. Berikut tampilan *front end* SID:



Gambar 8. Tampilan Front End SID:
Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Terdapat beberapa menu utama dalam *website* SID Desa Pulosari, yaitu:

1. Profil desa terdapat beberapa menu didalamnya, yaitu:
 - a. Sejarah desa
Sejarah desa ini berisi tentang asal usul Desa Pulosari.
 - b. Profil wilayah desa
Berisi tentang data wilayah yang berkaitan dengan tata guna lahan Desa Pulosari.
 - c. Profil masyarakat desa
Profil masyarakat desa merupakan gambaran umum masyarakat Desa Pulosari seperti: mata pencaharian penduduk.
 - d. Ptofil potensi desa
Berisi tentang potensi sumber daya alam, sumber umum, pertanian, perkebunan, perhutanan.
 - e. Perkembangan
Berisi tentang perkembangan desa, perkembangan produk domestik desa, perkembangan pendapatan perkapita.
2. Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Visi dan misi Desa Pulosari
 - b. Pemerintah Desa Pulosari
 - c. Badan Permusyawaratan Desa Pulosari
3. Lembaga Masyarakat
4. Data Desa
 - a. Data wilayah administratif Desa Pulosari

- b. Data pendidikan dalam KK Desa Pulosari
- c. Data pendidikan ditempuh masyarakat Desa Pulosari
- d. Data pekerjaan masyarakat Desa Pulosari
- e. Data agama masyarakat Desa Pulosari
- f. Data jenis kelamin masyarakat Desa Pulosari
- g. Data golongan darah masyarakat Desa Pulosari
- h. Data kelompok umur masyarakat Desa Pulosari
- i. Data warga negara Desa Pulosari

5. Kontak

Berisi tentang alamat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat yang ingin mengetahui Desa Pulosari.

6. PBB 2016

Menu PBB 2016 ini berisi tentang jumlah tagihan PBB warga Desa Pulosari sendiri selama tahun 2016, sebelumnya warga harus mengechat admin terlebih dahulu untuk meminta agar PBB miliknya ditampilkan.

Selain 6 menu tersebut masih ada menu lain yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu:

1. Beranda
2. Berita Desa
3. Produk Desa
4. Agenda Desa
5. Peraturan Desa
6. Laporan Desa

7. Panduan Layanan Desa

8. TP PKK

Masyarakat juga dapat terhubung langsung dengan layanan mandiri Desa Pulosari, *Indonesia.go.id*, portal resmi Kabupaten Jombang, *go-jatim.com*, *box file*, TP PKK Desa Pulosari, Komunitas SID di Facebook, dan Bumdes ketika membuka *website* nya dengan mengklik gambar yang ada.

C. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua badan publik tak terkecuali dengan desa. Desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Masyarakat berhak tau tentang program, kegiatan, serta anggaran yang dimiliki oleh desa. Sesuai dengan visi Desa Pulosari, yang salah satunya adalah “istimewa”, Desa Pulosari menerapkan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Desa Pulosari merupakan desa yang terletak kurang lebih 35 kilo meter dari pusat Kabupaten Jombang. Secara geografis, Desa Pulosari berbatasan dengan Desa Wonosalam. Sistem Informasi Desa di Pulosari merupakan prioritas di Kabupaten Jombang karena Desa Pulosari merupakan salah satu desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa *online* di Kabupaten Jombang. Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Pulosari sejak 03 Desember 2015. Sistem Informasi Desa atau biasa disingkat dengan SID adalah suatu sistem yang berisi tentang informasi yang

berkaitan dengan anggaran desa, pemerintahan desa, baik dalam hal pembangunan, program, maupun kegiatan pemerintah desa. Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan Saudara Sudiono selaku masyarakat Desa Pulosari:

“ Menurut saya lo ya, SID itu adalah sebuah aplikasi yang banyak sekali manfaatnya yang didalamnya itu ada data, informasi-informasi desa dan aplikasi didalam itu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kependudukan maupun hal lain, kita juga bisa tau dana desa lewat SID ini” (hasil wawancara 29 Desember 2016)

Pernyataan yang hampir sama diungkapkan oleh Saudara Tikno selaku masyarakat, bahwa: “SID merupakan Sebuah sistem yang memberikan informasi tentang Desa” (hasil wawancara 31 Desember 2016)

Selain itu, pendapat Bapak Supar sebagai staf divisi pembangunan Desa Pulosari juga tidak jauh beda dengan saudara Sudiono dan Tikno. Serta menambahkan bahwa SID memuat tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pulosari, tidak hanya masyarakat lokal saja yang bisa mengaksesnya tetapi luar Desa Pulosari juga bisa. Berikut pernyataan beliau:

“ Yang dimaksud dengan *website* SID itu adalah sebuah media informasi pemerintah Desa Pulosari. Apapun yang ada di wilayah desa Pulosari termuat di SID itu. Baik masalah pariwisata baik kegiatan PKK termuat di *website* nya, mangkanya mbak bisa klik disitu baik kegiatan pembangunan, kegiatan PKK, senam, masak. Pemaparan kegiatan di desa Pulosari. Kalau temen temen yang diluar Jombang bisa tau juga.” (hasil wawancara 23 Desember 2016)

Dapat disimpulkan bahwa SID secara sempit merupakan sebuah aplikasi untuk memudahkan desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setra mendokumentasikan data-data atau informasi yang dimiliki oleh desa. Sedangkan

secara luas, SID merupakan sebuah sistem mulai dari prosedur sampai pemanfaatannya dengan tujuan mengelola sumber daya yang ada pada sebuah desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat secara luas.

Ada empat fungsi utama dalam mengembangkan SID yaitu:

- a. Fungsi media transparansi
- b. Fungsi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintah desa
- c. Interkoneksi data antara desa dan supra desa dan
- d. Fungsi promosi produk unggulan desa

Fungsi media transparansi dalam pengembangan SID, desa menggunakan *website* atau portal desa yang terintegrasi dengan aplikasi lain. Aplikasi SID menghimpun seluruh data penduduk desa yang berhubungan dengan data-data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi tentang data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kepala Keluarga (KK), sehingga pada awalnya aplikasi digunakan untuk dasar pembuatan administrasi surat menyurat desa. SID adalah sistem yang mengawal banyak hal dalam pelayanan kependudukan salah satu aspeknya adalah keakuratan dan kecepatan dalam pelayanan publik di desa. Sesuai dengan visi Undang Undang Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis maka SID di desa perlu dikembangkan agar mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Latar belakang penerapan SID di Desa Pulosari berawal dari pelatihan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jombang. Pelatihan tersebut guna meningkatkan kapasitas aparatur

pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Awalnya, SID di Desa Pulosari dioptimalkan untuk proses surat menyurat dan pengelolaan data kependudukan. Namun setelah mencoba beberapa menu yang ada di SID, Desa Pulosari melangkah ke pembuatan *website* desa sebagai media transparansi publik. Seperti yang dijelaskan Bapak Widji selaku operator SID bahwa:

“ Pertama yang melatar belakangi SID di Pulosari terkait adanya pelatihan yang diberikan oleh BPMPD Jombang. Perkenalan awal itu dari situ. Memang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam pelatihan kapasitas pemerintah desa dimana didalamnya kita dikenalkan aplikasi tersebut. SID itu sendiri belum melangkah ke *website* desa, hanya sekedar diberi aplikasi terkait data kependuduk berupa statistik pendudukan, surat menyurat. Kebetulan yang datang waktu itu sekertaris desa. Terkait Undang-undang desa dimana didalamnya masing-masing desa harus mempunyai Sistem Informasi Desa, Kepala desa dan perangkat berkoordinasi terkait keharusan kita mempunyai Sistem Informasi Desa tersebut. Setelah kita mencoba ada beberapa menu kan disitu, optimalnya ke pelayanan belum sampai ke *website* ke transparansi, sarana pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat ke desa. Yang melatar belakangi kok membuat surat cepet.” (hasil wawancara 08 Desember 2016).



Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Widji Selaku Operator SID

Sumber: Data Primer hasil wawancara peneliti 2016

Bapak Rokim selaku Kepala Desa Pulosari mengatakan hal yang hampir sama bahwa SID di Desa Pulosari berawal dari pelatihan yang dilakukan oleh BPMPD serta menambahkan Desa Pulosari belajar pada pemateri dari Sidoarjo dan kemudian ke Yogyakarta untuk menimba ilmu tentang SID. Pernyataan beliau bahwa:

“Ini memang awal-awalnya dari pelatihan yang dilakukan oleh BPMPD Jombang, di gedung KPRI. Namun ternyata pada waktu itu tidak ada tindaklanjutannya. Pak Sekdes kita tertarik dengan SID tersebut dan mencoba mencari jalan keluar program ini.” (hasil wawancara 20 Desember 2016)



Gambar 10 Wawancara dengan Bapak Rokim Selaku Kepala Desa Pulosari

Sumber: Data primer hasil wawancara peneliti 2016

Sasaran utama penerapan SID ini adalah masyarakat Desa Pulosari agar mengetahui informasi yang disediakan oleh pemerintah desa karena selama ini, informasi yang disediakan masih sedikit yang mengetahuinya. Anggaran desa masih menjadi rahasia bagi publik. Namun setelah adanya SID masyarakat dapat

mengetahui informasi yang disediakan oleh pemerintah desa maupun dari pemerintah kabupaten. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor kepala desa untuk mengetahui informasi desa, cukup dirumah dan membuka *website* nya. Ada beberapa menu yang disediakan pada *website* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti: ketika ingin mengetahui berapa besarnya pajak yang akan dibayar, kemudian ketika ingin meminta surat administrasi desa dapat menggunakan aplikasi sms *Gateway* yang tersedia dalam *website*.

Pengembangan dan penerapan SID dapat menggunakan *hosting* berikut:

- a. <http://sid.web.id> (portal jaringan komunitas pengguna SID).
- b. <http://foss.combine.or.id> (sistem informasi proyek pengembangan FOSS CRI).

Awalnya, *website* peta Desa Pulosari hanya memuat bawaan aplikasi yaitu Desa Terong dengan domain “sid.web.id” yang tidak dapat diubah karena itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh pihak *Combine Resource Institute* (CRI) secara gratis. Namun setelah belajar di Yogyakarta, Pemerintah Desa Pulosari berusaha untuk menyesuaikan *website* tersebut, sehingga *website* Desa Pulosari ada dua yaitu Pulosari-jombang.sid.web.id dan pulosari-jombang.web.id. Saat ini, *website* yang digunakan adalah pulosari-jombang.web.id karena pemerintah desa dapat mengubah tampilan serta dapat memuat artikel-artikel sesuai dengan kebutuhan desa.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Supar selaku staf pembangunan Desa Pulosari bahwa:

“ Sasaran utama masyarakat Desa Pulo sendiri mbk, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat umum secara luas. Karena semua orang bisa mengakses *website* SID ini dirumah tanpa harus ke kantor kepala desa untuk memperoleh informasi desa. Masyarakat dapat mengetahui anggaran desa, pengeluaran berapa, pemasukan berapa, jadi menuju transparansi lah. Masyarakat juga dapat memanfaatkan menu SID kayak ingin mengetahui besarnya pajak. Masih banyak manfaat lain. Ini awalnya *website* Desa Terong mbak namanya, sudah bawaan dari Jogja gak bisa dirubah, bawaan dari sana. Gratis. Tapi setelah kita datang ke Jogja langsung kita buat *website* sendiri. Jadi *website* Desa Pulosari sekarang ada dua tapi yang aktif satu, yang *sid.web.id* sudah tidak dipakai lagi ” (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Pernyataan yang hampir sama diutarakan oleh Bapak Rokim bahwa: “ Kalau sasaran utamanya masyarakat Desa Pulosari terutama untuk anak muda mbak, yang ngerti internet. Selain itu ya masyarakat luar Pulo bisa mengaksesnya (hasil wawancara 20 Desember 2016).

Penerapan SID di Desa Pulosari bukan hanya sebuah kewajiban pemerintah desa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang hak desa untuk mendapat akses Sistem Informasi Desa dari pemerintah Kabupaten atau Kota, melainkan lebih dijadikan sebagai kebutuhan desa sehingga SID tetap berjalan di Desa Pulosari. Banyak desa yang sudah menerapkan SID namun banyak yang tidak jalan karena kurang kompaknya aparatur di desa tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Widji:

“Saat ini sudah banyak desa yang sudah menerapkan SID mbak karena SID ini kan tuntutan Undang-Undang, tapi banyak yang tidak jalan. Karena ya itu, aparatnya kurang kompak. Selain itu desa-desa lain tidak ada inisiatif dengan keinginan sendiri, mereka menunggu pemerintah kabupaten. Memang SID ini kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi sesuai dengan undang-undang tapi kalau tidak ada inisiatif gimana bisa maju.” (hasil wawancara 13 Desember 2016)

Jika desa ingin maju, harus memiliki sebuah inisiatif. Banyak desa yang belum terfikirkan menerapkan SID sampai ke *website* desa karena masih menunggu tindaklanjut dari pemerintah kabupaten. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Bapak Nurul selaku sekretaris desa bahwa:

“Ini inisiatif Desa Pulosari mbak, memang semua harus punya inisiatif sendiri untuk maju mbak. Mangkanya kita berangkat ke Yogya, yang berangkat kesana 5 orang untuk menimba ilmu, eh 6 sama pendampingnya Pak Widodo itu yang pemateri dari Sidoarjo. Jombang mungkin belum ada yang menerapkan, mungkin waktu itu cuma Pulosari. Kita belajar di Yogya dikasih *website* nya. Mangkanya ada 2 sekarang. Kalau pengen maju, harus punya hosting sendiri. Tiap desa beda mungkin ada yang belum terfikirkan sampai kesitu.” (hasil wawancara 27 Desember 2016)

Pengembangan SID di Desa Pulosari termotivasi oleh Desa Dlingo dan Desa Ngladran yang ada di Yogyakarta. Kedua desa tersebut awalnya merupakan desa terpencil yang tidak dikenal oleh publik. Namun setelah menerapkan SID, desa tersebut menjadi terkenal karena *website* desanya menampilkan aneka wisata yang dimiliki desa. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Widji bahwa:

“Kami belajar dari Dlingo dan Ngladran. Berkat SID, banyak turis mancanegara yang datang mengunjungi karena *website* SID menampilkan berbagai potensi wisata yang ada di desa. Ya seperti air terjun Lippo. Awal mulanya ya dari *website* desa SID ini. Turis manca itu bnyak sekali dr kulit yg item, sampai putih pendapatan 1 tahun itu bisa mencapai 1,4 milyar. Kami terinspirasi dari situ sehingga kami berusaha untuk menampilkan wisata yang ada didesa mbak. Kami awali dengan pembangunan infrastruktur jalannya dulu mbak biar masyarakat yang datang tidak kecewa” (hasil wawancara 14 Desember 2016).

Awal penerapan SID di Desa Pulosari tidak memiliki dana. Kabupaten Jombang tidak memberikan dana terkait penerapan SID. Pernyataan tersebut diutarakan oleh Bapak Rokim bahwa:

“ Tidak ada anggaran dari kabupaten. Awalnya kita juga tidak ada dananya sama sekali, kita nekad. Penerapan awal mencapai 12 jutaan. Memang awalnya tidak ditanggapi BPMPD. Bagaimanapun caranya agar berjalan, dan ternyata sukses kita terapkan di Desa Pulosari. Sehingga kita menganggarkan sendiri dari anggaran desa. Mulai dari jaringan wifi kita danai sendiri tidak ada anggaran dari pemerintah, semua itu tidak ada bantuan dari pemerintah kabupaten.” (hasil wawancara 20 Desember 2016).

Pernyataan Bapak Rokim tersebut dipertegas oleh Bapak Nurul bahwa:

“Wah kalau biaya banyak mbak, istilahnya biayanya tidak terduga. Biaya pemasangan wifi, biaya pelatihan di Jogja. Soalnya kalau tahun ini belum dianggarkan. Waktu pertama kali itu tidak ada biaya mbak. Istilahnya kita nekad lah mbak menerapkan ini demi kemajuan. Kalau tidak gini, bagaimana desa kita bisa maju. Kami berfikiran seperti itu“ (hasil wawancara 27 Desember 2016).

Pernyataan Bapak Rokim dan Bapak Nurul dipertegas oleh Bapak Widji bahwa:

“Biayanya cukup banyak mbak untuk awal penerapan. Biaya pemasangan wifi, biaya perjalanan ke Jogja untuk menimba ilmu, biaya operator ini secara khusus masih belum ada, tapi sudah 3 bulan ini sudah mulai dianggarkan. Ini masuk di belanja jasa kantor jadi tambah Rp. 500.000 dan honorarium ini tambah Rp. 600.000 (sambil menunjuk laporan anggaran Desa Pulosari)” (hasil wawancara 14 Desember 2016).

Pemerintah Desa Pulosari sebenarnya memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan SID ini, seperti dengan mengembangkan menu yang ada di sistem yaitu Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). Namun, hal tersebut juga masih terkendala oleh anggaran karena AKP ini, pemerintah desa harus

menyurvei warga satu persatu atau *door to door* agar data yang dihasilkan benar-benar valid. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Widji bahwa:

Kita mencoba menggunakan menu AKP ini, ini saya sudah mencoba untuk survey satu RT, tapi terkait anggaran, terbatasnya anggaran. Temen-temen kalau diajak survei gratis juga sakne. Diluar jam kerja. Ini saya sudah mencoba, di menu ini ada beberapa pertanyaannya. Ada bobotnya juga. Ada dua puluh dua pertanyaan yang menjadi pertanyaan. Pertama jenis lantai tempat tinggal, keramik, tanah. ini nanti akan menjadikan sebuah nilai. kalau masing-masing responden ditanya dilaporan hasil analisis muncul yang termiskin berapa, kita coba di dusun pulosari dengan jumlah kepala keluarga 54 di RT 9 RW 5 kita bisa melihat terkaya sesuai dengan input yang kita masukkan. Kita bisa simpulkan. Yang sejahtera berapa jumlahnya, ada disini. hampir sesuai dengan pusat. Padahal menu ini benar-benar bermanfaat kalau diterapkan tapi terkendala biaya itu tadi jadi masih susah untuk berkembang.” (hasil wawancara 14 Desember 2016).

Penerapan SID di Desa Pulosari memang harus tetap berlangsung dan berkelanjutan terlebih jika semua desa dapat menerapkan, karena SID memiliki manfaat yang banyak bagi desa yang menerapkan. Harapannya dalam penerapan SID di Desa Pulosari bisa menjadi lebih lagi dan pemerintah Kabupaten Jombang dapat memfasilitasi penerapan SID ini. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Bapak Nurul, bahwa:

“ Kami berharap SID ini berkelanjutan mbak, tidak jalan ditempat karena manfaat yang kami rasakan sejauh ini sudah cukup banyak. Dan untuk Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat memfasilitasi penerapan SID ini mbak, soalnya banyak desa yang mengharapkan bantuan dari pemerintah Jombang mbak”. (hasil wawancara 27 Desember 2016).

Saudari Feni menambahkan:

“ Saya sangat berharap SID dapat berjalan terus mbak, terkait sosialisasi juga agar semoga cepat diselenggarakan sehingga masyarakat desa sini sendiri bisa mengetahui apa itu SID, bagi kaum awam orang-orang tua

masih belum tau apa itu SID mbak. Soalnya juga pas *launching* SID disini masyarakatnya tidak diundang mbak”. (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Harapan-harapn tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah terkait penerapan SID di Desa Pulosari sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik.

Keberadaan Sistem Informasi Desa tidak dapat terpisahkan oleh keterbukaan informasi publik. Kabupaten Jombang, baru mengenalkan SID tahun 2014 sedangkan di luar Jawa sudah mengenal SID dari tahun 2013. Pemerintah Desa Pulosari melakukan berbagai cara untuk mengembangkan SID di desanya. Awalnya SID hanya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa surat menyurat dan pengolahan data kependudukan, setelah itu Desa Pulosari membuat sebuah *website* Desa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ada beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan penerapan sebuah sistem informasi. Menurut O'brien untuk mengukur aktivitas penerapan sistem informasi dapat dilakukan dengan menggunakan lima komponen utama yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama keberhasilan penerapan suatu informasi, karena suatu sistem yang baik tidak akan berjalan tanpa adanya SDM yang berkualitas. SDM ini terdiri dari dua aspek yaitu dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa Pulosari. SDM Desa Pulosari dari segi kualitas aparatur pemerintah desa sudah cukup baik karena hampir seluruh aparatur dapat

mengoperasikan komputer. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Saudara Ulum dan Iqbal selaku masyarakat bahwa:

“ Kalau masalah aparatur pemerintahnya sudah lumayan kompak mbak, stafnya juga bisa mengoperasikan komputer semua. Ehmm, walaupun kebanyakan tugas berkaitan dengan SID masih dibebankan pada satu orang saja yaitu Pak Widji selaku operator”. (hasil wawancara 31 Desember 2016)

Selain itu pernyataan Saudara Andi selaku masyarakat juga sependapat dengan Saudara Ulum dan Iqbal bahwa:

“ Aparatur pemerintahnya bisa mengoperasikan komputer semua kok mbak, walaupun sudah tua-tua. Pak Lurah juga memberi dukungan yang besar mbak, jadi beliau itu suka kalau desanya maju. Apapun akan dilakukan untuk mencapai prestasi desanya. Setau saya sih gitu mbak” (hasil wawancara 31 Desember 2016)

Sedangkan dilihat dari segi kuantitas atau jumlah aparatur pemerintah desa dalam penerapan SID juga sudah memadai, sesuai dengan pernyataan Bapak Supar bahwa: “ Aparatur desa terdiri dari 10 orang, tentu saja jumlah tersebut sudah cukup untuk menangani kebutuhan warga. Yah seimbang lah mbak.” (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Selain sumber daya aparatur, untuk mengukur komponen sumber daya manusia yaitu dilihat dari pemakai akhir atau klien. Pemakai akhir penerapan SID di Desa Pulosari adalah masyarakat Desa itu sendiri. Kualitas sumber daya masyarakat Desa Pulosari masih kurang. Karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui penerapan SID di desanya dan masih banyak yang tidak bisa mengoperasikan internet, padahal sistem SID ini sudah sangat bagus dan

memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Hal tersebut diutarakan oleh

Bapak Supar bahwa:

“Sumber daya manusia masyarakat yang ngerti elektronik, hp ya dikit mbak. Rata-rata SDM disini kan SD, SMP. SID ini sudah sangat membantu, kami juga sudah berusaha untuk memaksimalkan sistem ini tapi desa Pulosari ini hampir sama seperti daerah pegunungan jadi susah untuk mengubah pola masyarakat yang seperti itu. Jadi kita fokuskan ke remaja-remaja dengan memfasilitasi komputer disekolah.” (hasil wawancara 23 Desember 2016)

Pernyataan Bapak Supar dipertegas oleh Bapak Widji bahwa:

“ Kalau dimasyarakat yang masih terlalu awam itu belum mengenal SID. April kita baru *launching* sampai hari ini, kalau anak-anak muda, RT RW ya tau. Memang butuh waktu lama. Masyarakat disini soalnya kebanyakan lulusan SD jadi tidak banyak yang bisa mengoperasikan komputer terlebih internet. Masyarakat taunya kok ngurus surat sekarang jadi cepet. Tidak tau sistem yang digunakan. Terlebih *website* Desa Pulosari. Tapi untuk anak muda muda nya ya sudah banyak yang tau tentang SID ini mbak. Kita pernah mengetes pas waktu karnaval tidak kita pasang dipapan pengumuman tapi di *website*. Sudah banyak yang tau”. (hasil wawancara 14 Desember 2016).

Saudara Sudiono selaku masyarakat juga mengatakan hal yang hampir sama dengan Bapak Supar dan Bapak Widji bahwa:

“ Banyak masyarakat yang tidak tau internet mbak, masih sangat awam dengan internet. Kalau anak mudanya sudah banyak yang tau tapi 30 persenan masyarakat kan lulusan sekolah dasar, jadi kualitas sumber daya manusia mereka ya begitu mbak. Bisa mbak bayangkan sendiri”. (hasil wawancara 21 Desember 2016).

Seluruh pemerintah aparaturnya Desa Pulosari dapat mengoperasikan komputer, namun pengguna akhir SID yang merupakan masyarakat Desa Pulosari masih banyak yang belum mengetahui penerapan SID di desa nya dan masih banyak

juga yang tidak dapat mengoperasikan komputer, terlebih internet. Padahal masyarakat Desa Pulosari yang akan berinteraksi langsung dengan sistem dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu diperlukan pelatihan khusus terutama bagi generasi muda.

b. Sumber Daya *Hardware*

Selain sumber daya manusia, hal yang paling penting berikutnya adalah mengenai sumber daya *hardware*. *Hardware* merupakan suatu alat yang memiliki wujud dan dapat disentuh. Sumber *hardware* merupakan unsur penunjang dalam penerapan SID. Penerapan SID ini memerlukan beberapa peralatan pendukung agar tetap berjalan. Peralatan tersebut seperti: komputer, printer maupun mesin scan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rokim bahwa: “Tentu dalam penerapan SID ini juga tidak lepas dari perangkat keras ya mbak, memerlukan peralatan pendukung, ya seperti komputer, mesin scan maupun printer”. (hasil wawancara 20 Desember 2016).

Jumlah komputer untuk menunjang penerapan SID di kantor Desa Pulosari sebanyak 2 komputer dan 1 laptop. Komputer yang masih layak digunakan hanya 1 buah. Seperti yang diungkapkan oleh Saudara Sudiono selaku masyarakat bahwa: “Komputer ada 2, laptopnya 1 mbak, tapi komputer yang bisa dipakai cuma 1 tok mbak. hahaha.” (Hasil wawancara 11 Februari 2016). Pernyataan Saudara Sudiono dipertegas oleh Saudara Elnatan bahwa “Komputer setahu saya ada 2 mbak, laptopnya ada 1”. Berikut gambar komponen komputer Desa Pulosari:



Gambar 11. Komponen Komputer Desa Pulosari

Sumber: Data primer hasil observasi peneliti 2016

Sebelumnya jumlah komputer sebanyak 7 buah. Satu komputer untuk satu aparatur pemerintah desa. Namun karena ada kerusakan jadi jumlah tersebut menjadi berkurang. Kerusakan tersebut karena kurangnya perawatan yang dilakukan. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Supar bahwa:

“ Untuk masalah alat ya dulu ya pas, karena ada kerusakan, tiap-tiap staf itu dulu punya, karena kurang perawatan jadi ya berkurang otomatis, tiap-tiap meja itu ada satu satu, tinggal dua sekarang, dulu tujuh tapi sekarang kalau ada apa-apa langsung service mbak. Itu komputer-komputer yang masih rusak masih ada digudang. Mau memperbaiki ya mahal kayak beli baru, jadi ya kita biarkan digudang situ itu. Kalau di Bumdes itu juga ada mbak komputernya. Ini kerusakannya karena kurang perawatan aja mbak. Kita belum mengalokasikan biaya untuk peralatan komputer maupun peralatan yang lainnya” (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Pernyataan Bapak Supar dipertegas oleh Saudara Sudiono bahwa “ Kerusakan ini dikarenakan masalah perawatan yang kurang, sehingga belum lama sudah rusak mbak.”. (Hasil wawancara 11 Februari 2016).

Menurut masyarakat bahwa jumlah komputer yang ada di kantor Desa Pulosari belum memadai. Masyarakat harus menunggu lama jika yang datang mengurus administrasi data kependudukan di Desa Pulosari banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Saudara Elnatan selaku masyarakat bahwa: “Komputernya jumlahnya kurang lah mbak, sewaktu-waktu kalau mau makek harus nunggu lama.” (hasil wawancara 31 Desember 2016).

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Saudara Ulum dan Saudara Iqbal bahwa: “ Komputernya belum memadai. Jumlah komputernya tidak sebanding sama penggunaanya mbak.” (hasil wawancara 31 Desember 2016).

Jumlah *print out* dan juga scan yang ada di Desa Pulosari juga masih belum memadai. Print berjumlah 1 buah dan scan berjumlah 1 buah. Seperti pernyataan Bapak Supar bahwa: “ Print nya ada satu mbak, sama mesin scan nya ada 1 juga. Ini karena kurang perawatan jadi seperti ini. ” (hasil wawancara 23 Desember 2016). Hal tersebut dipertegas oleh Saudara Tikno bahwa “ jumlah print 1, scan 1. Kurang lah mbak kalau itu” (hasil wawancara 31 Desember 2016).

c. Sumber Daya Software

Sumber daya *software* berkaitan dengan sistem yang digunakan. Berbagai sistem SID ditawarkan oleh berbagai perusahaan maupun lembaga atau komunitas nirlaba. Desa Pulosari menggunakan sistem SID yang dibuat oleh *Combine Resource Institution* (CRI) Yogyakarta. SID dari CRI ini dibangun dan

dikembangkan sejak tahun 2009. SID CRI dibiayai oleh lembaga donor yang salah satunya adalah *United Nations Development Programs* (UNDP). SID yang dikembangkan oleh CRI yaitu ada 4 versi, masing-masing versi memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh, versi terakhir merupakan versi perbaikan versi sebelum-sebelumnya. Masing-masing versi tersebut adalah versi 2, versi 3.1, versi 3.04 dan terakhir 3.10. Pernyataan tersebut diutarakan oleh Bapak Widodo selaku CRI Sidoarjo bahwa:

“ yang membuat salah satu NGO di Jogja namanya *Combine Resource Institution* (CRI). Yang dibiayai oleh beberapa lembaga donor termasuk UNDP. Aplikasi itu *opensource* (gratis). Kalau versi yang dibuat CRI ada 4 versi, terakhir versi 3.10. yang dibuat teman penggiat banyak versi karena disesuaikan pengguna daerah masing-masing. Secara prinsip tidak beda, hanya penyempurnaan sistem agar lebih stabil saja”. (hasil wawancara 03 Januari 2017).

SID yang digunakan di Desa Pulosari sendiri yaitu SID CRI versi 3.04.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Widji bahwa:

“Kalau sistem yang digunakan ya *Combine* CRI ini. Versi nya 3.04 mbak. Haduh gini kalau tidak buka aplikasinya dulu jadi bingung mbak. Kemarin itu kan dipertanyakan ini produk LSM atau produknya pemerintah, yang dikhawatirkan kan kita menggunakan aplikasi ini kan tidak ada respon pemerintah, tapi di UU kan jelas SID itu Desa yang membutuhkan karena terkait sebagai media informasi, data kependudukan, pelayanan publik itu, inovasi itu, kalau kemungkinan ADD tinggi kita coba untuk berinovasi. Kalau dimasyarakat yang masih terlalu awam itu belum mengenal karena April baru *launching* mbak.” (hasil wawancara 14 Desember 2016).

Cara menginstal sistem aplikasi SID, yaitu dengan:

- a. Mendownload *xampp* download
- b. Install *xampp* sampai selesai diperangkat

- c. Download SID di web <http://sid.web.id> . Sebelumnya harus daftar terlebih dahulu dari <http://foss.combine.or.id/> atau bisa juga sudah di di github <https://github.com/eddierridwan/sid304-jms/issues> yang sudah dimodifikasi
- d. Copy hasil *download* ke folder *http docs* di *xampp*
- e. Buat database di PHPM admin dan import database SID nya.
- f. Setting dan sesuaikan nama database dan edit file *database.php* `x:\xampp\htdocs\sid3\donjo-app\config`
- g. Login.

Awal mula menggunakan SID, Pak Widji selaku operator merupakan orang awam yang tidak terlalu mengenal internet atau sebuah sistem. Ketika menginput data kependudukan mengalami kesulitan karena biasanya tulisan tanggal, bulan, tahun namun di sistem bulan, tanggal, tahun. Selain itu, aplikasi harus di *convert* terlebih dahulu. Namun seiring dengan berjalannya waktu sudah dapat menyesuaikan. Sesuai dengan pemaparan Bapak Widji bahwa:

“ Masih ada beberapa yang kurang pas terkait sistem ya, kita *convert* tidak bisa. Namun kita coba benahi Alhamdulillah kemarin bisa menyesuaikan, inputnya kan tanggal bulan tahun, di sistem tahun, bulan tanggal Alhamdulillah kalau sudah lama memakai jadi terbiasa. Lama-lama sudah bisa menyesuaikan.” (hasil wawancara 08 Desember 2016).

Sistem SID yang digunakan Desa Pulosari bersifat otomatis, jadi data akan valid karena terus diperbaharui saat *online*. Selain itu sistem tersebut masih dapat digunakan ketika *offline*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supar bahwa: “Sitemnya otomatis, misalnya program, tanggal, tahun, bulan ini, terus sampean lihat akan tambah dengan sendirinya jadi otomatis lah tidak ngitung. Enaknya kan disitu. Kalau dulu manual ya lama mbak. SID ini sangat membantu.” (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Sistem yang digunakan oleh pemerintah Desa Pulosari pada SID tersebut tidak pernah ada masalah, selain itu sistem tersebut masih dapat digunakan secara

berkelanjutan jika *hosting* SID di Yogyakarta juga berjalan. Hal tersebut seperti yang dikatakan Bapak Nurul bahwa: “ Sistemnya gak pernah rewel mbak alhamdulillah. SID ini bisa terus beroperasi kalau *hosting* nya jogja masih jalan. Ya karena SID ini kan perintisnya Jogja. Kita pakai SID Jogja mbak. Kan banyak SID ditawarkan untuk tujuan non komersial.” (hasil wawancara 27 Desember 2016).

Sumber daya *software* merupakan alat bantu untuk mempermudah pekerjaan, jika tidak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, hasil akhirnya tentu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan dalam penerapan sebuah sistem.

d. Sumber Daya Data

Data dan informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan SID. CRI memiliki tiga prinsip yaitu masyarakat terlibat, data akurat, desa berdaulat. Data merupakan komponen yang penting dalam menunjang SID. Seringkali Desa Pulosari diminta data kependudukan oleh beberapa dinas terkait seperti Pemerintah Kabupaten, atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Jombang untuk mengalokasikan beberapa program bantuan kepada masyarakat. Sebelum adanya SID, pemerintah Desa Pulosari harus mencari secara manual masyarakat yang berhak mendapat bantuan. Desa Pulosari memanfaatkan data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, data tersebut seringkali tidak valid karena masih banyak kesenjangan, yang seharusnya menerima malah tidak menerima bantuan, begitu sebaliknya karena hanya beberapa orang saja yang disurvei. Setelah itu desa

diberikan wewenang untuk memperbaiki data kependudukan. Desa Pulosari memanfaatkan SID sehingga data menjadi lebih valid. Pemerintah desa tinggal mengklik disistem dan data akan muncul semua. Bahkan masyarakat juga dapat mengetahuinya lewat *website* desa. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Widji bahwa:

“Terkait data kependudukan waktu itu rame-ramenya ada bantuan masyarakat. Baik itu dasar KIP, KIS dan rame-remenya KJS dimana yang mendasari waktu itu kalau gak salah PPLS 2011. Awalnya data penduduk input kita dari Catatan Sipil kab, tiap tahun kita dikasih hard copy dan soft copy berupa pdf. Lah pdf kita *confert* dalam excel dan kita sesuaikan dengan format SID. Hari ini kita dituntut Cepat, akurat. Dari jajaran dinas terkait, Capil sendiri aja lama. Data dari Dispenduk Capil 2011 dimanfaatkan 2014-2016 ini. Banyak kesenjangan yang harusnya tidak layak dapat malah dapat. Karena permasalahan statistik ini tidak tidak *door to door*, sampel beberapa, 23 RT Cuma 6 yang diambil sampel. Ketidakakuratan jadi muncul mbak, dan akhirnya data sosial itu kita harus merevisi. Kita diberi kewenangan untuk mengoreksi dan melengkapi data. Kita membuat team Terdiri dari 4 orang. Sekdes, kasi pemerintahan, dua kasun bertanggung jawab input data. Yang menjadi sentral urgent aplikasi ini kan data kependudukan, ini dibagi tugas kurang lebih 4000, saya 2000, teman yang lain 1000, data penduduk masih bentuk excel mbak. Kita menggunakan SID itu mbak. Kita lembur setiap hari untuk menyelesaikan sampai jam 3 pagi setiap hari. Tapi alhamdulillah rampung. Dengan adanya SID masyarakatpun sekarang dapat melihat siapa saja yang termasuk golongan sejahtera, golongan miskin ataupun sangat miskin. SID ini memang banyak sekali manfaatnya”. (hasil wawancara 08 Desember 2016)

Selain itu, Bapak Supar memberikan pernyataan yang hampir sama bahwa:

“Tadi belum kami jelaskan ya permintaan data-data, masyarakat miskin nanti akan muncul di SID, dan ada orang meninggal akan berkurang. Makanya data valid, cepat, tepat, akurat, tidak bisa dibohongi, temen-temen tidak usah pusing-pusing. Dulu itu kita berpedoman data yang dikasih Dispenduk Capil mbak, kita kebingungan ketika diminta dinas terkait soalnya kita harus mencari manual. Dan datanya juga masih belum terlalu valid” (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Bapak Nurul mempertegas pernyataan Bapak Widji dan Bapak Supar , serta menambahkan bahwa keakuratan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sekitar 90 persen. Berikut pernyataan beliau:

“ Kalau data dari capil 90 % soalnya capil mendata hanya terbatas, Capil butuh tenaga mohon maaf jika ada kekurangan. Jadi datanya ya masih dibilang valid karena hanya 10 % mbak yang tidak valid. Masih maklum lah. Sini internal juga ada tapi ya wajarlah mbak. Yang penting untuk kemajuan. “ (hasil wawancara 27 Desember 2016)

SID merupakan gambaran demokratisasi dalam hal akses data. Data yang ada di SID berkaitan dengan kependudukan, perencanaan, asset, anggaran, pembangunan fisik, maupun pembangunan lain akan terekam secara elektronik oleh sistem tersebut. Semua data tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga.



Desa Pulosari	
Tahun	2016
Kode Desa (PUM)	3517070012
Desa/Kelurahan	PULOSARI
Kecamatan	BARENG
Kabupaten/Kota	KABUPATEN JOMBANG
Provinsi	JAWA TIMUR
Tahun Pembentukan	1900
Luas Desa/Kelurahan (Ha)	585,878000
Penetapan Batas	Tidak Ada

Gambar 12. Data Pokok Desa Pulosari

Sumber: Data Sekunder (Dokumentasi Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Database dan aplikasi yang ada di SID tidak akan berguna jika tidak di *update* sesuai kondisi yang ada didesa saat ada perubahan, misal ketika ada kelahiran, kematian, maupun migrasi penduduk. Ketersediaan data dan informasi yang dapat diakses oleh setiap orang merupakan tekad kuat dari Pemerintah Desa Pulosari. Bahkan, Pemerintah Desa Pulosari memberikan imbalan Rp. 25.000 kepada siapa saja yang dapat membuat artikel untuk *website* desa. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Widji bahwa:

“Kita juga sudah berusaha untuk memberikan imbalan, kepada siapa saja yang dapat membuat artikel. Dua puluh lima ribu untuk satu artikel. Kita seleksi dulu artikel tersebut layak untuk ditampilkan atau tidak. Tapi ya gitu mbak, warga masih belum terlalu antusias untuk hal tersebut.” (hasil wawancara 21 Desember 2016).

Data yang disediakan oleh pemerintah Desa Pulosari cukup ringkas, padat tidak berlimpah ruah yang dapat menyulitkan masyarakat untuk menggunakannya. Setiap kegiatan atau program langsung dimuat dalam *website*. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Saudari Putri bahwa:

“ Data nya sih sudah valid mbak kayaknya, soalnya selalu diupdate. Informasi yang disediakan juga sudah sesuai, tapi kalau ada kesalahan-kesalahan dikit ya wajarlah mbak. Soalnya juga masih belum lama SID ini. Masih setahunan. Kalau masalah kualitas informasi yang disediakan ya ala kadarnya saja mbak soalnya ini kayaknya dibebankan pada satu orang saja soalnya, ya mas Widji itu. Beliau saja yang membuat artikel-artikel gitu” (hasil wawancara 21 Desember 2016).

Saudara Tikno mempertegas pendapat Saudari Putri bahwa: “setiap kegiatan gitu langsung diupload kok mbak di *website*”. (hasil wawancara 31 Desember 2016).

Terdapat menu *box file* yang dapat diakses oleh masyarakat, ketika ingin mengetahui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bumdes dan PKK. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Widji bahwa:

“ Ada *box file*, melalui *box file* ini kita bisa melihat rencana, ini saya sudah coba Bumdes dan PKK. Terkait *rabdesign* dan sebagainya kita kasih menu. Sementara email dan pasword nya masih saya pegang. Namun jika masyarakat sudah berkenan melalui sms *gateway* ingin mencoba, saya kasih. Pemanfaatan sms *gateway* belum termanfaatkan. Kalau berinteraksi sudah sering banyak sekali tidak hanya warga kita terkait bagaimana suratnya, doc nya. ((hasil wawancara 08 Desember 2016).

Selain kegiatan dan program pemerintah desa, *website* Desa Pulosari juga memuat tentang besaran anggaran di tahun 2016, terutama dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga keterbukaan informasi publik benar-benar nyata. Seperti yang dijelaskan Bapak Widji bahwa:

“Saat ini ADD yang diberikan pemerintah pusat kepada desa kan besar, SID di Desa Pulosari ini memberikan poin tersendiri, kami bisa menampilkan laporan terkait kegiatan anggaran di tahun 2016. Berkaitan dengan anggaran lain kita sudah diberikan konfirmasi oleh kelembagaan terkait, dari Bumdes dan PKK, kalau BMD belum, saya belum berani memuat. Kalau sudah oke ya saya muat. Kami berusaha mencapai transparansi publik “ (hasil wawancara 08 Desember 2016).

Sumber daya data yang disediakan pemerintah Desa Pulosari bukan hanya kegiatan atau program desa saja melainkan berkaitan juga dengan anggaran desa di tahun 2016. Terkait Alokasi Dana Desa (ADD), juga ditampilkan pada *website* Desa Pulosari. Sumber daya data yang disediakan oleh pemerintah Desa Pulosari dirasa masyarakat sudah cukup baik, namun diharapkan dapat ditingkatkan lagi.

e. Sumber Daya Jaringan

Jaringan komputer merupakan sebuah terminal yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Jaringan komputer ini meliputi: modem, wifi, mifi, atau jaringan yang lainnya. Jaringan yang digunakan untuk penerapan SID pada Desa Pulosari adalah wifi. Wifi dipilih karena lebih efisien dan lebih murah, serta dapat menjangkau masyarakat secara luas. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Widji bahwa:

“Kita menggunakan wifi agar dapat menjangkau masyarakat. Walaupun saat ini jangkauannya tidak terlalu luas. Saat ini menjangkau 25 meter. Pemikiran pemerintah Desa Pulosari bahwa paling tidak kalau di Pulosari harus bisa, walaupun kita dulu desa IGT, internet tidak ada. Termasuk kehadiran internet ini kita bisa sedikit maju. Kalau pakai paket data ya innalillahi.” (hasil wawancara 08 Desember 2016).

Bapak Supar mempertegas pernyataan Bapak Widi bahwa: “Jaringan pakai wifi mbak, ini bisa menjangkau 25 meter. Masyarakat juga dapat memanfaatkan wifi ini mbak”. (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Pemerintah Desa Pulosari juga berupaya untuk memaksimalkan jaringan agar dapat dinikmati oleh masyarakat, dengan memberikan voucher sebesar Rp.1000 masyarakat dapat menggunakan internet selama dua jam. Antusias masyarakat sendiri juga tinggi terhadap hal tersebut, terbukti dengan 1000 voucher dapat terjual dalam satu bulan. Pernyataan tersebut diutarakan oleh Bapak Rokim bahwa:

“ Hari ini kita genggam internet ditangan namun kenyataannya kan, kemudian kita bisa melihat itu dengan jaringan wifi. Walaupun belum free, kami bisa memberikan voucher 1000 dua jam, ini karena latar

belakang SID kita harus online. Liburan ini, satu bulan ini tidak kurang 1000 lembar,” (hasil wawancara 03 Januari 2017).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal sumber daya jaringan yang digunakan adalah jaringan wifi. Jaringan tersebut menjangkau 25 meter dari tempat pemasangan. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan wifi tersebut hanya dengan membayar 1000 untuk durasi waktu dua jam. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya wifi yang disediakan oleh pemerintah Desa Pulosari karena mereka tidak perlu lagi ke warung internet dengan membayar tarif perjamnya yang lebih mahal. Seperti yang dikatakan Saudari Feni selaku masyarakat bahwa:

“ Masyarakat merasa senang adanya pemasangan wifi ini, terutama anak-anak muda. Kalau sore rame sini mbak. Kalau pagi kan masih sekolah. Apalagi kalau malem, rame banyak orang ngumpul disini wifian. Jadi sangat terbantu dengan adanya jaringan wifi ini. Ada yang ngumpul di balai desa, ada juga yang diwarung kopi depan situ”. (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Saudara Elnatan menambahkan bahwa kehadiran wifi di Kantor Pemerintah Desa Pulosari ini sangat membantu namun kadang wifi *trouble* pengaruh cuaca sehingga loading nya menjadi lama: “ Kita senang ada wifi, sangat membantu mbak tapi ya itu kalau hujan sangat lemot. Tapi masih mending daripada datang ke warnet mbak, saya senang dengan adanya pemasangan wifi ini. Sangat sangat membantu” (hasil wawancara 31 Desember 2016).

Saudara Tikno mempertegas pendapat Saudari Feni dan Saudara Elnatan bahwa: “Kalau jaringan yang disediakan di Balai Desa lancar mbak, lemot ketika cuaca aja. Ya bisa maklum kalau itu, tapi kira bersyukur adanya wifi ini, kita bisa

memanfaatkannya jadi bukan pemerintah desa saja, ya Alhamdulillah pokoknya mbak. hehehe” (hasil wawancara 31 Desember 2016).

Atas beberapa penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa jaringan wifi di Desa Pulosari sudah dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pemerintah Desa Pulosari sudah berupaya sebisa mungkin memaksimalkan penggunaan wifi tersebut, dan akan menambah jangkauan wifi sampai sedesa sehingga seluruh masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan wifi tersebut.

2. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keternukaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan hak dari masyarakat. Sehingga, sudah kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai asas keterbukaan informasi publik. *Website* SID dibentuk dengan tujuan sebagai media informasi resmi tentang desa, yang dibangun dan dikelola oleh tim desa setempat. Selain itu, penyelenggaraan SID di desa, meliputi tiga hal yaitu: meningkatkan pengolahan data dan informasi yang terhimpun didalam sistem SID, membantu untuk melakukan pelayanan publik, perencanaan pembangunan dan pemetaan situasi untuk pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Ada tiga indikator untuk mengetahui efektivitas penerapan SID yaitu:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan terdiri dari tiga faktor penentu yaitu: kurun waktu pencapaian yang ditentukan, sasaran yang merupakan target kongkrit dari tujuan yang ditetapkan, dan dasar hukum. SID bersifat *opensource* atau gratis bagi siapa

saja yang mau menerapkan aplikasi tersebut yang tujuan awalnya adalah untuk mengelola sumber daya data yang ada di desa agar desa menjadi mandiri. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Widodo selaku anggota CRI Sidoarjo, yaitu:

“Tujuan SID yaitu agar desa mandiri secara data dan tertib administrasi. Basis yang digunakan adalah *offline* meskipun beberapa desa sudah menggunakan secara *online* guna mengefektifkan pelayanan serta transparansi publik. Adanya SID online ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi desa. Saat ini desa diwajibkan untuk lebih transparan mbak sehingga SID ini diharapkan dapat memudahkan desaa untuk mencapai transparansi tersebut. SID ini juga dapat meningkatkan efisiensi biaya, jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan menerapkan SID ini” (hasil wawancara 03 Januari 2017).

Bapak Nurul menambahkan bahwa tujuannya yang pertama adalah untuk pelayanan yang kemudian untuk keterbukaan informasi dengan adanya *website* desa. Berikut pernyataan beliau:

“Tujuannya ya untuk, yang pertama untuk pelayanan, kedua terus untuk perkembangan desa ya kayak pemetaan kondisi dan potensi desa. Biar desanya ini mungkin muncul ragam-ragam terutama wisata yang ada di desa pulosari, yang ikonnya jombang. Kedua warga dapat menemukan tempat-tempat yang ada di pulosari seperti mungkin bisa di yang diapa itu “gua”, iya bisa seperti di sigolo-golo. Selain itu, tujuan SID tidak lain ya untuk penguatan pengawasan pembangunan mbak, soalnya dengan *website* SID ini masyarakat dapat mengakses kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Dengan begitu kita berusaha untuk mencapai transparansi desa mbak”. (hasil wawancara 27 Desember 2016).

Berdasarkan pendapat dan penjelasan Bapak Widodo dan Bapak Nurul dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan SID yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemudian menuju transparansi desa dengan adanya *website* desa tersebut. Menurut masyarakat,

dengan adanya SID ini menjadi lebih transparan, seperti yang dijelaskan oleh Saudara Sudiono bahwa:

“ Kalau menurut saya sudah transparan mbak, dilihat dari informasi-informasi tentang anggaran desa, ADD, program, terutama program pembangunan fisik, jadi dipampangkan di SID itu, pembangunan fisiknya itu apa saja, bahkan RAPnya jg ditampilkan juga di SID. Jadi menurut saya sudah menuju transparansi”. (hasil wawancara 03 Januari 2017).

Anggaran yang awal mulanya merupakan bersifat rahasia, namun dengan SID masyarakat dapat mengetahui anggaran yang ada di Desa Pulosari. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Widji bahwa:

“Kami sudah menampilkan anggaran di *website* mbak. Tapi Sementara itu dari Pemerintah Desa dan PKK, yang lain belum berani transparan. Dalam satu tahun ini mungkin saya tidak mengupdate fisik sama sekali. Kalau mulai tahun depan mungkin banner dan sebagainya sudah dianggarkan disiapkan, transparansi terkait APBDes tidak hanya dimedia online saja tapi secara kondisi real, melalui kesepakatan bersama. Ini kan tuntutan baik dari desa maupun lainnya, kalau perlu dari masjid-masjid.”(Hasil wawancara 21 Desember 2016).

Saudari Feni selaku masyarakat menambahkan bahwa selain itu, setiap program atau kegiatan yang dilakukan di Desa Puosari sudah di *update* di *website* desa, sehingga keterbukaan informasi menjadi sangat lebar. “ Setiap kegiatan atau program gitu langsung di *update* di *website* mbak, kayak seperti kemarin lomba-lomba. Terus kegiatan ibu-ibu PKK senam”. (Hasil wawancara pada 23 Desember 2016).

Penerapan SID di Desa Pulosari sudah memenuhi sasaran bagi sebagian masyarakat desa yang mengerti internet. Dalam penerapan SID tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam penerapannya, tapi aparat pemerintah

desa berusaha untuk memperbaikinya. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya

SID ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rokim bahwa:

“ Syukur Alhamdulillah program SID ini memang betul-betul digunakan, masyarakat sendiri senang, mengurus surat lebih cepat. Dengan adanya program SID ini membantu pelayanan masyarakat juga mempermudah program-program pemerintah desa, kecamatan, kabupaten. Juga termasuk memudahkan kita mencari data penduduk dengan mudah ketika diminta oleh dinas terkait, termasuk daftar kemiskinan disana. Diprogram ini, berapa yang miskin, kelas menengah atas, akan muncul sehingga data itu valid, tidak bisa direkayasa. Semuanya kita serahkan ke Pak Widji selaku operator SID. Selain itu, kehadiran *website* ini masyarakat jadi tau mbak kegiatan yang ada di desa. Masyarakat tidak akan curiga terhadap pemerintah desa, kepercayaan masyarakat menjadi naik sehingga timbul hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah Desa Pulosari sendiri. Harusnya sudah tidak ada lagi alasan desa untuk tidak menerapkan SID ini mbak karena melihat manfaatnya sungguh luar biasa”.(hasil wawancara 20 Desember 2016).

Penerapan SID merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa yang menyebutkan bahwa desa berhak memperoleh Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota, Sistem Informasi Desa tersebut terdiri dari *software*, *hardware* serta pelatihan sumber daya aparatur. Dasar hukum dalam penerapan SID di Desa Pulosari sendiri selain dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tersebut, juga mengacu pada Surat Edaran Bupati Jombang tanggal 2 Mei 2016 Nomor: 140/ 1678/ 415. 40/ 2016 hal pemanfaatan Sistem Informasi Desa. serta Keputusan Kepala Desa Pulosari Nomor : 140 / 14 / 415. 72 . 10 / V / 2016 tentang pengangkatan operator Sistem Informasi Desa dan profil desa. Pernyataan tersebut seperti yang dipaparkan oleh Bapak Supar bahwa: “ Dasar hukumnya penerapan UU No 6 Tahun 2014 mbak, selain itu ada surat edaran Bupati juga. Dari keputusan kepala desa juga ada mbak. Harusnya sudah tidak ada alasan lagi

sebuah desa untuk tidak menerapkan SID di desanya mbak” (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Berdasarkan amanat peraturan tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi desa untuk menerapkan SID di desanya. Jumlah pengunjung *website* Desa Pulosari berdasarkan data pemerintah Desa Pulosari 2016 kurang lebih 140 pengunjung setiap harinya. Pengunjung tidak hanya berasal dari negara sendiri yaitu Indonesia, melainkan juga berasal dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Kanada dan negara lainnya seperti yang tercantum pada gambar berikut:



Gambar 11. Data Statistik Pengunjung Website Desa Pulosari

Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat cukup besar dalam mengakses *website* Desa Pulosari. Pengunjung website bukan hanya berasal dari Negara Indonesia saja melainkan juga berasal dari luar negeri seperti Amerika Serikat dan Kanada. Negara tersebut tertarik dengan *website* Desa Pulosari karena desa bagian terkecil dari pemerintahan namun dapat

meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui *website*. Jumlah pengunjung tersebut menjadikan pemerintah Desa Pulosari lebih bersemangat lagi untuk menerapkan SID di desanya. Aplikasi SID, dapat juga diakses melalui *smartphone* kita melalui aplikasi SID android sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.

b. Integrasi

Integrasi berhubungan dengan sosialisasi, pengembangan serta komunikasi dengan pihak lain. Integrasi sendiri ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: prosedur, proses, sosialisasi. Penerapan SID di Desa Pulosari didasarkan pada amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 sebagai acuan dalam penerapan selama ini. Desa Pulosari menjadikan peraturan tersebut sebagai acuan dalam menerapkan SID. Terkait *Standart Operating Procedure* (SOP) untuk operasionalnya masih belum ada. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Widji bahwa: “Belum ada SOP terkait dengan penerapan SID di Desa Pulosari, ini baru inisiatif desa. Mungkin akan dibuat SOP mengenai penerapan SID.” (hasil wawancara 08 Desember 2016).

Terkait dengan proses penerapan SID ini meliputi beberapa tahap atau proses yang cukup panjang, apalagi Desa Pulosari merupakan desa pemula. Proses tersebut yaitu:

1. Persiapan penerapan SID
2. Menyiapkan perangkat pendukung
3. Menyiapkan aturan pendukung
4. Menyiapkan SDM aparatur desa

5. Menginstal aplikasi SID
6. Mempersiapkan data desa dan kependudukan
7. Memasukkan data
8. Mempersiapkan bahan yang akan ditampilkan diwebsite
9. Mempersiapkan peluncuran layanan SID

Hal tersebut seperti dengan pemaparan Bapak Nurul, bahwa:

“ Proses penerapan SID ini cukup panjang sekali, mulai dari tahap penerapan SID dengan membentuk tim pengembangan aplikasi ini, terus mempersiapkan anggaran. Anggaran ini selalu ada saja mbak pengeluarannya pas awal-awal. Kemudian setelah itu menyiapkan perangkat pendukung kayak computer itu. Dulu komputer pas mbak sesuai jumlah aparatur tapi sekarang berkurang soalnya ada yang rusak. Jadi ini saya biasanya memakai laptop. Setelah SDM dan hardware siap, selanjutnya menginstal Aplikasi. Tim yang kita bentuk tadi bagi tugas untuk melengkapi data kependudukan, setelah data sudah siap dan memenuhi kita buat website itu mbak. Kemudian karena kita sebagai pendahulu yang menerapkan SID, *launching* SID di Kabupaten Jombang dilakukan disini. Pak Bupati memberikan jempol pada Desa Pulosari. Syukur Alhamdulillah itu mbak. Suatu penghargaan buat kami untuk terus berkembang dan maju.” (hasil wawancara 27 Desember 2016).

Pendapat Bapak Nurul dipertegas oleh Bapak Widji bahwa:

“ Proses penerapan SID ini sangat panjang mulai dari proses persiapan sampai *launching* SID itu sendiri. Ini yg membuat pemikiran Kabupaten, hari terakhir penempatannya di Pulosari sekaligus launching. Pak Bupati memberikan jempol lah ke Pulosari, yang mana mampu mengajak temen-temen paling tidak bersama-sama memberikan meningkatkan pelayanan serta keterbukaan di *website* melalui SID. (hasil wawancara 13 Desember 2016).

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam penerapan SID di Desa Pulosari referensi serta SOP masih belum ada. Selain faktor prosedur dan proses dalam integrasi terdapat faktor sosialisasi. Tujuan

diadakannya sosialisasi itu sangat banyak, salah satunya yaitu agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah Desa Pulosari sedang menerapkan SID untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Rokim bahwa:

“ Kita mengadakan sosialisasi ini agar masyarakat itu tau tentang SID, mengapa SID itu perlu diterapkan, fungsi SID itu apa. Jadi biar masyarakat juga mendukung adanya SID ini di Desa Pulosari. Jadi dengan begitu kan informasi menjadi lebih terbuka. Sudah tidak ada rahasia-rahasiaan. Aparatur pemerintah desa juga dengan begitu akan maksimal dalam bekerja karena dapat dipantau kegiatannya lewat website yang disediakan desa.”(hasil wawancara 20 Desember 2016).

Pendapat yang hampir sama diutarakan oleh Saudara Sudiono, dan beliau menambahkan bahwa:

“ Sosialisasi SID ini perlu mbak, sangat perlu. Agar penerapannya sampai ke masyarakat. Masyarakat akan maksimal untuk menggunakannya. Sehingga transparansi terwujud. Selain itu diharapkan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan mbak. Biar lebih aktif. Jika ada kesalahan dapat langsung dikomplain di pemerintahan desa” (hasil wawancara 29 Desember 2016).

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pulosari dilakukan dua kali, yaitu dengan cara mendatangkan Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), yang kemudian memberikan wewenang Kepala RT dan RW tersebut untuk menyampaikan informasi tersebut kepada warganya. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Supar bahwa:

“Sosialisasi kepada masyarakat sudah, rata-rata, pemuda itu tau. Kalau masyarakatnya tadi yang sudah saya katakan segi pendidikan itu ya tidak tau. Padahal setiap kegiatan yang dilakukan PKK, budayanya, temuat diwebsite. Sosialisasinya sudah dua kali tapi tidak langsung ke masyarakat tapi lewat RT atau RW, lewat tokoh masyarakat tentunya

kayak perangkat juga terlibat bapak RT, RW. Tapi ya balik lagi mbak. RT, RW disini aja masih sedikit yang mengerti internet. HPnya masih jadul-jadul, belum smartpone.” (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Pernyataan Bapak Supar dipertegas oleh Bapak Nurul bahwa: “ Kalau sosialisasinya sudah mbak. Dua kali ya kita kalau kita rapat RT RW itu mbak. SID mulai diterapkan, adanya wifi, yang muda kesini mbak.”(hasil wawancara 27 Desember 2016).

Terkait dengan sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Pulosari tersebut dirasa masih sangat kurang oleh warga. Penerapan kurang lebih satu tahun tapi sosialisasi hanya dua kali, dan itupun melalui RT atau RW. Sehingga masyarakat Desa Pulosari sendiri masih merasa awam terhadap apa itu SID. Hal tersebut dikatakan oleh Saudari Putri selaku masyarakat bahwa:

“ Saya tidak terlalu tau tentang SID mbak, mungkin sosialisasi pernah tapi gak tau berapa kali. Mungkin Cuma dua kali aja. Itupun RT RW nya mbak. Jadi warga sini banyak yang gak tau tentang SID mbak. Yang tau paling ya yang sering wifian di Kantor Balai Desa aja. Apalagi yang tua-tua jelas banyak yang gak taunya.” (hasil wawancara 21 Desember 2016).

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh saudara Andi selaku masyarakat bahwa:

“ Pemerintahnya kurang bersosialisasi pada masyarakat. Orang yang uda tua-tua gak tau program itu mbak. Kita aja yang muda gini paling yang tau cuma beberapa. Orang lain di Desa Pulosari malahan yang sering ngunjungi *website* nya mbak. Saya tidak pernah tau penyelenggaraan sosialisasi itu mbak” (hasil wawancara 31 Desember 2016).

Saudara Sudiono juga mempertegas pendapat Saudari Putri dan Andi bahwa:

“Masih kurang sosialisasi terutama untuk mereka-mereka yang tidak mau tau

dengan internet kan belum bisa merasakan sosialisasi” (hasil wawancara 03 Januari 2017). Sosialisasi tentang adanya penerapan SID di Desa Pulosari memang sangat diperlukan. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat Desa Pulosari sendiri dapat mengetahui bahwa di desanya ada penerapan SID.

c. Adaptasi

Adaptasi berkaitan dengan proses menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada dua faktor yang mempengaruhi adaptasi, yaitu: peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Awal penerapan SID di Desa Pulosari mengalami kesulitan karena aparatur desa kebanyakan tidak ada yang mahir dalam bidang IT. Namun setelah satu bulan, dan belajar di Jogja sehingga sudah dapat menyesuaikan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Widji bahwa:

“ Kami memaksakan diri, dasarnya dari Kemendagri.awalnya dalam satu bulan ini kita tidak bisa menyesuaikan, karena memang keterbatasan. Kami tidak ada yang berlatar belakang IT. Namun setelah kita coba-coba Alhamdulillah bisa. Setelah belajar dari Jogja sana kita bisa menyesuaikan diri. Alhamdulillah selang 1 bulan temen-temen dari Jogja kesini” (hasil wawancara 08 Desember 2016).

Sebelum menerapkan SID di Desa Pulosari, aparatur pemerintah Desa Pulosari belajar dari pemateri dari Sidoarjo dan kemudian memutuskan untuk menimba ilmu di Yogyakarta. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Bapak Rokim bahwa:

“ Pak Sekdes kita tertarik dengan SID tersebut dan mencoba mencari jalan keluar program ini. Kita datang ke Sidoarjo untuk mencari narasumber yang memberi materi pada waktu pelatihan. Saya menyadari bahwa SID ini penting sekali, jadi saya sangat mendukung apapun untuk menerapkan SID. Sampai-sampai, kita nekat berangkat ke jogja

menggunakan mobil siaga desa untuk belajar SID. Kita berangkat awalnya 5 orang mbak. Setelah belajar disana kemudian ada tindaklanjut dari BPMPD setelah itu mengecek-ngecek ternyata SID di Pulosari berjalan sehingga launching penutupan SID dilakukan di Desa Pulosari.”(hasil wawancara 20 Desember 2016).

Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jombang memberikan pelatihan kapasitas aparatur pemerintah desa sehingga desa merasa terbantu dengan adanya pelatihan tersebut. Pelatihan aparatur desa tersebut diadakan oleh BPMPD beberapa kali dengan beberapa cluster. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nurul bahwa:

“ BPMPD memberikan pelatihan kapasitas aparatur pemerintah desa mbak sebelum penerapan SID ini, pelatihannya dilakukan beberapa kali. La awalnya kita tahu SID ini juga dari BPMPD itu. Pengenalan awal kami dari situ. Kemudian kami menerapkan SID ini dan belajar di Jogja” (hasil wawancara 27 Desember 2016)

Terkait dengan optimalnya SID ini, Kepala Desa Dlingo mengungkapkan bahwa SID akan optimal setelah 3 tahun penerapan karena semua hal butuh proses apalagi sebagai pemula. Hal tersebut seperti yang dikatakan Bapak Widji bahwa:

“Kepala Desa Dlingo itu juga menyampaikan bagaimana perubahannya namun akurasi data itu bisa optimal 3 tahun, dulu ada yang mengawali dengan door to door masing-masing respon kita tanyai, pemula ini lama,Memang butuh waktu lama. Dikota pun juga belum tentu tahu dan paham. Dari kurang dan lebih, sebenarnya msh Perlu banyak yang dibenahi, lambat laun mungkin, la wong msh satu tahun” (hasil wawancara 13 Desember 2016).

Sebelum adanya SID di Desa Pulosari, informasi pemerintah desa disediakan melalui papan pengumuman yang ada di kantor pemerintah desa. Terkait hal anggaran belum dipampangkan dalam papan pengumuman tersebut. Namun dengan adanya SID, anggaran sudah menjadi rahasia umum sehingga

masyarakat yang mengakses SID dapat mengetahuinya. Memang penerapan SID di Desa Pulosari ini memiliki banyak manfaat, sehingga desa-desa lain yang belum menerapkan segera untuk menerapkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rokim bahwa: “Dulu sebelum adanya SID ya melalui papan pengumuman mbak, semuanya masih serba manual. SID ini memiliki banyak manfaat. Syukur Alhamdulillah SID ini sangat membantu Desa Pulosari. Harapan kami semoga desa lain yang belum menerapkan untuk segera menerapkan”. (hasil wawancara 20 Desember 2016).

Sebelum penerapan SID, jumlah komputer 7 buah dan masih dapat dipakai semua namun seiring berjalannya waktu, jumlah komputer hanya berjumlah dua buah, yang layak dipakai hanya satu buah. Sehingga pemerintah Desa Pulosari menganggarkan sebuah laptop dalam penerapan SID. Dan memasang wifi untuk pengoptimalan data, karena data tidak akan valid tanpa diupgrade melalui internet. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nurul bahwa:

“Dulu komputer ada 7, kemudian sekarang masih 2, yang bisa dipakai 1. Tapi ketika awal menerapkan SID kita menganggarkan laptop 1 buah untuk menunjang SID ini mbak. Kalau laptop kan enak dibawa kemana-mana. Selain itu kita juga memasang wifi untuk menunjang validitas data SID karena SID ini akan valid kalau selalu di *upgrade* melalui internet”. (Hasil wawancara 23 Desember 2016).

SID memang memiliki banyak manfaat dan membawa banyak perubahan yang baik pada Desa Pulosari, namun masyarakat Desa Pulosari sendiri masih banyak yang belum dapat menikmati SID tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tau tentang internet. Seperti yang diungkapkan oleh Saudara Tikno bahwa:

“Setau ku sih mbak SID ini memiliki banyak manfaat mbak, tapi banyak yang tidak tau tentang apa itu SID. Mereka taunya mengurus surat sekarang menjadi lebih cepet. Tapi banyak yang gak tau tentang *website* SID Desa Pulo sendiri. Soalnya masyarakat banyak yang tidak tau tentang internet. Terlebih yang tua-tua mbak. Kalau yang muda kayak saya ini ya masih banyak yang tau lah. Hehe.” (hasil wawancara 31 Desember 2016).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Pulosari masih banyak yang belum tahu tentang penerapan SID di desanya sehingga mereka belum dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Sedangkan sarana prasarana, berkaitan dengan sumber daya *hardware* dan *software* dalam menunjang penerapan SID di Desa Pulosari sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber daya *hardware* kurang memadai namun sumber daya *software* sudah baik dan tidak pernah ada kendala.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, dalam penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhinya. Baik faktor pendukung dari segi internal maupun eksternal.

1) Komitmen Pimpinan Kepala Desa Pulosari

Kepala Desa Pulosari sangat berantusias dan mendukung penerapan SID ini. Apapun dilakukan oleh Kepala Desa agar desanya menjadi maju dan lebih terkenal lagi. Seperti penjelasan dari Bapak Nurul bahwa:

“ Dalam penerapan SID tentu saja tidak lepas dari faktor pendukung mbak, ntah itu pendukung dari dalam maupun dari luar pemerintah desa. Kalau faktor pendukungnya dari pihak Kepala Desa mbak, beliau sangat antusias untuk mengembangkan sistem ini. Pokok apapun akan dilakukan untuk menunjang prestasi pemerintahan desa. Ya kami sangat bersyukur atas hal itu mbak. Soalnya banyak juga diluar desa sana sistem ini tidak jalan karena kurang kompak aparturnya, masih menunggu pemkab dulu baru jalan.” (hasil wawancara 27 Desember 2016).

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Saudara Elnatan bahwa: “ Pak Lurah sangat mendukung mbak apalagi untuk mencapai prestasi. Bahkan dulu awal-awal input data sampai lembur-lembur gitu” (hasil wawancara dengan Saudara Elnatan 31 Desember 2016). Saudara Tikno menegaskan pendapat Saudara Elnatan bahwa “ Mendukung, sangat mendukung pak Lurah itu mbak, apapun dilakukan untuk berhasil”. (hasil wawancara dengan Saudara Tikno 31 Desember 2016).

Bentuk dukungan dari Kepala Desa Pulosari salah satunya adalah Surat Keputusan Kepala Desa Pulosari Nomor 140/ 14/ 415. 72. 10/ V/ 2016 Tentang pengangkatan Operator Sistem Informasi Desa dan Profil Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Widji bahwa: “Kepala Desa sangat mendukung sekali mbak terkait penerapan SID ini. Ya salah satu bentuk dukungan itu melalui Keputusan Kepala Desa itu mbak, sangat antusias.” (hasil wawancara 08 Desember 2016). Kepala Desa Pulosari mendukung apapun untuk mencapai prestasi di desa nya, sehingga SID di Desa Pulosari masih tetap berjalan daripada desa-desa lain yang ada di Kabupaten Jombang.

2) Dukungan dari Dinas Terkait

Diluar pemerintah Desa Pulosari, dukungan penerapan SID juga berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah dan Desa (BPMPD) selaku badan yang menaungi SID di Kabupaten Jombang. BPMPD menganjurkan bahwa semua desa yang ada di Kabupaten Jombang harus memakai SID karena SID ini memiliki banyak manfaat jika benar-benar diterapkan di desa. Seperti penjelasan dari Bapak Supar bahwa:

“ Sangat mendukung sekali badan terkait, seperti instansi BPMPD, ya pemberdayaan pememerintah desa itu sangat mendukung sekali, bahkan launchingnya disini ya. Bahkan dianjurkan Jombang harus pakai SID jadi mengerti kegunaan dan manfaat SID seperti itu.” (hasil wawancara 23 Desember 2016).

Bapak Widji menambahkan, BPMPD memberikan dukungan berupa pemberian pelatihan aparatur pemerintah desa mengenai SID. Pelatihan tersebut dilaksanakan beberapa kali, dengan membagi beberapa desa yang ada di Kabupaten Jombang menjadi beberapa cluster. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten juga memberikan dukungan berupa pemberian data kependudukan. Berikut pernyataannya:

“Kita selalu dulu daripada yang lain. BPMPD awalnya memberikan pelatihan serentak sekabupaten Jombang mengenai SID, tiap desa harus ada perwakilan. Kemudian, inisiatif BPMPD untuk mengulagi pelatihan pemberdayaan aparatur desa, tidak serentak lagi, hanya dicluster menjadi 8 kalau tidak salah dari 21 kecamatan, diawali Jombang Kota. Alhamdulillah kita juga dapat dukungan berupa data dari catatan sipil, padahal di undang-undang data kependudukan tidak boleh disebarluaskan” (hasil wawancara 08 Desember 2016).

Desa Pulosari ini merupakan Desa percontohan di Jombang karena telah sukses menerapkan SID di Jombang. Bupati Jombang memberikan DAK (Dana

Alokasi Khusus) untuk Desa Pulosari atas penerapan SID pada *launching* SID di Desa Pulosari. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh Bapak Widji:

“Pak Bupati sangat mendukung dan sangat apresiasi. Apresiasi dr Pak Bupati kita diberi bantuan keuangan khusus 75 juta sebagai bentuk terima kasihnya. Ya sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Dihadiri 302 desa 21 camat, masing-masing SKPD. Tidak bisa mengundang masyarakat RT atau RW dalam *launching* di Desa Pulosari ini karena tidak muat. Alhamdulillah sukses. Bupati memberi jempol pada Pulosari. Pulo ini menjadi contoh desa di Jombang soalnya kita lebih dahulu dan SID di Pulo masih berjalan sampai saat ini” (hasil wawancara 13 Desember 2016).

Pernyataan yang hampir sama oleh Bapak Rokim bahwa:

“ Pak Bupati memberi jempol pada Desa Pulosari saat *launching* SID mbak, kami merasa bangga akan hal itu. Karena Desa Pulosari ini satu-satunya di Jombang yang sudah menerapkan SID sampai *online* dan berjalan sampai saat ini. Pak Bupati memberi uang 75 juta sebagai ucapan terima kasih kepada Pulosari karena sudah mau menyediakan tempat untuk *launching* SID serta menerapkan SID terlebih dahulu dan menjadi contoh desa lain” (hasil wawancara 20 Desember 2016).

Bapak Nurul mempertegas pernyataan Bapak Widji dan Bapak Rokim bahwa:

“Sangat mendukung sekali seperti instansi BPMD ya pemberdayaan pemerintah desa itu sangat mendukung sekali ya, bahkan *launchingnya* disini ya. Bahkan dianjurkan Jombang harus pakai SID jadi mengerti kegunaan dan manfaat sid seperti itu. Pak Bupati datang pas waktu *launching* SID di Pulo ini. Diharapkan desa-desa lain juga dapat menerapkan SID di desanya. Pulosari dikasih DAK dari pemerintah Jombang 75 juta. Ya walaupun tidak seberapa karena waktu peluncuran itu kan juga butuh anggaran banyak tapi kami bersyukur. Pulosari menjadi percontohan desa desa di Jombang mbak.” (hasil wawancara 23 Desember 2016).



Gambar 14. Launching Sistem Informasi Desa Pulosari
Sumber: Data Sekunder (Dokumen Pemerintah Desa Pulosari 2016)

Combine Resource Institute (CRI) sebagai komunitas perintis SID di Indonesia, juga memberikan dukungan terhadap penerapan SID di Desa Pulosari, dukungan tersebut dengan memberikan pembelajaran mengenai SID. Mengundang aparat desa Pulosari untuk bergabung dalam jagongan rakyat yang diadakan oleh CRI itu sendiri. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Widji bahwa:

“besoknya kita mendapat undangan di Jogja ada acara jagongan media rakyat dimana ada perubahan versi teman teman grup di facebook kan ada. Kita tidak dipungut biaya. Tapi fasilitas ya gitu. Tidak hanya sekedar SID tapi terkait banyak hal, terkait media, kemahasiswaan tapi ada keterkaitan lah.” (hasil wawancara 13 Desember 2016).

Beberapa faktor pendukung yang telah dijabarkan diatas memang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan penerapan SID di Desa Pulosari. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak yang terkait untuk saling melakukan kerja sama agar penerapan SID ini tetap berjalan dan sukses.

3) Sumber Daya Jaringan

Koneksi internet merupakan suatu hal yang penting dalam penerapan SID karena data administrasi kependudukan akan menjadi optimal dengan adanya koneksi internet. Selain itu untuk mengupload artikel diinternet tentunya juga membutuhkan koneksi internet. Seperti penjelasan Bapak Nurul bahwa:

“ Keberadaan internet ini sangat penting mbak terutama untuk mengoptimalkan data yang ada di SID, memang SID ini bisa digunakan secara offline tapi tentunya data tersebut tidak akan valid jika tidak ada internet untuk pembaharuan data. Untuk mengaplud artikel-artikel desa ini kan juga tidak terlepas dari koneksi internet” (hasil wawancara 27 Desember 2016).

Penjelasan Bapak Nurul dipertegas oleh Bapak Rokim bahwa: “ Tentunya dengan adanya internet ini sitem akan saling terintegrasi, sehingga data akan valid. Peggunaan koneksi internet ini digunakan untuk ranah *online* mbak yang secara otomatis akan menjadi *website* desa itu” (hasil wawancara 20 Desember 2016).

Koneksi internet yang digunakan oleh pemerintah Desa Pulosari adalah jaringan wifi. Masyarakat terbantu dengan adanya pemasangan wifi di Desa Pulosari karena dengan membayar seribu rupiah masyarakat dapat menggunakan wifi selama dua jam. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Widji bahwa:

“ Kita menggunakan wifi agar dapat menjangkau masyarakat. Walaupun belum gratis, tapi kami menyediakan voucher internet mbak seribu rupiah untuk dua jam. Tentunya hal tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat terutama yang muda-muda itu. Kebanyakan mereka kesini sore atau malam hari. Rame mbak kalau sore atau malam hari gitu. Kalau tidak ada koneksi internet data tidak akan valid. Jadi wifi ini sangat membantu dalam penerapan SID” (hasil wawancara 08 Desember 2016)

Pernyataan yang hampir sama diungkapkan oleh Saudara Ulum bahwa:

“ Kita sangat senang dengan pemasangan wifi ini mbak soalnya kalau di warnet kan mahal, ada wifi juga jauh dari sini mbak, di Mojowarno. Jadi kami sangat senang mbak hanya bayar seribu uda bisa menikmati wifi dua jam.” (hasil wawancara 31 Desember 2016).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan wifi tersebut sangat membawa manfaat baik bagi pemerintah desa maupun bagi masyarakat Desa Pulosari. Pemerintah Desa Pulosari menyediakan voucher seribu rupiah untuk dua jam. Koneksi internet merupakan salah satu faktor pendukung dalam penerapan SID di Desa Pulosari karena tanpa internet, data tidak akan valid.

b. Faktor Penghambat:

Selain pendukung dalam penerapan SID di Desa Pulosari, terdapat pula faktor penghambatnya. Faktor penghambat tersebut antara lain:

1) Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pulosari masih kurang. Masyarakat tidak mengetahui apa itu SID karena sosialisasi masih kurang. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Saudara Ulum bahwa: “ masyarakat banyak yang tidak tahu tentang SID mbk karena sosialisasi kurang, dulu pernah acara launching SID itu juga tidak melibatkan masyarakat setempat.” (hasil wawancara 31 Desember 2016).

Hal yang hampir sama seperti yang diungkapkan Saudara Sudiono bahwa “ Sosialisasi 2 kali melalui RT RW. Sosialisasi ini kan perlu ya mbak agar

masyarakat mengetahui apa itu SID, bagaimana itu SID. Kalau masyarakat desa sini tidak tahu ya percuma juga.” (hasil wawancara 29 Desember 2016).

Saudara Iqbal dan Saudari Putri mempertegas pendapat saudara Ulum dan Saudara Sudiono bahwa: “ Sosialisasi kurang mbak. Aku aja gak tau sosialisasinya berapa kali.” (hasil wawancara 31 Desember 2016). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pulosari hanya dua kali, dan hanya melalui ketua RT atau RW saja sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu dalam penerapan SID tentunya hal tersebut menjadi penghambat dalam penerapan SID karena tujuan tidak akan tercapai kalau masyarakat Desa Pulosari sendiri sebagai pengguna akhir tidak mengetahui penerapan SID di desanya.

2) Kualitas sumber daya manusia pemakai

Masyarakat Desa Pulosari masih banyak yang tidak mengetahui apa itu SID karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Saudara Andi bahwa: “ masyarakat banyak yang gak tau SID mbk soalnya sosialisasi kurang”. (hasil wawancara 31 Desember 2016). Pernyataan tersebut dipertegas oleh Saudara Elnatan bahwa: “ sosialisasi tidak tau aku mbak, kayaknya satu atau dua kali. Masyarakat masih banyak yang belum tau SID”. (Hasil wawancara 31 Desember 2016).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor penghambat dalam penerapan SID di Desa Pulosari berkaitan dengan kualitas sumber daya pemakai yaitu masyarakat Desa Pulosari. Masyarakat Desa Pulosari sebagian tidak mengetahui tentang penerapan SID di desanya. Seperti yang sudah

dijelaskan sebelumnya pada kualitas sumber daya pemakai masih sangat kurang, hanya sebagian yang mengerti internet. SID merupakan sebuah program yang sangat bagus dengan banyak manfaat namun tidak dapat dikatakan berhasil jika masyarakat Desa Pulosari sendiri tidak mengetahui apa itu SID. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Pulosari tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa. Sehingga Pemerintah Desa Pulosari diharapkan segera bersosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan SID ini.

3) Kurangnya Koordinasi dan Kerjasama Pendamping Desa Pulosari

Penghambat dalam penerapan SID di Desa Pulosari selain kualitas SDM pemakai adalah tidak maksimalnya pendamping desa dalam mendampingi desa. Desa Pulosari tidak terbantu dengan adanya pendamping desa karena koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah desa masih kurang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Widji bahwa:

“ Kita butuh pendampingan yang jelas apalagi hari ini kan pendampingnya tidak jelas, bayangkan ada pendamping lokal. Satu pendamping mendampingi dua desa tapi keliling sekecamatan kenapa tidak mengoptimalkan yang di dua desa itu tadi. Walaupun secara kelembagaan ngumpulnya di kecamatan. Kesini minta SKPD, gajinya 2,3 gaji saya Cuma 1,6 itu kan mubadzir kayak gitu, sia sia. Itu baru pendamping tingkat lokal desa bukan kecamatan. Bukan tenaga ahlinya. Harusnya kalau ada pendampingan kan ini masih dalam tahap perencanaan, uda ada musrebang harusnya kan didampingi, bagaimana usulan yang baik, tatkala ditengah-tengah cair , sudah terealisasi komen, pendampingan desa tidak optimal, terlalu menyia-nyiakan uang negara karena bawaan partai semua ijo.” (hasil wawancara 14 Desember 2016).

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Saudara Sudiono bahwa: “pendamping desa selama ini masih belum maksimal mbak” (Hasil wawancara 29 Desember 2016).

Bapak Munir sebagai pendamping Desa Pulosari juga menyatakan bahwa pendamping desa memang lebih memberikan pengarahan terkait Dana Desa saja. “Kalau pendamping selama ini tidak begitu ada andil, ya kang ya. Awak dewe tidak terlalu ikut andil soale jarang berkaitan dengan sistem. Kita lebih pada fisik. Terutama pada dana desa. Perannya di SID masih belum ada.” (hasil wawancara 28 Januari 2017).



Gambar 15. Wawancara dengan pendamping Desa Pulosari

Sumber: Data Primer Hasil Observasi peneliti 2016

Peran pendamping desa dalam penerapan SID di Desa Pulosari masih tergolong minim. Padahal pendamping desa menurut Bapak Widodo memiliki peran yang cukup penting dalam kemajuan penerapan SID. Berikut pernyataan beliau:

“ Kalau perubahan biasanya ditentukan oleh pendamping masing-masing desa agar lebih sesuai dengan desa yang didampingi. Karena Sistem Informasi Desa ini penerapannya disesuaikan dengan kondisi desa

masing-masing. Pendamping desa disini memiliki peranan yang cukup penting dalam kemajuan penerapan SID di sebuah desa”. (hasil wawancara 03 Januari 2017).

Tugas pendamping desa yaitu mendampingi sebuah desa dalam melaksanakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. SID tercantum dalam Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 sehingga sudah kewajiban pendamping desa untuk mendampingi Desa Pulosari dalam penerapan SID di desa nya. Namun, kenyataan dilapangan bahwa pendamping Desa Pulosari tidak maksimal mendampingi Desa Pulosari dalam penerapan SID.

4) Kurangnya Sumber Daya *Hardware*

Kelengkapan sarana prasarana merupakan hal yang penting untuk mendukung penerapan SID. Kelengkapan sarana prasarana ini berkaitan dengan sumber daya *hardware* yang berupa: komputer, mesin printer, scan dan kertas. Jumlah komputer dalam penerapan SID di Desa Pulosari masih kurang memadai dilihat dari jumlahnya yang masih kurang. Pendapat tersebut diutarakan oleh Saudara Ulum bahwa: “Jumlah komputer, printer, scan masih sangat kurang mbak, harus gentian soalnya kalau mau makai” (hasil wawancara 31 Desember 2016).

Kurangnya jumlah komputer tersebut dikarenakan kurangnya perawatan yang dilakukan oleh aparaturnya desa. Biaya perawatan sarana prasarana tidak dianggarkan dalam RPJMDes sehingga komputer menjadi lebih cepat rusak. Memang dalam anggaran penerapan SID ditahun 2015-2016 tidak dianggarkan secara khusus dalam APBDDes. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Saudara Sudiono bahwa: “ Kalau anggaran kan dirumuskan dalam RPJMDesa, la

pemerintah desa tidak menganggarkan biaya pembelian komputer karena dulu komputernya banyak, dan tidak ada biaya perawatan sehingga komputer juga jadi cepat rusak. (Hasil wawancara 29 Desember 2016).

Sumber daya *hardware* merupakan penunjang utama dalam penerapan SID. *Hardware* memiliki peran penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah komputer masih belum memadai. Untuk mengupload data dalam SID harus menunggu komputer yang tidak digunakan terlebih dahulu.

D. Analisis dan Interpretasi

1. Penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik

Keterbukaan publik dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi desa merupakan hal penting dalam tata kelola yang baik dan bersih di desa. Jika sebelumnya transparansi di desa mengandalkan papan pengumuman dan pertemuan-pertemuan warga, maka di era digital seperti sekarang, materi transparansi juga dapat dipublikasikan dengan lebih cepat dan pasif melalui berkas digital. Banyak pemerintah desa yang menggunakan suatu teknologi informasi sebagai penunjang sesuai dengan kondisi masing-masing desa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penerapan suatu teknologi informasi pada saat ini memiliki banyak manfaat pada kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pemerintahan biasa disebut sebagai *e-Government*.

Melihat banyaknya manfaat yang diperoleh dalam penerapan konsep *e-Government*, seperti yang diungkapkan oleh Indarjit (2002:5) yang salah satunya adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kontrol publik sehingga tercipta *good Corporate Governance* banyak instansi pemerintah desa yang menggunakannya, desa berupaya membuat inovasi atau terobosan-terobosan guna meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui konsep *e-Government* tersebut. Salah satu wujud penerapan *e-government* adalah Sistem Informasi Desa.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbanyak ketiga yang menerapkan Sistem Informasi Desa di Indonesia. Ada 163 Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa di Jawa Timur. Sedangkan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang menerapkan Sistem Informasi Desa di Jawa Timur adalah Kabupaten Jombang. Terdapat 43 desa di Kabupaten Jombang yang menerapkan Sistem Informasi Desa. (Pemerintah Desa Pulosari 2016).

Desa Pulosari adalah salah satu desa di Kabupaten Jombang desa pandahulu dalam menerapkan Sistem Informasi Desa *online*. Sistem Informasi desa merupakan sebuah sistem yang berisi tentang data desa yang diolah atau diklarifikasikan. Data tersebut berisi tentang pembangunan desa, pembangunan kawasan desa, kegiatan, program, data kependudukan, informasi anggaran maupun data dan informasi lain yang berkaitan dengan pemerintah desa. Penerapan SID di Desa Pulosari digunakan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik karena informasi dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Seperti gagasan menurut UNDP, keterbukaan informasi publik merupakan tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung (*directly*

accessible) kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan. SID terdiri dari dua ranah yaitu *offline* dan *online* dimana ranah *online* masih terbagi menjadi dua bagian yaitu *front end* yang dapat diakses siapa saja dan *back end* hanya diakses oleh operator SID. SID *online* secara otomatis sebagai *website* desa.

Menurut Indrajit (2002:29-34) ada tiga jenis pelayanan pada *e-Government* yaitu *publish*, *interact* dan *transact*. Penerapan SID di Desa Pulosari termasuk kedalam jenis *interact* karena komunikasi terjadi dua arah. Masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah desa melalui *website* desa yang telah disediakan.

Keharusan atau kewajiban badan publik khususnya desa dalam membangun sistem informasi dalam rangka menyebarluaskan informasi publik diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “ Untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”. Selain Undang Undang tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 ayat 4 menyebutkan bahwa:

“ Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali “.

Keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh pemerintah Desa Pulosari kepada masyarakat menggunakan SID sudah baik karena setiap kegiatan

yang dilakukan oleh desa langsung diupload di *website* desa. Bahkan anggaran terutama Alokasi Dana Desa yang saat ini menjadi *trend* topik di desa juga dipampangkan di *website* desa. Hal tersebut sudah sesuai dengan bagian keempat pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 9 sampai pasal 11 bahwa keterbukaan informasi publik salah satunya mencakup laporan keuangan. Desa Pulosari dalam menerapkan SID, sudah menuju transparansi desa. *Website* Desa Pulosari memiliki dua *website* yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu *pulosari-jombang.web.id* dan *pulosari-jombang.sid.web.id*.

Penerapan SID memang diperlukan kerjasama tidak hanya dari pemerintah desa Pulosari sendiri, melainkan peran pemerintah kabupaten dan juga masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan. Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah desa dan kabupaten. Dikhawatirkan jika sinkronisasi tidak ada, ketika SID hanya dikelola oleh desa, kualitas SID dan manajemen informasi data malah mendatangkan sebuah permasalahan baru. Sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam hal data berkaitan dengan bagaimana desa mampu memperbaharui data, konten, dan informasi desa secara terus menerus atau berkelanjutan. Penerapan Sistem Informasi Desa di Desa Pulosari dilatarbelakangi oleh pelatihan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Tujuan BPMPD melakukan pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa.

Ada lima komponen menurut O'Brien (2005:34-39) yang digunakan peneliti untuk mengukur penerapan SID di Desa Pulosari, yaitu:

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia atau SDM yang biasa disebut sebagai tenaga kerja merupakan kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh tiap individu untuk bereksistensi dalam pekerjaannya. Sehingga sumber daya merupakan hal yang paling utama dalam penerapan SID. Tanpa sumber daya manusia, sumber-sumber lain tidak akan berfungsi. Seperti pendapat Susilo (2002:3) bahwa sumber daya manusia adalah penyangga utama sekaligus penggerak roda suatu organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuannya. Kualitas sumber daya menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 ayat (1) menegaskan bahwa SID dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten atau kota. Sementara pada ayat (5) disebutkan pengelolaan SID dilakukan oleh pemerintah desa. Sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten dalam undang-undang tersebut setidaknya harus menjawab kebutuhan yang terkait dengan data desa, sehingga desa menjadi lebih maju lagi. SID diharapkan dapat menghimpun data dan informasi yang berkualitas, komprehensif, dan terintegrasi. Namun, hal tersebut menjadi beban bagi desa karena saat ini, desa juga dibebani tanggung jawab untuk mengisi berbagai sistem informasi serupa SID yang masih berlaku, sehingga kesiapan aparatur desa merupakan hal yang paling utama yang harus dipertimbangkan dalam kesediaannya untuk memenuhi tanggung jawab terkait penerapan SID tersebut. Tingkat Pengguna (*user*) dalam SID meliputi:

1. Administrator

Ditentukan melalui surat edaran bupati, atau Surat Keputusan Kepala Desa masing masing. Administrator ini terdiri dari staf pemerintahan desa.

2. Operator

Terdiri dari: Staf pemerintah desa dan relawan desa (anggota karang taruna, tim siaga desa, PKK, dan lain sebagainya). Operator utama dalam penerapan SID di Desa Pulosari adalah Bapak Widji, tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Pulosari Nomor : 140 / 14 / 415. 72 . 10 / V / 2016 tentang pengangkatan operator sistem.

Operator SID memiliki tugas sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui SID
- Mengelola artikel *website*
- Mengelola komentar pada menu *website* desa
- Mencetak laporan data kependudukan (baik menu statis maupun dinamis).
- Mengelola data penduduk dan profil desa.
- Melakukan *back up database* desa dan folder desa secara rutin.

3. Redaksi

Kewenangan dan akses hanya sebatas pada olah informasi untuk *website* desa (sebagai tim media massa). Yang terdiri dari: staf pemerintah desa, relawan desa, mahasiswa, pelajar.

Penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila petugas operator memiliki kemampuan dan keahlian dalam teknologi informasi serta pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami

teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai. Hal tersebut seperti pendapat Moenir (2001:88) bahwa dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak baik organisasi maupun masyarakat secara luas. Maka dari itu, pelatihan dan pengembangan SDM sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa SDM aparatur pemerintah Desa Pulosari dalam penerapan SID dari segi kualitas dan kuantitas sudah baik, hal tersebut terbukti dari jumlah aparatur pemerintah masih dikatakan seimbang dengan jumlah penduduk Desa Pulosari. Sedangkan kualitas sumber daya manusia nya juga sudah berkualitas, dilihat dari aparatur pemerintah desa Pulosari dapat mengoperasikan komputer serta dapat menjalankan sistem SID semua. Bahkan sumber daya aparatur desa Pulosari sangat kompak dalam segala hal. Sedangkan kualitas dari pemakai SID atau secara khusus adalah masyarakat Desa Pulosari masih kurang karena masyarakat masih banyak yang tidak bisa mengoperasikan internet dan tidak paham dengan penenerapan SID di desanya sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penerapan SID di Desa Pulosari.

b. Sumber Daya *Hardware*

Sumber daya *hardware* merupakan unsur penunjang dalam penerapan SID. *Hardware* ini berupa personal komputer (PC), laptop maupun *netbook*. *Hardware* yang digunakan tidaklah harus baru, tapi paling tidak memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Intel Pentium/ Celeron Family/ AMD K6/ Athlon/ Duron Family atau processor yang kompatibel.

2. Minimal processor sebesar 233-MHz.
3. Kapasitas RAM 512 MB. Sebenarnya RAM 256 MB dapat digunakan, tapi akan mempengaruhi kinerja dari sistem
4. Ruang Hard Disk minimal 40 GB.
5. Super VGA (800 x 600) atau dengan resolusi yang lebih tinggi lagi.
6. Keyboard dan mouse yang kompatibel.
7. Wireless LAN (opsional)
8. Modem SMS (opsional) (<http://lumbungkomunitas.net/>).

Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa jumlah komputer yang digunakan oleh aparat pemerintah desa dalam penerapan SID masih belum memadai karena jumlah komputer yang dapat digunakan hanya 1 buah, laptop 1 buah. Jumlah tersebut menurut masyarakat kurang banyak. Sewaktu waktu jika ingin memakai harus menunggu terlebih dahulu. Padahal ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan 50 % kunci keberhasilan penerapan konsep *e-Government* seperti pendapat Indrajit (2002:17).

c. Sumber Daya Software

Sumber daya *software* menurut Melwin (2007:22) merupakan pengatur aktivitas kerja komputer dan semua intruksi yang mengarah pada sistem komputer. Perangkat lunak menjembatani interaksi *user* dengan komputer yang hanya memahami bahasa mesin. Perangkat lunak ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur yang saling terhubung antara yang satu dengan yang lain untuk menyelesaikan sasaran tertentu yang sudah ditetapkan. Sistem digunakan untuk menjembatani antara perangkat keras dan program aplikasi. Sistem yang ada pada SID Desa Pulosari dikelola oleh *Combine Resource Institute* (CRI) sejak tahun 2009 dengan merujuk pada lisensi *General Public*

License. Sistem yang ada di SID terdiri dari 4 versi yaitu versi 2, versi 3.0, versi 3.04 dan versi 3.10. Versi terakhir adalah versi pembaharuan dari versi-versi sebelumnya. Desa Pulosari menggunakan versi 3.04 dalam penerapan di desanya. Versi tersebut digunakan karena menyesuaikan dengan kondisi desa.

Pemahaman tentang *software* sangat penting bagi operator SID demi keberlangsungan dan pengembangan sistem. Seperti pendapat M.Scott (2004:216) bahwa pemahaman atas *software* komputer sangat penting tinimbang memahami *hardware* komputer. Alasannya karena *software* dan biaya perawatannya mahal harganya. Namun dalam penerapan SID ini, *software* didapatkan secara gratis dari CRI. Siapa saja dapat memanfaatkannya dengan tujuan nonkomersial.

Spesifikasi *Software* dan Sistem Operasi pada penerapan SID paling tidak didukung oleh:

1. Windows xp, windows 7, windows vista, windows 8 dan lain-lain.
2. Linux ubuntu, mint, cent os, opern suse, arch, fedora, sabayon, mageia, rosa dan lain-lain.
3. MAC OS X
4. Web server
 - Web server os windows: appserv, wamp, vertrigo, easyphp, xampp dan lain-lain.
 - Web server os linux: lampp, apache, nginx, lighttpd dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa selama ini dalam pengoperasian SID di Desa Pulosari, tidak ada masalah yang berkaitan dengan sistem. Sistem yang digunakan pemerintah Desa Pulosari adalah versi 3.04. Selama ini, sistem lancar dan tidak pernah ada gangguan.

d. Sumber daya data

Aplikasi SID di Desa Pulosari dirancang oleh CRI untuk mengelola data dasar desa dan informasi desa. Data dasar meliputi data dasar kependudukan dan data dasar asset atau sumber daya desa. Data dasar tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaannya. Hanya pengguna dari pemerintah desa dan tim yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa saja yang akan memiliki kewenangan dan hak akses ke dalam sistem. Sementara, *user* di luar pemerintah desa hanya akan memiliki akses terbatas pada fungsi olah informasi untuk *website* desa.

SID menyimpan data secara otomatis ketika dioptimalkan dalam ranah *online*. Sumber daya data yang ada di Desa Pulosari sudah baik dan menuju keterbukaan informasi publik, dilihat dari data kependudukan yang valid dan terus di *update* oleh operator SID sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut. Seperti pendapat Didjaja (2003:261) bahwa keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen yang perlu diketahui publik Sebelum data ditampilkan kedalam *website* desa, data di olah menjadi sebuah informasi agar bermanfaat bagi pembacanya. Seperti pendapat Oetomo (2002:13) bahwa informasi di dapat melalui hasil pengolahan data atau fakta mulai dari proses pengumpulan data sampai pendistribusian informasi.

Ketersediaan informasi Desa Pulosari menjadi mudah diakses melalui *website* desa. Warga dapat mengetahui kegiatan dan program apa yang sedang berlangsung dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain. Lebih dari itu,

masyarakat dapat mengkritik pemerintah desa secara langsung atau memberi saran, masukan, pujian melalui kolom komentar atau usulan elektronik melalui *website* desa. Anggaran yang awalnya bersifat rahasia saat ini dapat diketahui oleh siapa saja sehingga keterbukaan informasi publik menjadi lebih nyata. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2006: 136) yang mengatakan bahwa keterbukaan dalam pelayanan merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengetahui informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui informasi secara terbuka sebuah program yang dibuat atau dilaksanakan oleh pemerintah.

e. Sumber daya jaringan

Sumber daya jaringan merupakan jaringan yang menghubungkan dua atau lebih komputer sehingga saling terhubung melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga memungkinkan untuk saling berbagi data atau informasi pada perangkat keras komputer lain. Jaringan biasa disebut juga sebagai terminal komputer, tujuan dari diciptakan suatu jaringan komputer adalah untuk memudahkan pengiriman informasi atau data agar dapat diterima dengan baik oleh penerima. Jaringan komputer dapat membentuk komunikasi antara satu pihak dengan pihak lain. Berdasarkan jangkauan geografis, jaringan komputer terdiri dari 3 yaitu: Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN). Jaringan memiliki pengaruh penting terhadap kecepatan pengiriman data.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa jaringan yang digunakan oleh Desa Pulosari dalam penerapan

SID adalah jaringan wifi yang termasuk kedalam golongan jaringan LAN karena keterjangkauannya mencapai 25 meter dari pusat pemasangan wifi. Namun keberadaan wifi tersebut sangat membantu karena sebelum adanya penerapan SID, masyarakat desa terutama anak muda harus datang jauh kepusat Kecamatan Bareng. Walaupun jaringan wifi yang ada di Desa Pulosari kadang lemot, namun hal tersebut dimaklumi oleh warga sekitar karena kondisi wilayah geografis Desa Pulosari sendiri juga tidak terlalu memungkinkan untuk pemasanga wifi. Pemuda memanfaatkan wifi yang ada di Desa Pulosari ini ketika waktu senggang seperti ketika sore hari atau malam hari.

2. Efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik

Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur efektivitas penerapan SID dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan teori Duncan dalam Steers (1985:53) untuk mengukur efektivitas penerapan SID dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Indikator tersebut ada tiga yaitu:

a. Pencapaian tujuan

Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai agar apa yang dilakukan terarah dan dan lebih bermakna. Pencapaian tujuan merupakan perolehan hasil akhir yang didapatkan dalam penerapan sistem. Ada tiga faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan menurut Steers, yaitu: kurun waktu pencapaian yang ditentukan, sasaran yang merupakan target kongkrit dari tujuan yang

ditetapkan, dasar hukum. Pemanfaatan SID di Desa Pulosari oleh pemerintah desa salah satunya adalah untuk mengembangkan potensi yang ada di Desa Pulosari.

Tujuan dari penerapan SID ini pada awalnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dioptimalkan ke administrasi kependudukan seperti surat menyurat, namun saat ini berkembang menuju transparansi dengan adanya *website* desa. Melalui SID, setiap kegiatan maupun program di *upload* pada *website* desa. Desa Pulosari menerapkan SID ini mulai dari 3 Desember tahun 2015. Terhitung masih satu tahun namun perubahan perubahan yang terjadi sudah banyak. Walaupun tampilan *website* masih ala kadarnya namun sudah baik daripada desa lain yang ada di Kabupaten Jombang. Menurut Kepala Desa Dlingo yang telah berhasil menerapkan SID, optimalnya hasil penerapan SID dapat dilihat 3 tahun sejak awal penerapan. Sehingga dapat dimaklumi jika penerapannya sekarang masih belum maksimal. Kepala Desa Pulosari sangat mendukung untuk perkembangan desanya.

Sasaran penerapan SID ini secara khusus adalah masyarakat Desa Pulosari sendiri, sedangkan secara umum adalah masyarakat luas. Masyarakat dapat mengakses informasi yang disediakan oleh pemerintah Desa Pulosari melalui *website* yang dapat diakses 24 jam, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke Kantor pemerintah desa hanya untuk mengetahui informasi saat itu. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa penerapan Sistem Informasi Desa di Pulosari belum memenuhi sasaran. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui dan memahami apa itu SID di desanya. Selain itu, kualitas sumber daya manusia

masyarakat Desa Pulosari masih tergolong rendah karena tidak dapat mengoperasikan internet.

SID merupakan bagian tak terpisahkan dari keterbukaan informasi publik. Perubahan paradigma keterbukaan informasi publik membuat peran SID menjadi penting. Karena itu, perlu dikembangkan SID yang sesuai dengan visi UU Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. SID diatur secara khusus dalam UU Desa melalui Pasal 86 yang terdiri dari 6 pasal yaitu:

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Selain Undang-undang tersebut, penerapan SID di Desa Pulosari mengacu pada surat edaran Bupati Jombang tanggal 2 Mei 2016 Nomor: 140/ 1678/ 415. 40/ 2016 hal pemanfaatan Sistem Informasi Desa. Serta Keputusan Kepala Desa Pulosari Nomor : 140 / 14 / 415. 72 . 10 / V / 2016 tentang pengangkatan operator Sistem Informasi Desa dan profil desa. Surat keputusan kepala desa tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa

dalam penerapan SID di desanya. Jadi, dasar hukum penerapan SID di Desa Pulosari sudah cukup kuat dan baik.

b. Integrasi

Indikator kedua dalam efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa adalah Integrasi. Integrasi merupakan kemampun untuk mengadakan komunikasi dengan pihak lain. Ada tiga faktor yang mempengaruhi integrasi, yaitu: proses, prosedur dan sosialisasi. Prosedur merupakan komponen fisik berupa buku panduan, maupun intruksi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam hal integrasi tidak efektif karena *Standar Operating Procedure* (SOP) tidak ada, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pulosari masih kurang. Pemerintah Desa Pulosari baru akan berinisiatif untuk membuat SOP tentang SID. Padahal SOP merupakan suatu hal yang penting terutama terkait dengan sumber daya *software*. Seperti menurut Tantra (2012:216) bahwa SOP merupakan bagian dari pengembangan sistem informasi agar menghasilkan praktik yang baik karena SOP sejalan dengan *software*. Proses yang digunakan dalam penerapan SID di Desa Pulosari mengacu proses yang dianjurkan oleh CRI, mulai dari proses persiapan sampai proses peluncuran SID.

1. Langkah Persiapan
 - a. Membentuk tim pengembang SID dari petugas kantor desa dan melibatkan masyarakat sebagai wakil
2. Langkah Penerapan SID
 - a. Persiapan sosialisasi
 - Mensosialisasikan pentingnya SID, manfaat SID, keharusan memiliki SID, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi,
 - b. Persiapkan perangkat pendukung
 - Pengadaan PC, laptop, perangkat jaringan, akses internet dan memasangnya
 - Mendaftar ke domain

- Melatih staf kantor desa dalam penggunaan PC, laptop, perangkat jaringan, akses internet
- Mendaftar hosting SID online
- c. Penginstalan SID
 - Mengunduh OpenSID versi terakhir
 - Memasang SID di server utama kantor desa
 - Memasang SID di server cadangan (seperti pada laptop operator SID)
- d. Penyiapan aturan pendukung
 - Menentukan tugas pokok petugas SID, termasuk semua tugas operasional SID
 - Menerbitkan SK pengangkatan petugas, jika dibutuhkan
 - Menyusun alur dan prosedur layanan menggunakan SID
- e. Penyiapan sumber daya manusia
 - Melakukan pelatihan pengoperasian SID pada semua staf kantor desa
 - Mempersiapkan panduan penggunaan dan standart operasional prosedur SID
- f. Mempersiapkan data desa dan penduduk kemudian menginputnya kedalam sistem:
 - Menyiapkan data desa seperti: identitas desa, data pemerintahan desa, serta wilayah administrasi desa
 - Menyiapkan data penduduk yang dipeoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Persiapan dan penginputan bahan *website*
- h. Persiapan peluncuran layanan dan *website* SID
 - Gladi bersih pemakaian *website* desa oleh staf kantor desa
 - Gladi bersih proses pemakaian *website* desa dengan melibatkan masyarakat
 - Mengumumkan peluncuran *website* desa
 - Mengadakan acara peluncuran *website* desa (github.com)

Dari beberapa proses tersebut, pemerintah Desa Pulosari tidak melakukan langkah sosialisasi. Sosialisasi dalam penerapan SID di Desa Pulosari dirasa masyarakat masih sangat kurang karena sosialisasi hanya diadakan dua kali tanpa mengundang warga secara langsung. Sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan Ketua RT dan RW masing-masing Dusun. Padahal sosialisasi merupakan suatu hal yang perlu agar masyarakat dapat mengetahui penerapan SID di Desa Pulosari.

Banyak warga yang belum tau apa itu SID, terutama orang yang sudah tua-tua. Pengenalan SID kepada masyarakat Desa Pulosari masih kurang.

b. Adaptasi

Sebelum sebuah sistem digunakan sehari-hari, seluruh sumber daya manusia baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat, harus dipersiapkan terlebih dahulu mulai dari segi tata kerja, administrasi, bahkan akses informasi. Oleh karena itu, SOP sangat diperlukan sebagai acuan untuk menerapkannya. SID bukan hanya sebagai sebuah sistem komputerisasi yang canggih, melainkan juga sebagai sebuah media untuk mengelola, menyimpan serta menyebarkan informasi. Maka dari itu, penerapan SID perlu adanya adaptasi. Hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dari segi adaptasi masih belum efektif. Hal tersebut karena masyarakat Desa Pulosari masih banyak yang tidak memahami SID di desanya walaupun kualitas aparatur pemerintah desa sudah baik. Masyarakat cenderung sulit untuk menerima perubahan yang ada. Namun, dapat dimaklumi karena menurut sumber yang didapat dari Desa Dlingo yang telah sukses menerapkan SID, optimalnya SID di desa yaitu sekitar 3 tahun. Jadi, jika masih belum optimal masih wajar karena masih permulaan. Selain itu ketidakefektivan adaptasi dikarenakan sarana prasarana terkait sumber daya *hardware* yang ada di Desa Pulosari masih kurang memadai. Memang dari segi sumberdaya *software*, sumber daya data dan jaringan tidak ada masalah namun dalam segi sumber daya *hardware* jumlahnya masih kurang. Komputer yang dapat digunakan hanya 1 buah, laptop 1 buah, mesin scan 1 buah, dan printer 1 buah.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, dalam penerapan SID di Desa Pulosari hal yang menjadi faktor pendukung adalah:

1) **Komitmen Pimpinan Kepala Desa Pulosari.**

Apapun dilakukan untuk memperoleh prestasi desanya. Walaupun anggaran di tanggung sepenuhnya oleh desa namun hal tersebut vtidak menjadikan halangan bagi Kepala Desa untuk mendukung penerapan SID ini. Kepala Desa Pulosari terus memberikan dukungan kepada penyelenggara penerapan SID ini untuk tetap melakukan tugasnya. Tekad kuat yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut memang sangat diperlukan demi keberlangsungan penerapan SID. Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa sebagai bentuk dukungannya. Seperti pendapat Steers (1985:9) tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas salah satunya adalah kebijakan dan praktek manajemen, variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat mempermudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) **Dukungan dari dinas terkait**

Dukungan penerapan SID di Desa Pulosari dari luar pemerintah desa sendiri berasal dari Combine (CRI) selaku komunitas pengembang SID. Bentuk dukungan yang diberikan oleh CRI adalah pemberian pelatihan gratis di Yogyakarta, dan mengundang aparatur pemerintah Desa Pulosari dalam acara jagongan rakyat. Selain CRI, pemerintah Kabupaten Jombang dan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sangat mendukung dalam hal ini. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jombang adalah ketika peluncuran SID di Desa Pulosari dengan memberikan Dana Alokasi Khusus, serta BPMPD selaku badan pemerintah Kabupaten Jombang yang menaungi SID memberikan pelatihan beberapa kali guna meningkatkan kapasitas aparatur desa. Sedangkan dukungan yang diberikan oleh Dispenduk Capil adalah dengan memberikan data kependudukan Desa Pulosari sebagai acuan untuk penginputan data.

3) Sumber Daya Jaringan

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dalam hal penerapan SID di Desa Pulosari harus ditunjang oleh beberapa faktor. Jaringan internet merupakan salah satu hal yang penting diperlukan demi kelancaran SID *online*. Seperti pendapat yang diutarakan oleh Robbin dalam Syarif (2008:123) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan adalah koneksi internet. Kecepatan koneksi internet mempengaruhi kinerja sistem yang berpengaruh terhadap pengiriman dan penerimaan data. Seperti pendapat Sopandi (2008:1-6) bahwa pembagian cakupan jaringan berpengaruh pada kecepatan fungsi pengiriman dan penerimaan data.

Hasil penelitian peneliti bahwa koneksi internet merupakan salah satu faktor pendukung dalam penerapan SID di Desa Pulosari. Hal tersebut karena data dalam SID tidak akan valid jika tidak diupload secara *online*. Sehingga ketika *online* tersebut tentunya memerlukan koneksi jaringan internet. Pemerintah Desa Pulosari menggunakan wifi dengan jangkauan 25 meter untuk mendukung

penerapan SID. Selain itu, wifi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat Desa Pulosari.

b. Faktor Penghambat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dalam penerapan SID di Desa Pulosari, hal yang menjadi penghambat dalam penerapan adalah:

1) Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pulosari mengakibatkan hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui penerapan SID. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa Pulosari hanya dua kali dan hanya melalui RT dan RW saja. Sehingga hal tersebut kurang efektif. Penyampaian informasi oleh RT dan RW belum menyeluruh. Masyarakat Desa Pulosari masih banyak yang belum mengetahui informasi tentang SID. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan dalam penerapan SID karena sebegus apapun suatu program tidak dapat dikatakan berhasil jika sasaran tersebut tidak tercapai.

2) Sumber Daya Pemakai

Salah satu kendala dalam penerapan SID berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia pemakai. Masyarakat Desa Pulosari masih awam dengan internet. Padahal pemakai atau masyarakat merupakan salah satu bagian yang penting dalam mencapai efektivitas sistem terutama pasrtisipasinya dalam penerapan. Sesuai dengan pendapat Cambel J.P (1989:121) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem berasal dari luar lembaga penyedia layanan yaitu adanya dukungan atau partisipasi dari masyarakat. Data yang didapat oleh peneliti dalam penelitian, salah satu penyebab kurangnya

pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan SID di Desa Pulosari dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pulosari sendiri. Pemerintah Desa hanya mengadakan sosialisasi melalui RT dan RW saja.

3) Kurangnya Koordinasi dan Kerjasama Pendamping Desa Pulosari

Kurangnya peran pendamping desa dalam penerapan SID di Desa Pulosari sehingga desa tidak dapat berbuat banyak karena tidak ada seorang pemandu. SID merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sehingga sudah seharusnya kewajiban pendamping desa mendampingi Desa Pulosari dalam penerapan SID. Peran pendamping desa dalam penerapan SID belum maksimal. Padahal peran pendamping desa diperlukan demi kemajuan sebuah desa. Pendamping desa tidak memberikan pengarahan tentang penerapan SID dan jarang berkoordinasi dengan aparatur pemerintah Desa Pulosari.

4) Kurangnya Sumber Daya *Hardware*

Sumber daya *hardware* berkaitan dengan konsep sumber daya pemrosesan informasi sehingga dapat memudahkan dan mempercepat kegiatan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa sumber daya *hardware* dalam penerapan SID di Desa Pulosari dari segi jumlah masih belum memadai. Jumlah komputer hanya dua buah dan yang dapat dipakai hanya satu buah, jumlah laptop satu buah, printer satu, dan mesin scan juga satu. Sehingga ketika ingin menggunakan sumber daya *hardware* tersebut harus mengantri terlebih dahulu. Kurangnya jumlah sumber daya *hardware* di Desa Pulosari dikarenakan kurangnya perawatan yang dilakukan, sehingga *hardware* tersebut mudah rusak karena sumber daya *hardware* memiliki masa tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Desa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa: Penerapan Sistem dalam penerapan Sistem Informasi Desa belum efektif.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan segera diadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Pulosari agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang penerapan Sistem Informasi Desa dengan melakukan pelatihan pengguna akhir yang difokuskan pada penggunaan praktis dan peragaan serta loka karya.
2. Diharapkan segera disusun Standart Operating Procedure (SOP) dalam penerapan SID di Desa Pulosari dengan membentuk panitia penyusun SOP.
3. Diperlukan peningkatan peran pendamping desa dalam penerapan SID di Desa Pulosari dengan membangun sinergitas antara pendamping desa dan pemerintah Desa Pulosari.

4. Penerapan SID di Desa Pulosari diharapkan dianggarkan dalam RPJMDes sehingga sumber daya *hardware* dapat memadai.



DAFTAR PUSTAKA

- Chandler, Ralph C. dan Plano Jack C. 1988. *The Public Administration Distionary*. John Wiley & Sons.
- Felix. A. Nigro dan Liyod.G.Nigro. 1999. *Administrasi Publik*. Jakarta:Rineka Cipta
- Gibson, James L. 1994. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Herdiansyah, Haris. 2011. “*Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*”. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Lalolo, krina. 2003. *Indikator alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansidan Partisipasi*. Jakarta: Bahan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Indrajit, E. Richardus. 2002. “*Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*”. Yogyakarta: Andi.
- Inpres No 3.2003. Inpres No 3. 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-government*, diakses pada 17 Oktober 2016 dari <http://www.hukumonline.com>
- J, P. Caampbel. 1989. *Riset dalam efektivitas organisasi*, terjemahan Simamora. Jakarta: Erlangga
- Kumorotomo, Wahyudi, Agus. 1998. *Sistem Informasi Manajemen dalam organisasi-organisasi publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Mahmudi. 2006. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan
- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber daya Manusia dan Efektivitas organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Miles, Matthew B & Huberman, A Michael. 2014. “*Analisis Data Kualitatif*”. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2;1. (1-17)

- Melwin Syafrizal, Daulay. 2007. “ *Mengenal Hardware, Software dan Pengelolaan Instalasi Komputer*. Yogyakarta: Andi
- Moenir. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- M.Scott, George. 2004. *Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Diterjemahkan oleh Budiman. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nugroho. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Konsep, Aplikasi dan Perkembangannya*. Yogyakarta: CV.Andi Offset
- O'Brien, James A. 2005. “*Pengantar Sistem Informasi Perseptif Bisnis dan Manajerial*”. Salemba
- Oetomo. 2002. “*Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi*”. Yogyakarta: Andi
- Pemerintah Desa Pulosari. 2016. *Website SID Desa Pulosari*, diakses dari Pulosari-Jombang.web.id dan Pulosari-jombang.sid.web.id
- _____. 2016. *Back End dan Front End SID*, diakses dari <http://localhost/>
- Sarwono. 2006. “ *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sopandi. 2008. *Instalasi dan Konfigurasi Jaringan Komputer*. Bandung: Informatika
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susilo, Martoyo. 2002. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja*. Cetakan Kelima. Bandung: Bina Aksara
- Ruslan, Rosadi. 2006. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Steers, Richard M (1984). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Siagian, S.P. 2001. *“Kerangka Dasar Ilmu Administrasi Publik”*. Jakarta: Rineka Cipta

Sudirman. 2002. *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan*. Bandung: Primako Akademika

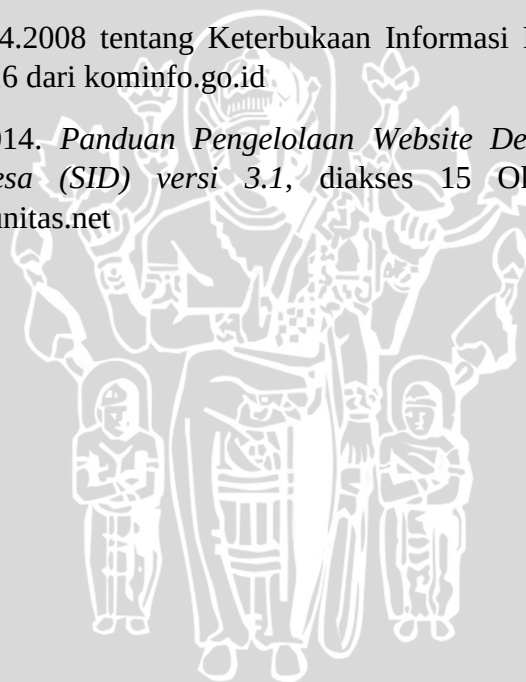
Susanto, Azhar. 2013 *“ Sistem Informasi Akuntansi”*. Bandung: Lingga Jaya

Tantra, Rudy. 2012. *“Manajemen Proyek Sistem Informasi: bagaimana mengelola proyek sistem infomasi secara efektif dan efisien.”* Yogyakarta: Andi

Undang-Undang No.6.2014 tentang Desa, diakses pada 03 Oktober 2016 pada <http://www.bpn.go.id>

Undang-Undang No.14.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diakses 29 Desember 2016 dari kominfo.go.id

Wijoyono, Elanto. 2014. *Panduan Pengelolaan Website Desa dengan Sistem Informasi Desa (SID) versi 3.1*, diakses 15 Oktober 2016 dari lumbungkomunitas.net



Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM
INFORMASI DESA (SID) DI DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG,
KABUPATEN JOMBANG**

Bagi Operator *website* Desa Pulosari:**A. KOMPONEN SID**

1. Latar Belakang penerapan SID di Desa Pulosari
 - a. Apa yang melatar belakangi penerapan SID di Desa Pulosari?
 - b. Kapan penerapan SID dimulai di Desa Pulosari?
2. Manfaat yang dirasakan dalam penerapan SID di Desa Pulosari
 - a. Apa perubahan sebelum dan sesudah diterapkannya SID di Desa Pulosari?
3. Kendala dalam penerapan SID di Desa Pulosari
4. Sumber Daya Manusia
 - a. Bagaimana kondisi Sumber Daya Manusia aparatur penerap SID Desa Pulosari dan pemakai atau masyarakat Desa Pulosari?
 - b. Siapa saja yang terlibat dalam penerapan SID Desa Pulosari?
 - c. Apakah ada pelatihan khusus terkait peningkatan SDM dalam penerapan SID di Pulosari?
5. Sumber Daya Hardware
 - a. Berapa jumlah komputer untuk mengoperasikan SID di Desa Pulosari?
 - b. Apakah jumlah tersebut mendukung dalam penerapan SID di Desa Pulosari?

- c. Adakah keamanan terkait SID Desa Pulosari?
6. Sumber Daya *Software*
 - a. Sistem yang digunakan versi berapa?
 - b. Kelebihan dan kekurangan versi tersebut apa?
 - c. Apakah ada kendala tentang sistem?
7. Sumber Daya Data
 - a. Data apa saja yang dimasukkan ke dalam SID?
 - b. Apakah data tersebut langsung di *upload* kedalam *website* desa?
8. Sumber Daya Jaringan
 - a. Sumber daya jaringan yang digunakan di Desa Pulosari apa?
 - b. Bagaimana kondisi jaringan dalam penerapan SID di Desa Pulosari?

B. EFEKTIFITAS

1. Tujuan penerapan SID di Desa Pulosari
 - a. Apa tujuan diterapkannya SID di Desa Pulosari?
 - b. Apakah tujuan tersebut sudah dicapai?
 - c. Apakah masyarakat sudah merasakan perubahan adanya keberadaan SID di Desa Pulosari?
 - d. Apa dasar hukum penerapan SID di Desa Pulosari?
2. Integrasi
 - a. Bagaimana dukungan dengan dinas terkait? Seperti Dispenduk Capil, Pemkab?

- b. Bagaimana dukungan dari masyarakat dalam penerapan SID di Desa Pulosari?
 - c. Apakah ada SOP dalam penerapan SID?
 - d. Sosialisasi penerapan SID dilakukan berapa kali?
 - e. Proses dari awal penerapan SID bagaimana?
3. Adaptasi
- a. Apakah aparat pemerintah desa sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan IT baru?
 - b. Apakah masyarakat Desa Pulosari sudah dapat menyesuaikan dengan lingkungan IT?
 - c. Apa perbedaan sebelum dan sesudah diterapkan SID di Desa Pulosari?
 - d. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum penerapan SID di Desa Pulosari?

C. TRANSPARANSI

1. Informasi
- a. Informasi Apa saja yang disediakan dalam website SID?
- b. Apakah anggaran juga ditampilkan di *website*?
- c. Apakah ada informasi khusus yang ditampilkan di *website*?

Seperti informasi bulanan? Tahunan? Informasi yang wajib disediakan secara berkala?

Bagi Kepala Desa Pulosari dan Aparatur pemerintah Desa Pulosari:

1. Latar Belakang penerapan SID di Desa Pulosari
 - a. Apa yang melatar belakangi penerapan SID di Desa Pulosari?
 - b. Kapan penerapan SID dimulai di Desa Pulosari?
2. Apa saja manfaat dari penerapan SID di Desa Pulosari?
3. Apa saja kendala dalam penerapan SID di Desa Pulosari?
4. Sumber daya keuangan:
 - a. Anggaran penerapan SID di Desa Pulosari diambil darimana?
5. Sumber Daya Data:
 - a. Informasi apa saja yang disediakan diwebsite Pulosari?
6. Integritas
 - a. Bagaimana dukungan dari dinas terkait seperti Dispenduk Capil dan BPMPD atau Pemkab Jombang?
7. Sumber Daya Jaringan
 - a. Bagaimana kondisi sumber daya jaringan seperti wifi?
8. Sumber daya *software* dan *hardware*
 - a. Apakah sistem yang digunakan pernah mengalami gangguan?
 - b. Sistem yang digunakan versi berapa?
 - c. Berapa jumlah komputer, printer, dan mesin scan di Kantor pemerintah Desa Pulosari?
 - d. Apakah jumlah tersebut sudah memadai?

Bagi masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang SID?
2. Berapa kali mengunjungi *website* (dalam sebulan)?
3. Informasi:
 - a. Informasi yang disediakan di *website* sudah baik atau belum?
 - b. Tata bahasa informasi yang disediakan sudah baik atau belum?
 - c. Informasinya mudah dipahami atau tidak?
 - d. Laporan tahunannya sudah sesuai atau belum?
 - e. Apakah setiap kegiatan langsung di *upload* di *website*?
4. Jaringan seperti wifi sudah baik atau belum?
5. Apakah sumber daya aparatur pemerintah desa dalam penerapan SID sudah cukup baik?
6. Apakah sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan SID di Desa Pulosari sudah memadai?
7. Apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa sudah cukup baik?
8. Apa kendala dalam penerapan SID di Desa Pulosari?
9. Apa yang harus diperbaiki dalam penerapan SID di Desa Pulosari?
10. Apakah Kepala Desa Pulosari mendukung dalam penerapan SID di Desa Pulosari?

Bagi Pendamping Desa

1. Peran pendamping desa dalam penerapan SID di Desa Pulosari itu apa saja?
2. Pendamping desa ikut andil apa saja dalam penerapan SID di Desa Pulosari?
3. Berapa kali dalam sebulan Pendamping Desa mengunjungi desa yang didampingi?
4. Bagaimana kiat-kiat pendamping desa dalam penerapan SID di Desa Pulosari?
5. Apa saja yang dilakukan pendamping desa dalam mensukseskan SID di Desa Pulosari?

Bagi Anggota Combine Resource Institute (CRI)

1. Siapa yang membuat aplikasi SID?
2. Apa tujuan dibuat SID?
3. Apakah SID hanya dioptimalkan di surat menyurat saja?
4. Ada berapa versi SID yang dikeluarkan CRI? Perbedaannya apa saja?
5. Dasar hukum penerapan SID di desa itu apa?
6. Apakah SID merupakan program pemerintah atau inisiatif desa?

Lampiran 2

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 043 /UN10.3/AK/2016
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada : Yth. Bpk. Rokim

Kepala Pemerintah Desa Pulosari

Jln. Anjasmoro No 313 Pulosari, Bareng

Jombang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa :

Nama : Enik Agustin
Alamat : Jln Dirham RT 04 RW 05 Dsn. Pohblembem, Ds. Badas, Kec. Badas
Kab. Kediri
NIM : 135030100111086
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : -
Tema : Penerapan Sistem Informasi Desa Dalam Rangka Meningkatkan
Keterbukaan Informasi Publik
Lamanya : 1-2 bulan
Peserta : 1 orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 07 Desember 2016

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Irena Indah Mindarti, M.Si
NIP. 196108242002122002



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
JOMBANG

SURAT IZIN

Nomor : 072/ ⁴⁸⁹ /415. 21/2016

TENTANG

IZIN PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
 - Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/225/415.10.10/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
 - Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tertanggal 07 Desember 2016 nomor : 18439/UN10.3/AK/2016 perihal permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : ENIK AGUSTIN
NIM : 135030100111086
Program Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Kegiatan : Penelitian
Waktu : 29 Desember 2016 s/d 31 Januari 2017
Judul Penelitian : Penerapan Sistem Informasi Desa Dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik
Lokasi : Kantor Kepala Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membawa manfaat bagi semua pihak;
2. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait;
3. Mentaati tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan survey/penelitian yang dimaksud;
5. Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan survey/penelitian yang dimaksud;
6. Bertanggung Jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan survey/penelitian dimaksud.

Demikian untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan pekerjaan Penelitian supaya melaporkan hasil pekerjaannya pada pemerintah kabupaten jombang melalui Badan Pelayanan Perizinan.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 30 DEC 2016



BUPATI JOMBANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN

ABDUL QUDUS, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610305 198907 1 002

Tembusan, Yth Saudara :

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jombang;
3. Camat Bareng;
4. Kepala Desa Pulosari;
5. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI

Jalan Anjasmoro nomor 313 Kode Pos 61474

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pulosari menerangkan bahwa:

Nama : Enik Agustin
NIM : 135030100111086
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Program : S1 Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Informasi Publik Dalam Rangka Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan Penelitian Skripsi dari tanggal 06 Desember 2016- 03 Januari 2017

Demikian informasi Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulosari, 03 Januari 2017

Kepala Desa Pulosari



Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 (0321) 862292 Jombang
J O M B A N G

Jombang, 02 Mei 2016

Nomor : 140/1673/415.40/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemanfaatan Program System
Informasi Desa (SID)

Kepada
Yth. Camat se Kabupaten Jombang
Di
JOMBANG

Menindaklanjuti pengarahan Bapak Bupati Jombang pada acara penutupan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Launching Program System Informasi Desa (SID) tanggal 19 April 2016 di Desa Pulosari Kecamatan Bareng, maka bersama ini diminta agar saudara memerintahkan kepada Kepala Desa untuk :

1. Mengembangkan Program System Informasi Desa serta memanfaatkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Desa ;
2. Menunjuk seorang perangkat desa sebagai Operator (untuk menangani Aplikasi SID dan Profil Desa) ;
3. Memberikan Honorarium kepada Operator sesuai kemampuan Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

an. BUPATI JOMBANG
Sekretaris Daerah,


Dra. ITA TRIWIBAWATI, Ak. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199501 2 001

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Jombang
(Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kab. Jombang
3. Kepala Kantor Arsip, PDE,
dan Perpustakaan Kab. Jombang

Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI**

Jalan Anjasmoro nomor 313 Kode Pos 61474

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA PULOSARI
Nomor : 140 / 14 / 415. 72 . 10 / V / 2016**

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SYSTEM INFORMASI DESA DAN PROFIL DESA

KEPALA DESA PULOSARI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibentuk operator SID dan PROFIL DESA.
 - b. bahwa Operator SID dan Profil Desa berfungsi dan bertugas untuk mengembangkan Program Sistem Informasi Desa serta memanfaatkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Desa;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator SID dan Profil Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Memperhatikan : Surat Bupati Jombang tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 140 / 1678 / 415. 40 /2016 hal Pemanfaatan Program System Informasi Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Sdr WIDJI (Kepala Dusu Pulosari) sebagai Operator System Informasi Desa yang di singkat SID Periode 2016 - 2019

KEDUA : Operator SID dan Profi Desa sebagaimana di maksud poin ke satu bertugas Mengetri data serta mengembangkan Aplikasi SID dalam pelayanan masyarakat dan Pengelolaan administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDes yang bersumber dari pendapatan Asli Desa, Dana perimbangan, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lain lain pendapatan Desa yang sah termasuk didalamnya bantuan pihak ke tiga

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 10 Mei 2019

Ditetapkan di Pulosari
Pada tanggal 10 Mei 2016



Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 (0321) 862292 Jombang
J O M B A N G

Jombang , Mei 2016

Nomor : 140/865/415.40/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi
Program System Informasi
Desa (SID)

Kepada
Yth. Camat se Kabupaten Jombang
Di
JOMBANG

Menindaklanjuti kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan mulai tanggal 23 Februari s.d 14 April 2016 , maka bersama ini disampaikan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang akan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan tentang pemanfaatan Program System Informasi Desa (SID) di desa wilayah kecamatan saudara , sebagaimana jadwal terlampir.

Berkenan dengan hal tersebut di atas, maka diminta kepada Saudara memerintahkan Perangkat Desa yang telah mengikuti Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2016 untuk hadir pada kegiatan dimaksud, dengan membawa Laptop yang telah diinstal Program System Informasi Desa.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Dra. IGA TRIWIBAWATI, Ak. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199501 2 001

JADWAL
PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016
KABUPATEN JOMBANG
ANGKATAN KE : I s.d V

NO	ANGKATAN	TEMPAT	WAKTU		MATERI	NARASUMBER	PESERTA	
			HARI / TANGGAL	JAM				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	I	Ruang GRHA WIYATA PRAJA BPMPD KAB. JOMBANG	Selasa, 23 Pebruari 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	Perangkat Desa dari :	
				08.00 - 09.00	Pembukaan	Panitia		
				09.00 - 10.30	Peningkatan Pelayanan Masyarakat melalui System Pelayanan Administrasi Terpadu	Bag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Jombang	Kec. Megaluh	13
				10.30 - 12.00	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Desa melalui System Bessline	Panitia	Kec. Diwek	20
				12.00 - 13.00	Ishoma	BAPPEDA Kab. Jombang	Kec. Jombang	16
				13.00 - 15.00	Pelayanan Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Jombang		
2	I	Ruang GRHA WIYATA PRAJA BPMPD KAB. JOMBANG	Rabu, 24 Pebruari 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	JUMLAH	
				08.00 - 12.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution		
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia		
				13.00 - 15.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution		
3	I	Ruang GRHA WIYATA PRAJA BPMPD KAB. JOMBANG	Kamis, 25 Pebruari 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia		
				08.00 - 12.00	Praktek Pelayanan Masyarakat menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution		
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia		
				13.00 - 15.00	Praktek penyimpanan Data menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution		
4	II	Balai Desa Spanyul Kecamatan Gudo	Selasa, 01 Maret 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	Perangkat Desa dari :	
				08.00 - 10.00	Peningkatan Pelayanan Masyarakat melalui System Pelayanan Administrasi Terpadu	Bag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Jombang	Kec. Gudo	18
				10.00 - 12.00	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Desa melalui System Bessline	BAPPEDA Kab. Jombang	Kec. Bandar KM	11
				12.00 - 13.00	cofee Break	Panitia	Kec. Perak	13
				13.00 - 15.00	Pelayanan Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Jombang		
5	II	Balai Desa Spanyul Kecamatan Gudo	Rabu, 02 Maret 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	JUMLAH	
				08.00 - 12.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution		
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia		
				13.00 - 15.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution		
6	II	Balai Desa Spanyul Kecamatan Gudo	Kamis, 03 Maret 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia		
				08.00 - 12.00	Praktek Pelayanan Masyarakat menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution		
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia		
				13.00 - 15.00	Praktek penyimpanan Data menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution		

JADWAL
PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016
KABUPATEN JOMBANG
ANGKATAN KE : VI s.d VII

NO	ANGKATAN	TEMPAT	WAKTU		MATERI	NARASUMBER	PESERTA
			HARI / TANGGAL	JAM			
1	2	3	4	5	6	7	8
	VI	Balai Desa Tapen Kecamatan Kudu	Selasa, 05 April 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	Perangkat Desa dari :
				08.00 - 10.00	Peningkatan Pelayanan Masyarakat melalui System Pelayanan Administrasi Terpadu	Bag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Jombang	Kec. Kudu 11
				10.00 - 12.00	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Desa melalui System Bessline	BAPPEDA Kab. Jombang	Kec. Ngusikan 11
				12.00 - 13.00	cofee Break	Panitia	Kec. Kabuh 16
				13.00 - 15.00	Pelayanan Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Jombang	
	VI	Balai Desa Tapen Kecamatan Kudu	Rabu, 06 April 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	JUMLAH 38
				08.00 - 12.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia	
				13.00 - 15.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
	VI	Balai Desa Tapen Kecamatan Kudu	Kamis, 07 April 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	
				08.00 - 12.00	Praktek Pelayanan Masyarakat menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia	
				13.00 - 15.00	Praktek penyimpanan Data menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
	VII	Balai Desa Pulosari Kecamatan Bareng	Selasa, 12 April 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	Perangkat Desa dari :
				08.00 - 10.00	Peningkatan Pelayanan Masyarakat melalui System Pelayanan Administrasi Terpadu	Bag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Jombang	Kec. Mojowarno 19
				10.00 - 12.00	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Desa melalui System Bessline	BAPPEDA Kab. Jombang	Kec. Ngoro 13
				12.00 - 13.00	cofee Break	Panitia	Kec. Bareng 13
				13.00 - 15.00	Pelayanan Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Jombang	Kec. Wonosalam 9
	VII	Balai Desa Pulosari Kecamatan Bareng	Rabu, 13 April 2016	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia	JUMLAH 54
				08.00 - 12.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia	
				13.00 - 15.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution	

1	2	3	4	5	6	7	8
	VII	Balai Desa Pulosari Kecamatan Bareng	Kamis, 14 April 2016	07.00 - 08.00	Regestrasi Peserta	Panitia	
				08.00 - 12.00	Praktek Pelayanan Masyarakat menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia	
				13.00 - 15.00	Praktek penyimpanan Data menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution	

Jombang, 16 Pebruari 2016

AN. BUPATI JOMBANG

SEKRETARIS DAERAH,

ub



KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEPADA MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG

DARMADJI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590402 198603 1 014



1	2	3	4	5	6	7	8
7	III	Balai Desa Sumobito Kecamatan Sumobito	Senin, 07 Maret 2016	07.00 - 08.00	Regestrasi Peserta	Panitia	Perangkat Desa dari :
				08.00 - 10.00	Peningkatan Pelayanan Masyarakat melalui System Pelayanan Administrasi Terpadu	Bag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Jombang	
				10.00 - 12.00	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Desa melalui System Dessline	BAPPEDA Kab. Jombang	Kec. Sumobito 21
				12.00 - 13.00	cofee Break	Panitia	Kec. Kesamben 14
				13.00 - 15.00	Pelayanan Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Jombang	
8	III	Balai Desa Sumobito Kecamatan Sumobito	Selasa, 08 Maret 2016	07.00 - 08.00	Regestrasi Peserta	Panitia	JUMLAH 35
				08.00 - 12.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia	
				13.00 - 15.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
9	III	Balai Desa Sumobito Kecamatan Sumobito	Kamis, 10 Maret 2016	07.00 - 08.00	Regestrasi Peserta	Panitia	
				08.00 - 12.00	Praktek Pelayanan Masyarakat menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia	
				13.00 - 15.00	Praktek penyimpanan Data menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
10	IV	Ruang Pertemuan Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan	Selasa, 15 Maret 2016	07.00 - 08.00	Regestrasi Peserta	Panitia	Perangkat Desa dari :
				08.00 - 10.00	Peningkatan Pelayanan Masyarakat melalui System Pelayanan Administrasi Terpadu	Bag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Jombang	
				10.00 - 12.00	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Desa melalui System Bessline	BAPPEDA Kab. Jombang	Kec. Tembelang 15
				12.00 - 13.00	cofee Break	Panitia	Kec. Plandaan 13
				13.00 - 15.00	Pelayanan Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Jombang	
11	IV	Ruang Pertemuan Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan	Rabu, 16 Maret 2016	07.00 - 08.00	Regestrasi Peserta	Panitia	JUMLAH 41
				08.00 - 12.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia	
				13.00 - 15.00	Teori System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
12	IV	Ruang Pertemuan Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan	Kamis, 17 Maret 2016	07.00 - 08.00	Regestrasi Peserta	Panitia	
				08.00 - 12.00	Praktek Pelayanan Masyarakat menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution	
				12.00 - 13.00	Ishoma	Panitia	
				13.00 - 15.00	Praktek penyimpanan Data menggunakan System Informasi Desa	Combine Resource Institution	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	V	Balai Desa Peterongan Kecamatan Peterongan	Selasa, 22 Maret 2016	07.00 - 08.00 08.00 - 10.00 10.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 15.00	Regestrasi Peserta Peningkatan Pelayanan Masyarakat melalui System Pelayanan Administrasi Terpadu Peningkatan Perencanaan Pembangunan Desa melalui System Bessline cofee Break Pelayanan Kependudukan	Panitia Bag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Jombang BAPPEDA Kab. Jombang Panitia Dispendukcapil Kab. Jombang	Perangkat Desa dari : Kec. Peterongan 14 Kec. Jogoroto 11 Kec. Mojoagung 18
14	V	Balai Desa Peterongan Kecamatan Peterongan	Rabu, 23 Maret 2016	07.00 - 08.00 08.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 15.00	Regestrasi Peserta Teori System Informasi Desa Ishoma Teori System Informasi Desa	Panitia Combine Resource Institution Panitia Combine Resource Institution	JUMLAH 43
15	V	Balai Desa Peterongan Kecamatan Peterongan	Kamis, 24 Maret 2016	07.00 - 08.00 08.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 15.00	Regestrasi Peserta Praktek Pelayanan Masyarakat menggunakan System Informasi Desa Ishoma Praktek penyimpanan Data menggunakan System Informasi Desa	Panitia Combine Resource Institution Panitia Combine Resource Institution	

Jombang, 16 Februari 2016

AN. BUPATI JOMBANG

SEKRETARIS DAERAH,

ub



KEMAHMUDAHAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG

BADAN PEMERIKSAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN
BANDUJI, B.H. M.Si
Pemerintahan Muda
NIP. 195904011986031014



Sistem Informasi Desa (SID)



LUMBUNG KOMUNITAS
COMBINE RESOURCE INSTITUTION

Sistem Informasi Desa (SID)

Latar Belakang :

- → Sistem Informasi Desa (SID) dibangun 2006 dan diujicoba pemanfaatannya di desa sejak tahun 2009.
- → SID diharapkan mampu menjadi alat untuk mendukung komunikasi pembangunan dua arah yang seimbang, dari desa ke warga, dan dari warga ke desa.
- → Membuat pengelolaan administrasi kependudukan yang baik, tertib, tertata dan terdokumentasi serta memudahkan pelayanan bagi warga.



dukungan pengembangan SID

COMBINE Resource Institution

Alamat: Jl. K.H. Ali Maksum No. 183 Panggungharjo, Sewon, Bantul,
D.I. Yogyakarta 55188 INDONESIA
Telp. / Faks. : +62 274 - 411 123
e-mail: office[at]combine.or.id

Pendowo Gugah Nusantara (PGN)

Help Desk SID Jawa Timur
Balongbendo RT 10 /RW 4, Balongbendo, Sidoarjo

Twitter: @combiner

Group Facebook: Sistem Informasi Desa

Website:

- <http://combine.or.id> (Lembaga)
- <http://lumbungkomunitas.net> (Program Lumbung Komunitas - Divisi Pengembangan dan Penerapan SID)
- <http://sid.web.id> (Portal Jaringan Komunitas Pengguna SID)
- <http://foss.combine.or.id> (Sistem Informasi Proyek Pengembangan FOSS CRI)

Yang perlu diperhatikan dalam Penerapan SID

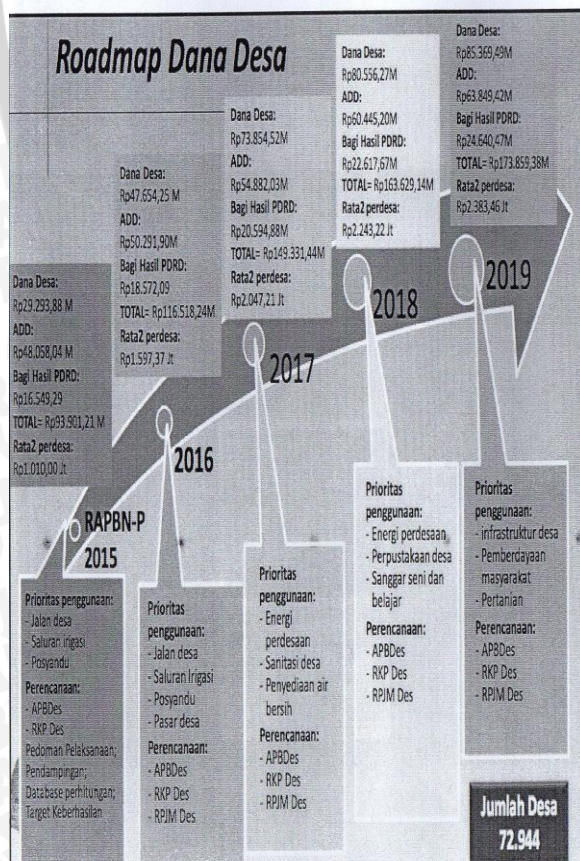
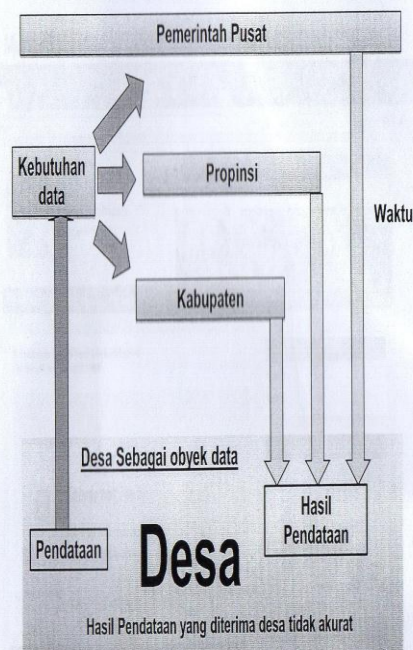
- Dasar penerapan SID adalah praktik pengelolaan data dan informasi pembangunan di tingkat pemerintahan desa.
- SID untuk menghubungkan sistem perencanaan daerah dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
- Perlu Tim kerja SID untuk kesiapan pengembang dan penerapan SID.
- Perlu mengundang pihak-pihak yang memiliki visi, gagasan, dan pengalaman dalam penerapan dan pengelolaan sistem informasi desa.



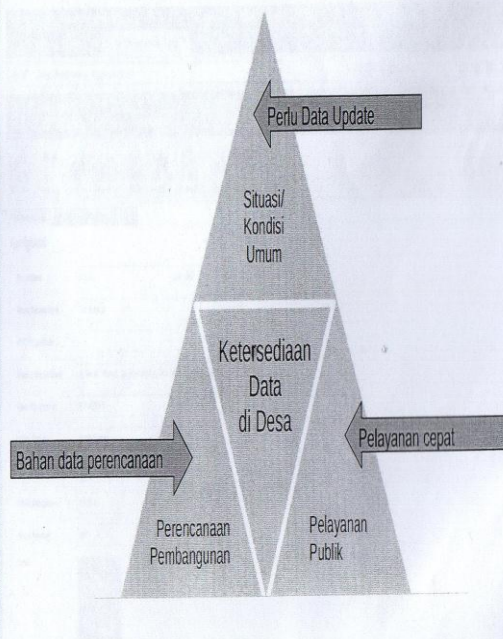
Pengembangan SID bisa disesuaikan kebutuhan desa

- SID untuk pengurangan risiko bencana,
- SID untuk kesehatan,
- SID untuk pendidikan,
- SID untuk pertanian,
- SID untuk ekonomi rakyat, dan sebagainya.

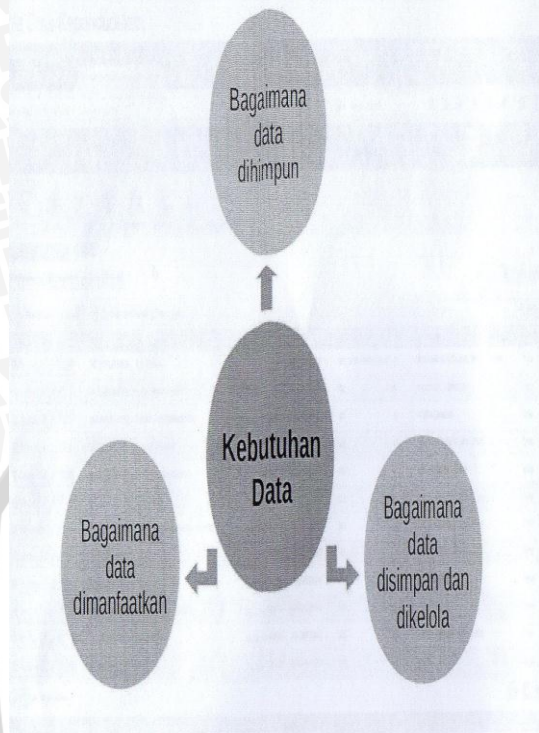
Desa perlu mandiri data



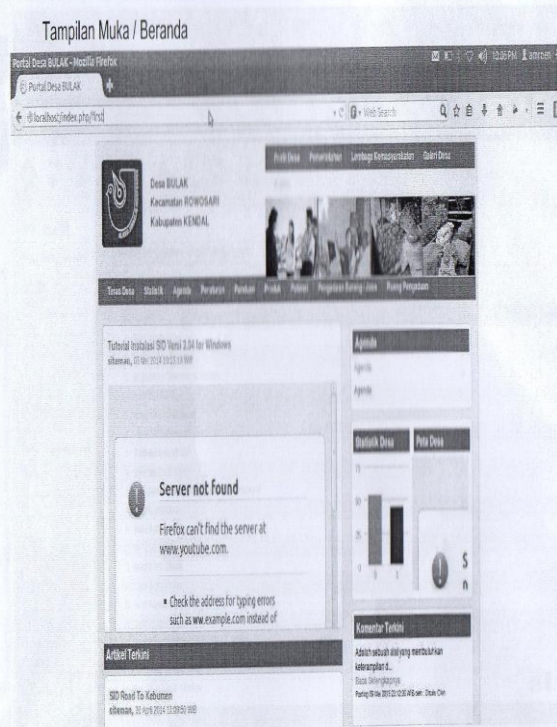
Kondisi Data Yang Ada di Desa



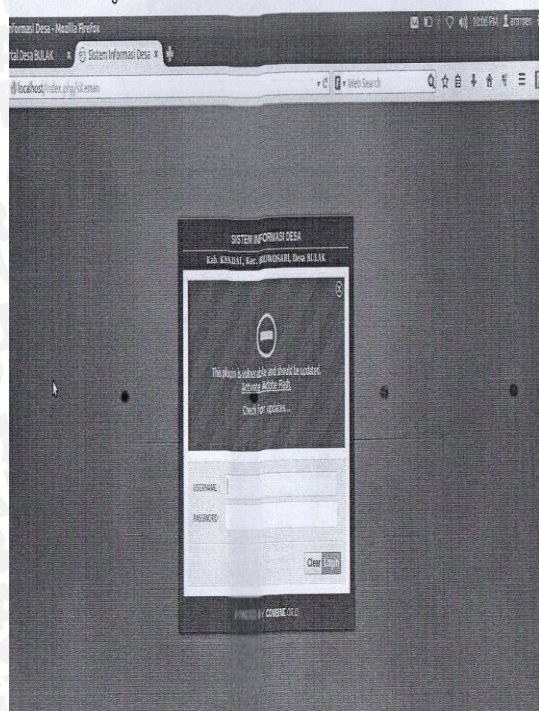
Pemanfaatan data ditingkat desa



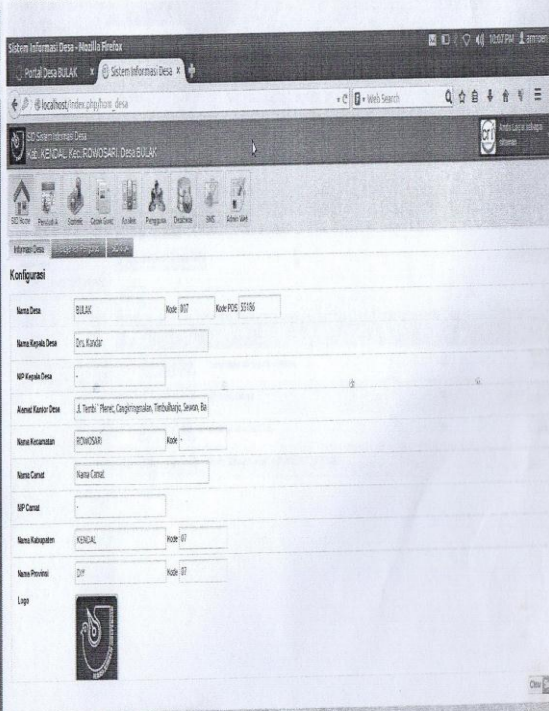
Ada Apa dalam Sistem Informasi Desa?



Aman Admin/Pengelola



Kelola Identitas Desa



Kelola Data Kependudukan

[illegible]

Data Statistik Kependudukan

[illegible]

Pelayanan Administrasi Kependudukan

[illegible]

Pengelola SID

Sistem Informasi Desa - Modul Profile

Portal Desa BULAK | Sistem Informasi Desa

localhost/index.php/web

Sistem Informasi Desa
Kab. NENDAL, Kab. POMOSARI, Desa BULAK

Daftar Login Pengguna

Home Berita Status Cetak Surat Peta Pengantar Laporan SMS About Web

berita

Manajemen Berita

Tampilkan Berita Baru | Manajemen Berita

Daftar Login Pengguna

berita

Manajemen Berita

Produk Desa

Manajemen Produk

Tampilkan Berita Baru

Tampilkan Berita Baru | Manajemen Berita

No	Aksi	Judul	Diterbitkan / Dibatalkan	Tanggal Posting
1	Chk Edit Hapus	Tutorial Instalasi SD Versi 2.0.0 for Windows	Yes	05 Dec 2017 10:13:27 AM
2	Chk Edit Hapus	SD Post To Youtube	Yes	26 Apr 2017 11:09:57 AM
3	Chk Edit Hapus	Memoranda Desa Tanpa Dasi	Yes	14 Apr 2017 14:28:33 AM
4	Chk Edit Hapus	Profil Sistem Administrasi Desa Informasi Desa Lumbis Tengah	Yes	07 Apr 2017 18:43:19 AM

Tampilkan | 1 - 4 Total Data

Lampiran 6

Lampiran : Peraturan Desa Pulosari
 Nomor :
 Tahun : 2016
 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI
 KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN	1,091,892,882.00	1,284,984,232.00	193,091,350.00
1.1	Pendapatan Asli Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	
1.1.1	Hasil Usaha	10,000,000.00	10,000,000.00	
1.1.1.1	Hasil BUMDes			
1.1.1.2	Tanah Kas Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	
1.1.2	Hasil Aset Desa			
1.1.2.1	Pasar Desa			
1.1.2.2	Pasar Hewan			
1.1.2.3	Tambatan Perahu			
1.1.2.4	Bangunan Desa			
1.1.2.5	Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa			
1.1.2.6	Tempat pemandian umum			
1.1.2.7	Jaringan Irigasi			
1.1.2.8	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
1.1.3.1	Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat			
1.1.3.2	Hasil gotong-royong			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.4.1	Hasil pungutan desa			
1.1.4.2	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.2	Pendapatan Transfer	1,081,592,882.00	1,256,592,882.00	175,000,000.00
1.2.1	Dana Desa	636,915,700.00	636,915,700.00	
1.2.1.1	Dana Desa	636,915,700.00	636,915,700.00	
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	59,315,685.00	59,315,685.00	
1.2.2.1	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten	59,315,685.00	59,315,685.00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	385,361,497.00	385,361,497.00	
1.2.3.1	Alokasi Dana Desa	385,361,497.00	385,361,497.00	
1.2.4	Bantuan Keuangan Propinsi			
1.2.4.1	Bantuan Keuangan umum			
1.2.4.2	Bantuan Keuangan khusus			
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota		175,000,000.00	175,000,000.00
1.2.5.1	Bantuan Pilkades/Seleksi Perangkat Desa			
1.2.5.2	Posyandu			
1.2.5.3	Penyerahan Urusan Kabupaten Kepada Desa			
1.2.5.4	Bantuan Stimulan Khusus			
1.2.5.5	Bantuan Rehab Rumah dan Sanitasi Keluarga miskin		100,000,000.00	100,000,000.00
1.2.5.6	Bantuan Keuangan Khusus bidang Infrastruktur Permukiman (PID)		75,000,000.00	75,000,000.00
1.2.5.7	Bantuan Keuangan Lainnya			
1.3	Pendapatan Lain lain	300,000.00	18,391,350.00	18,091,350.00
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1.3.1.1	Hibah dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1.3.1.2	Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	300,000.00	18,391,350.00	18,091,350.00
1.3.2.1	Pendapatan bunga bank	300,000.00	300,000.00	
1.3.2.2	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga			
1.3.2.3	Bantuan Perusahaan di sekitar desa		18,091,350.00	18,091,350.00
1.3.2.4	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
JUMLAH PENDAPATAN (A)		1,091,892,882.00	1,284,984,232.00	193,091,350.00
2	BELANJA	1,092,710,330.41	1,285,801,680.41	193,091,350.00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	339,098,799.41	422,598,799.41	83,500,000.00
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	211,200,000.00	211,200,000.00	
2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kades dan perangkat desa	165,840,000.00	165,840,000.00	
2.1.1.2	Tunjangan Jabatan Kades dan perangkat desa	45,360,000.00	45,360,000.00	
2.1.1.3	Tunjangan kesehatan Kades dan perangkat desa			
2.1.1.4	Tunjangan Lain-Lain			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33,023,114.41	33,023,114.41	

2.1.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	680,200.00	680,200.00	
2.1.2.2	Benda POS	150,000.00	150,000.00	
2.1.2.3	Bahan/material			
2.1.2.4	Pakaian Dinas dan Atribut	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.5	Peralatan dan Perlengkapan kantor Kantor			
2.1.2.6	Alat dan Bahan Kebersihan			
2.1.2.7	Pemeliharaan	4,838,800.00	4,838,800.00	
2.1.2.8	Makanan dan Minuman	2,500,000.00	3,770,000.00	1,270,000.00
2.1.2.9	Belanja cetak dan penggandaan	200,000.00	200,000.00	
2.1.2.10	Transportasi Dan Akomodasi			
2.1.2.11	Perjalanan Dinas	6,445,000.00	4,075,000.00	(2,370,000.00)
2.1.2.12	Belanja jasa kantor (Air, Listrik, koran, administrasi bank dll)	5,109,114.41	5,609,114.41	500,000.00
2.1.2.13	Honorarium	6,300,000.00	6,900,000.00	600,000.00
2.1.2.14	Upah kerja	4,800,000.00	4,800,000.00	
2.1.2.15	Belanja sewa			
2.1.2.16	Lembur			
2.1.3	Belanja Modal(BM)	55,060,000.00	138,560,000.00	83,500,000.00
2.1.3.1	BM Tanah			
2.1.3.2	BM Peralatan kantor			
2.1.3.3	BM Peralatan Mebelair	5,060,000.00	13,560,000.00	8,500,000.00
2.1.3.4	BM Peralatan Rumah tangga			
2.1.3.5	Pembangunan/ Perbaikan Kantor dan Balai Desa	50,000,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00
	- Belanja Barang dan Jasa (Desa Pulosari)			
	- Belanja Modal(BM) (Desa Pulosari)	50,000,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00
2.1.3.6	Belanja Modal Alat angkutan darat bermotor			
2.1.3.7	Belanja Modal Alat angkutan darat tidak bermotor			
2.1.3.8	BM peralatan bengkel			
2.1.3.9	BM Instalasi listrik dan telepon			
2.1.3.10	BM Penetapan Batas Desa/Pembangunan Gapura			
2.1.3.11	BM Tanaman			
2.1.3.12	BM Alat-alat Berat			
2.1.4	Operasional BPD	15,000,000.00	15,000,000.00	
2.1.4.1	Operasional BPD	6,925,000.00	6,925,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (kantor pulosari)	6,925,000.00	6,925,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (kantor pulosari)			
2.1.4.2	Tunjangan BPD	8,075,000.00	8,075,000.00	
	- Belanja Pegawai (kantor pulosari)	8,075,000.00	8,075,000.00	
2.1.5	Operasional RT/RW	24,815,685.00	24,815,685.00	
2.1.5.1	Operasional RT/RW	9,315,685.00	9,315,685.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Pulosari)	9,315,685.00	9,315,685.00	
	- Belanja Modal(BM) (Pulosari)			
2.1.5.2	Insentif RT/RW	15,500,000.00	15,500,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Pulosari)	775,000.00	775,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Pulosari)	14,725,000.00	14,725,000.00	
2.1.6	Pemilihan Kepala Desa dan Pengadaan Perangkat Desa			
2.1.6.1	Pemilihan Kepala Desa			
2.1.6.2	Pengadaan Perangkat Desa			
2.1.7	Pendataan Desa			
2.1.7.1	Pendataan Desa			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	614,415,700.00	720,415,700.00	106,000,000.00
2.2.1	Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan desa	604,815,700.00	710,815,700.00	106,000,000.00
2.2.1.1	Pembangunan/ Perbaikan Saluran Irigasi	50,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00
	- Belanja Barang dan Jasa (TPT Pulosari Rt.01)	50,000,000.00	50,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (TPT Pulosari Rt.01)			
	- Belanja Barang dan Jasa (Dsn Sumber mulyo Rt 02 dan Dsn pulonasir Rt 08)			
	- Belanja Modal(BM) (Dsn Sumber mulyo Rt 02 dan Dsn pulonasir Rt 08)			
	- Belanja Barang dan Jasa (i)			
	- Belanja Modal(BM) (i)		100,000,000.00	100,000,000.00
2.2.1.2	Pembangunan/ Pengaspalan Jalan desa	223,000,000.00	223,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Dusun Pulonasir Rabat Beton RT 006)			
	- Belanja Modal(BM) (Dusun Pulonasir Rabat Beton RT 006)	60,000,000.00	60,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Dusun Pulosari RT 006)			
	- Belanja Modal(BM) (Dusun Pulosari RT 006)	85,000,000.00	85,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Dusun Pulosari RT 007 s.d RT 009)			
	- Belanja Modal(BM) (Dusun Pulosari RT 007 s.d RT 009)	78,000,000.00	78,000,000.00	
2.2.1.3	Pembangunan/ Perbaikan Jembatan	20,000,000.00	20,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Dusun Sumbermulyo RT 004)			
	- Belanja Modal(BM) (Dusun Sumbermulyo RT 004)	20,000,000.00	20,000,000.00	
2.2.1.4	Pembangunan infrastruktur desa lainnya	311,815,700.00	317,815,700.00	6,000,000.00
	- Belanja Barang dan Jasa (sumber mulyo Rt.02)			
	- Belanja Modal(BM) (sumber mulyo Rt.02)	100,000,000.00	100,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Dusun Pulonasir TPT RT 008)			
	- Belanja Modal(BM) (Dusun Pulonasir TPT RT 008)	66,000,000.00	66,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Dusun Pulosari TPT)			

	- Belanja Modal(BM) (Dusun Pulosari TPT)	79,315,700.00	79,315,700.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Dusun Sumbermulyo RT 003 s.d RT 005)			
	- Belanja Modal(BM) (Dusun Sumbermulyo RT 003 s.d RT 005)	66,500,000.00	66,500,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (pulosari)		6,000,000.00	6,000,000.00
	- Belanja Modal(BM) (pulosari)			
2.2.2	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana prasarana kesehatan			
2.2.2.1	Pembangunan/pengadaan air bersih			
2.2.2.2	Pembangunan sanitasi lingkungan			
2.2.2.3	Pembangunan Gedung Posyandu			
2.2.2.4	Pembangunan polindes			
2.2.2.5	Sarana dan prasarana kesehatan atau kesehatan lingkungan			
2.2.3	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana pendidikan dan kebudayaan	9,600,000.00	9,600,000.00	
2.2.3.1	Taman bacaan masyarakat/perpustakaan desa			
2.2.3.2	Pembangunan gedung PAUD			
2.2.3.3	Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar dan Seni Budaya			
2.2.3.4	Pengembangan Seni Budaya Lokal	3,000,000.00	3,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Kesenian Kuda Lumping)	3,000,000.00	3,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Kesenian Kuda Lumping)			
2.2.3.5	Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,000,000.00	3,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Desa Pulosari/ Insetif TK)	3,000,000.00	3,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Desa Pulosari/ Insetif TK)			
2.2.3.6	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD	3,600,000.00	3,600,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Desa Pulosari Play Group)	3,600,000.00	3,600,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Desa Pulosari Play Group)			
2.2.4	Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif			
2.2.4.1	Pasar desa			
2.2.4.2	Pembangunan Gedung BUMDes			
2.2.4.3	Penggilingan padi			
2.2.4.4	Lumbung desa			
2.2.4.5	Pengembangan Desa Wisata			
2.2.4.6	Pembibitan Tanaman			
2.2.4.7	Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan			
2.2.4.8	Sarana dan Prasarana Ekonomi Lainnya sesuai kondisi Desa			
2.2.5	Pelestarian Lingkungan Hidup			
2.2.5.1	Penghijauan			
2.2.5.2	Pembuatan terasering			
2.2.5.3	Perlindungan mata air			
2.2.5.4	Pembersihan daerah aliran sungai			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13,695,831.00	13,695,831.00	
2.3.1	Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa			
2.3.1.1	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat			
2.3.1.2	Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Lainnya			
2.3.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga			
2.3.2.1	Bantuan untuk Kegiatan Olah Raga			
2.3.2.2	Bantuan untuk Sarana Prasarana Olah Raga			
2.3.3	Pembinaan kerukunan umat beragama			
2.3.3.1	Bantuan untuk kegiatan keagamaan			
2.3.3.2	Bantuan untuk sarana prasarana keagamaan			
2.3.4	Pembinaan Kesenian dan sosial budaya	13,695,831.00	13,695,831.00	
2.3.4.1	Taman Seni/Museum Desa			
2.3.4.2	Lomba Desa			
2.3.4.3	Pembinaan Desa Siaga			
2.3.4.4	Kegiatan Bersih Desa/Sedekah Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Pulosari)	10,000,000.00	10,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Pulosari)			
2.3.4.5	Peringatan Hari Besar Nasional	3,695,831.00	3,695,831.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Pulosari)	3,695,831.00	3,695,831.00	
	- Belanja Modal(BM) (Pulosari)			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	125,500,000.00	129,091,350.00	3,591,350.00
2.4.1	Peningkatan Sumber Daya Manusia	6,000,000.00	6,000,000.00	
2.4.1.1	Diklat bagi Kepala desa, Perangkat dan BPD			
2.4.1.2	Pelatihan Teknologi Tepat Guna			
2.4.1.3	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif			
2.4.1.4	Pelestarian Lembaga Seni Tradisional			
2.4.1.5	Pembentukan dan Pengembangan BUMDes	6,000,000.00	6,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (BUMDES SARI ARTHA)	6,000,000.00	6,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (BUMDES SARI ARTHA)			
2.4.2	Peningkatan kapasitas masyarakat	84,500,000.00	84,500,000.00	
2.4.2.1	Bantuan Operasional PKK	40,000,000.00	40,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Desa Pulosari)	40,000,000.00	40,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Desa Pulosari)			

2.4.2.2	Bantuan Operasional Karang Taruna/Pemuda	3,500,000.00	3,500,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (kantor pulosari)	800,000.00	800,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (kantor pulosari)	2,700,000.00	2,700,000.00	
2.4.2.3	Bantuan Operasional GSI	2,000,000.00	2,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (GSI Pulosari)	1,250,000.00	1,250,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (GSI Pulosari)	750,000.00	750,000.00	
2.4.2.4	Bantuan Operasional Gapoktan			
2.4.2.5	Bantuan Operasional HIPPA			
2.4.2.6	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	6,000,000.00	6,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (KPMDD)	6,000,000.00	6,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (KPMDD)			
2.4.2.7	PPKBD dan Sub PPKBD			
2.4.2.8	Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu	18,000,000.00	18,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Posyandu)	15,000,000.00	15,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Posyandu)	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.4.2.9	Kader Jumantik			
2.4.2.10	Posko Sambung Rasa	5,000,000.00	5,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Tiga Pilar Desa Pulosari)	5,000,000.00	5,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Tiga Pilar Desa Pulosari)			
2.4.2.11	Bantuan Majelis Taklim/Kelompok Pengajian Masyarakat	10,000,000.00	10,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Bantuan Pulosari)	10,000,000.00	10,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Bantuan Pulosari)			
2.4.3	Bantuan sosial kemasyarakatan	11,000,000.00	20,591,350.00	9,591,350.00
2.4.3.1	Bantuan kepada Rumah tangga miskin		9,591,350.00	9,591,350.00
	- Belanja Barang dan Jasa (balai desa pulosari)			
	- Belanja Modal(BM) (balai desa pulosari)			
	- Belanja Barang dan Jasa ()		9,591,350.00	9,591,350.00
	- Belanja Modal(BM) ()			
2.4.3.2	Taliansih perangkat purna tugas			
2.4.3.3	Bantuan sosial lainnya	11,000,000.00	11,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Bansos Pulosari)	11,000,000.00	11,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Bansos Pulosari)			
2.4.4	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)
2.4.4.1	Bantuan Operasional LPMD	6,000,000.00	6,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (LPMD Pulosari)	6,000,000.00	6,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (LPMD Pulosari)			
2.4.4.2	Mediasi Hukum			
2.4.4.3	Fasilitasi Paralegal	6,000,000.00		(6,000,000.00)
	- Belanja Barang dan Jasa (Hukum Pulosari)	6,000,000.00		(6,000,000.00)
	- Belanja Modal(BM) (Hukum Pulosari)			
2.4.5	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	12,000,000.00	12,000,000.00	
2.4.5.1	Bantuan kepada Linmas	10,000,000.00	10,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (Perlindungan Masyarakat Pulosari)	10,000,000.00	10,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (Perlindungan Masyarakat Pulosari)			
2.4.5.2	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	2,000,000.00	2,000,000.00	
	- Belanja Barang dan Jasa (FKDM Pulosari)	2,000,000.00	2,000,000.00	
	- Belanja Modal(BM) (FKDM Pulosari)			
2.5	Bidang Tak Terduga			
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa/Darurat			
2.5.1.1	Bencana alam			
2.5.1.2	Kerusakan sarana dan prasarana desa			
2.5.1.3	Bencana sosial			
2.5.1.4	Penanggulangan wabah penyakit			
2.5.2	Belanja Tak terduga lainnya			
2.5.2.1	Pengembalian penerimaan			
JUMLAH BELANJA (B)		1,092,710,330.41	1,285,801,680.41	193,091,350.00
SURPLUS / DEFISIT (A - B)		(817,448.41)	(817,448.41)	
3	PEMBIAYAAN	817,448.41	817,448.41	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	817,448.41	817,448.41	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) Tahun Sebelumnya	817,448.41	817,448.41	
3.1.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	817,448.41	817,448.41	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.2.1	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
3.1.3.1	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
3.1.4.1	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.1.1	Pembentukan Dana Cadangan			

3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.2.1	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pemberian Pinjaman			
3.2.3.1	Pemberian Pinjaman kepada kelompok masyarakat			
PEMBIAYAAN NETO (D - E)		817,448.41	817,448.41	

Printed by simKUDA 2015



Lampiran 7**BAB I
PENDAHULUAN****2.1. Latar Belakang**

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik yang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui proses mysyawahar dusun atau kegiatan pengkajian keadaan desa (pkd) sehingga di peroleh usulan usulan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan atas yaitu para pemangku jabatan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,pendayagunaan potensi dan kemampuan desa,penguatan peran pemerintah desa sebagai fasilitator pembangunan, penguatan lembaga – lembaga yang ada dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pengelolaan pembangunan,optimalisasi peran KPM dalam memfasilitasi penbangunan desa dan mensinergikan berbagai pemeran pembangunan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat desa sejahtera lahir dan batin pembangunan desa lebih di arahkan sesuai dengan visi dan misi desa serta berpegang pada hasil dari Musrenbang RPJM des yaitu dokumen RPJM desa selama kurun waktu 6 tahun. RKP Des yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM desa di gunakan sebagai tolak ukur bagi desa untuk merumuskan kegiatan pembangunan desa dalam setahun ke depan yang di laksanakan desa sendiri yang pembiayaan pembangunan dari APB-Desa yang bersumber PA desa, ADD, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKP Desa Pulosari adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 18/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 18/E).
16. Peraturan Kepala Desa Pulosari Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes)Pulosari.

2.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran perencanaan pembangunan jangka menengah desa, sehingga mempermudah pencapaian target pembangunan berdasarkan visi misi desa;
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Manfaat yang diharapkan dari tersedianya dokumen RKP Desa adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif;
2. Masyarakat dapat secara aktif memantau pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pemerintah desa dapat

2.4. Visi Dan Misi

Pada era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini tidaklah mudah untuk diwujudkan akibat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain kemiskinan, jumlah pengangguran, pemahaman terkait kesehatan sebagian kecil masyarakat masih rendah serta produktifitas dan ketaifitas ekonomis masyarakat yang juga kurang diberdayakan.

Dari uraian singkat tentang permasalahan diatas, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka ditetapkan Visi dan Misi Desa, sebagai berikut :

1. Visi Desa

Visi Merupakan pandangan Jauh kedepan,kemana dan bangaimana Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang,harus dibawa dan berkarya agar konsisten ,dapat Eksis,antisipatif,inofatif serta produktif.

Visi Adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan,berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan,dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai yang luhur yang dianutkan oleh seluruh komponen stakeholders.

Berpihak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang. Maka visi Desa Pulosari Adalah : MANIS

“ **MANDIRI,NASIONALIS,ISTIMEWA DAN SEJAHTERA** “

Penjelasan Visi :

Dalam rumususan Visi Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang terdapat kata kunci yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Mandiri** , adalah mampu membangun Desa dengan mengalih potensi yang ada di dalam Desa dan mengedepankan nilai kebersamaan.
- **Nasionalis**, Adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antaer umat beragama dengan hidup berdampingan sesuai dengan koridor adat dan budaya yang ada.
- **Istimewa**, Adalah membeikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan mengedepankan kepentingan umum daripada yang lainnya.
- **Sejahtera**, Adalah bertekad mensejahterakan rakyat dengan kemampuan yang di miliki Pemerintah Desa yang sesuai visi pemerintah kabupaten Jombang sehati.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi mempersatu gerak,langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan Desa tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Adapun Misi Pemerintahan Desa Pulosari Adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, Mengandung arti penyempurnaan Struktur kelembagaan pemerintahan Desa yang menitikberatkan pada proses penguwatan kelembagaan /Organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional,efektif,berkopetensi tinggi terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan Masyarakat Desa.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh Komponen Masyarakat,pemerintah Desa,lembaga Desa dan swasta agar pembangunan di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi,mempunyai intregrasi dan jatidiri yang dipandu oleh nilai-nilai yang luhur berbudaya dan beragama.

3. Membangun Struktur Perekonomian uang Kokoh berbasis Keunggulan di bidang Agribisnis, Mengandung arti mengembangkan Desa dengan memperkuat perekonomian Desa yang mengandalkan pada kekuatan sektor pertanian dan

Produk Unggulan Desa menuju keunggulan Kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi dan pelayanan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan pada perekonomian kerakyatan serta mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan.

4. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Mengandung arti pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada dapat dirasakan secara merata dari hasilnya oleh semua masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menggunakan hasil analisis keuangan desa sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan desa yang mencakup bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.139.141.600, (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)

Kebijakan Rencana Penerimaan Pendapatan

Desa Pulosari tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan asli desa	
	Hasil usaha desa	
	BUM Desa	Rp. -
	Tanah kas desa	Rp. 10.000.000
	Hasil pengelolaan kekayaan (aset) desa	

No	Uraian	Jumlah
	Pasar desa Tambahan perahu Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat Lain-lain pendapatan desa yang sah Pungutan desa	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -
2.	Transfer	
	Dana Desa Bagian dari hasil pajak daerah Alokasi Dana Desa Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Bantuan keuangan dari APBD Provinsi	Rp. 636.916.000 Rp. - Rp. 385.361.000 Rp. - Rp. -
3.	Pendapatan lain-lain Hibah dan sumbangan pihak ke tiga Hasil kerjasama desa Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp. - Rp. - Rp. -

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Desa Pulosari dalam perencanaan kebijakan keuangan desa tahun 2016 diarahkan dalam pencapaian target pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan desa.

Adapun kebijakan keuangan belanja desa Pemerintah Desa Pulosari sebagai berikut:

Kebijakan Belanja Desa Pulosari Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal	Rp. 232.716.600 Rp. 39.533.000 Rp. 21.404.500
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 628.593.900
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Rp. 60.029.000
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 50.000.000
5.	Belanja Takterduga	Rp. -

2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dalam kebijakan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 18 meliputi dua hal, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Uraian kebijakan keuangan desa dalam hal pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Kebijakan Pembiayaan Desa Pulosari Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan pembiayaan SilPA tahun sebelumnya Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp. - Rp. - Rp. -
2.	Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal desa	Rp. - Rp. -

Kebijakan keuangan desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa telah secara optimal digunakan dalam pencapaian visi dan misi desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)

RKP Desa Pulosari tahun 2015, meskipun telah mengikuti Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tetapi belum cukup mampu diterjemahkan secara rinci terhadap kebutuhan pembangunan di desa. Hal ini yang melandasi permasalahan pembangunan yang harus diungkap sebagai dasar perumusan lebih lanjut. Sehingga pembangunan desa dapat lebih memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah Berdasar RKP Desa Tahun Sebelumnya

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan pemerintah desa lebih menitik beratkan pada belanja pegawai, sehingga cakupan penyelenggaraan menjadi terbatas
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan desa bertumpu pada penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar seperti jalan dan selokan. Pembangunan dibidang kesehatan dan lainnya sangat terbatas
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Penyelenggaran pembinaan masyarkat mencakup kelembagaan internal desa. Kelembagaan sosial dan penumbuhkembangan kehidupan sosial dan budaya belum berjalan secara optimal.
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pembinaan sosial ekonomi kemasyarakatan belum tertuag secara baik dalam perencanaan pembangunan desa

Kendala dan permasalahan

1. Keterbatasan anggaran dalam perencanaan desa. Dana terserap secara optimal hanya untuk pembangunan infrastruktur desa.
2. Kurang optimalnya keswadayaan masyarakat, sehingga partisipasi pembangunan masyarakat juga terbatas.
3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa hanya sebatas pada pelayanan masyarakat. Sedangkan pada perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara optimal

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa Tahun Sebelumnya

Perencanaan pembangunan desa pada periode sebelumnya berdasar pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang terbagi pada tujuh bidang urusan wajib dan tiga bidang urusan pilihan. Hal ini berpengaruh pada penentuan prioritas kegiatan yang harus mencakup secara spesifik pada masing-masing bidang. Sedangkan pada tahun 2014 dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, konsepsi pembangunan desa harus bertumpu pada pembangunan manusia. Oleh karena perubahan orientasi ini menjadi pijakan penyusunan rumusan masalah.

Rumusan Masalah Berdasar RPJM Desa

Tahun Sebelumnya

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan pemerintah desa tidak menjadi prioritas desa dan pemerintah kabupaten
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan desa masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur desa, sedangkan bidang lain diserahkan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Pembinaan kemasyarakatan tidak teralokasi dalam anggaran desa. Pembinaan kelembagaan hanya terjadi pada kelembagaan desa saja.
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan bersama dengan PNPM Mandiri Perdesaan.

Kendala dan permasalahan

1. Perencanaan masih terbatas pada pembangunan infrastruktur desa yang berupa fisik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat
2. Orientasi pembangunan masih bias, karena keterbatasan anggaran pembangunan yang masuk ke desa.

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Rumusan Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

No	Bidang	Uraian Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan perangkat desa dalam hal pelayanan kantor saja dan bersifat temporer
2.	Pelaksanaan pembangunan desa	Kegiatan pembangunan sebagai penugasan dari pemerintah kabupaten dilakukan dengan kontraktual oleh SKPD terkait sehingga desa tidak banyak terlibat
3.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Diarahkan pada berfungsinya kelembagaan desa, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4.	Pemberdayaan masyarakat desa	Pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan ditingkat kabupaten, dan BPM-PD bertindak sebagai operator kegiatan.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Kekeringan pada bulan agustus s/d oktober
2. Wabah penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk pada musim hujan terutama pada bulan desember s/d maret

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Belanja Pegawai	Desa	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2	Belanja barang dan jasa	Desa	Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat
3	Belanja modal	Desa	Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Jalan rabat beton usaha tani	Dusun Pulosari	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat
2	Pembuatan TPT dan Drainase	Dusun Sumbermulyo, Dusun Pulosari dan Dusun Pulonasir	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat
3	Pengerasan jalan	Dusun Pulonasir	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Kegiatan PKK	Desa	Meningkatkan peran serta PKK dalam pembangunan desa
2	Bersih desa	Desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3	Bantuan sosial kepada masyarakat	Desa	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4	Bantuan Posyandu desa	Desa	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pelatihan Linmas	Desa	Meningkatkan keterampilan aparat dalam penyelenggaraan Linmas
2	Pengembangan BUM Dese	Desa	Pengembangan usaha milik desa

4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Program pembangunan Desa Pulosari dilakukan secara integral dengan pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Prioritas program pembangunan tersebut merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pengaspalan jalan	Jalan poros desa	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi jalan masyarakat
2	Plengsengan	Jalan poros desa	Meningkatkan fungsi jalan

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Bantuan sarana dan prasarana posyadu	8 posyandu	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pelatihan pupuk organik	Desa	Meningkatkan diversifikasi usaha masyarakat
2	Pelatihan produksi makanan olahan	Desa	Meningkatkan usaha kelompok masyarakat

4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

Pembangunan desa selain dilakukan secara swakelola juga dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama desa. Kerjasama desa dapat dilakukan dengan desa lain dan dengan pihak ketiga. Desa Pulosari dalam rangka membangun wilayah kawasan perdesan melalui kegiatan kerjasama desa diarahkan untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dan pihak lain dalam membangun desa.

Kegiatan dengan kerangka kerjasama desa dengan pihak ketiga tidak terencana.

4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui kegiatan swadaya. Swadaya masyarakat dapat berupa barang dan jasa yang disertakan dalam pembangunan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat ditetapkan sebagai kegiatan yang bersifat swadaya. Pelaksanaan kegiatan swadaya dilakukan dengan sistem swakelola murni yang pembiayaanya dapat bersumber dari pemerintah dan masyarakat.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pembersihan jalan dusun	Tiga dusun	Meningkatkan gotongroyong masyarakat

4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, bahwa pemerintah desa melalui Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) selanjutnya akan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. TPK Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

TPK Desa bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Usulan TPK Desa didasarkan pada kebutuhan terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan jenis pekerjaan. Dalam keanggotaannya mempertimbangkan keterwakilan gender.

Usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) berdasarkan jenis usulan kegiatan sebagai berikut:

I Tingkat Desa

- | | | | |
|----|------------------|---|------------------|
| a. | Penanggung Jawab | : | KEPALA DESA |
| b. | Sekretaris | : | SEKRETARIS DESA |
| c. | Bendahara | : | BENDAHARA DESA |
| d. | Seksi Teknik | : | STAF PEMBANGUNAN |

II Tingkat Kelompok

- | | | | |
|---|------------|---|--------------|
| 1 | Ketua | : | MUANAN |
| 2 | Sekretaris | : | SIGIT WALUYO |

3	Bendahara	:	ENDANG SRI SUNDARI
4	Seksi Perencanaan	:	WIDJI
III	Tingkat Sup Kelompok		Dusun Pulosari
1	Seksi Teknik	:	PURNOMO
2	Seksi Pengadaan	:	RIANTO
3	Seksi Pengawasan	:	SUBUR
IV	Tingkat Sup Kelompok		Dusun Pulonasir
1	Seksi Teknik	:	EKO YUDIANTO
2	Seksi Pengadaan	:	SUNITO
3	Seksi Pengawasan	:	SARJONO
VI	Tingkat Sup Kelompok		Dusun Sumbermulyo
1	Seksi Teknik	:	SUWANDORI
2	Seksi Pengadaan	:	PEDI ANDRIANTO
3	Seksi Pengawasan	:	MAHMUDI

BAGIAN V

P E N U T U P

Rencana kerja pemerintah desa Pulosari disusun secara partisipatif yang dikelola oleh Tim Penyusun RKP Desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.